PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

RPD 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi bagi daerah dengan masa jabatan Bupati yang berakhir pada tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan/atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk :

a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026; dan
b. penyusunan RKPD Tahun 2024 hingga RKPD Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

(1) Sistematika RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
    a. BAB I PENDAHULUAN;
    b. BAB II GAMBARAN UMUM;
    c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
    d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
    e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
    f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
    g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
    h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
    i. BAB IX PENUTUP.
(2) Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesusai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten Tahun 2018-2023, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur bahwa pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar akan berakhir pada tahun 2023, maka sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Karanganyar akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala

daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Karanganyar tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Data-data hasil kinerja tersebut meskipun beberapa masih bersifat sementara menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar cukup terdampak Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pembangunan di masa-masa menjelang akhir RPJMD 2018-2023. Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi di antaranya kemiskinan, kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, pelayanan publik yang belum optimal dan permasalahan lain yang harus segera diselesaikan agar dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana Visi RPJPD 2005-2025.

RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan pada saat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan

evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJPD 2005-2025, serta RTRW 2013-2032. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut :

1. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

   Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Karanganyar. RPJMN tahun 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai berikut :

   a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
   b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

2. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Visi Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 adalah : Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari.

Adapun misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 antara lain :

a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya.
b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah

f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender

3. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, adalah “Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat”.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan masyarakat Karanganyar yang berkualitas unggul.
b. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan dukungan teknologi maju dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
c. Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
d. Mewujudkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bersatu, dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
f. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal / lestari dengan tetap menjaga kelestarian eksistensi lingkungan yang harmonis dan kompetitif.

4. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032

   Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

5. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan RKPD

   Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

6. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah

   Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

7. Hubungan antara RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah

   Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan. Pada dokumen perencanaan tahunan ini atau yang disebut dengan RKPD didalam babnya mengandung kerangka pendanaan indikatif. Pada saat penyusunan kerangka pendanaan ini mengacu pada dokumen RPD yang termuat didalam Bab 7. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

   Sebagaimana dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dituntut untuk menjaga konsistensi pagu anggaran dalam RPJMD/RPD

dengan RKPD dan RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kondisi ini tentunya disesuaikan dengan kapasitas fiscal setiap tahunnya.

RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan pengganti kekosongan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang tidak dapat disusun akibat berakhirnya masa jabatan Bupati Karanganyar di tahun 2023 dan belum dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang baru akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Meski demikian, sebagaimana halnya RPJMD, penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

RPD disusun bersamaan dengan penyusunan Renstra perangkat daerah, dimana rancangan Renstra perangkat daerah akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPD, dan RPD yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Berbeda dengan RPJMD, perumusan kebijakan rencana pembangunan pada RPD Kabupaten Karanganyar tidak diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.4. Maksud dan Tujuan

RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi, program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah.

Selanjutnya RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi

pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tujuan penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD yang berisikan pengertian ringkas RPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam RPJPD, gambaran capaian kinerja RPD periode sebelumnya, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antardaerah, berisi maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Terbagi dalam sub bab yang meliputi empat aspek, yaitu 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek daya saing daerah, serta 4) aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil kinerja keuangan Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah (berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II yang mencakup empat aspek, yaitu 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek daya saing daerah serta 4) aspek pelayanan umum termasuk SPM dan analisis isu strategis internal eksternal wilayah untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam beberapa indikator tujuan dan sasaran pembangunan serta perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dengan indikator masing-masing.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan kebijakan daerah serta penentuan program-program prioritas daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sesuai mekanisme cascading di Bab V.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha atau 2,36% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.280.069 Ha) dan 0,04% dari total luas Indonesia (190.500.000 Ha). Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 2.004 rukun warga dan 6.508 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Jatipuro	3.436,50	0	10	117	302
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3.	Jumapolo	5.567,02	0	11	117	307
4.	Jumantono	5.355,44	0	12	127	312
5.	Matesih	2.626,63	0	9	126	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	98	334
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	106	296
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	112	300
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	566
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	79	454
11.	Jaten	2.554,81	0	8	113	593
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	121	518
13.	Gondangrejo	5.679,95	0	13	112	508
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	123	389
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	158	466
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	92	337
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
Total		**76.778,64**	**15**	**162**	**2.004**	**6.508**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi, Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

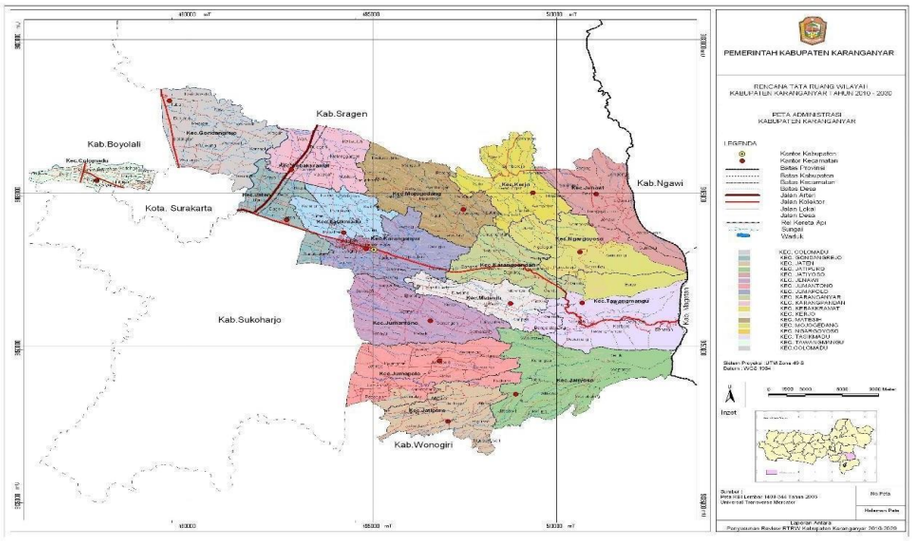

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Topografi

Rata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl. Ketinggian wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kabupaten Karanganyar		**80**	**2.000**	**511**

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

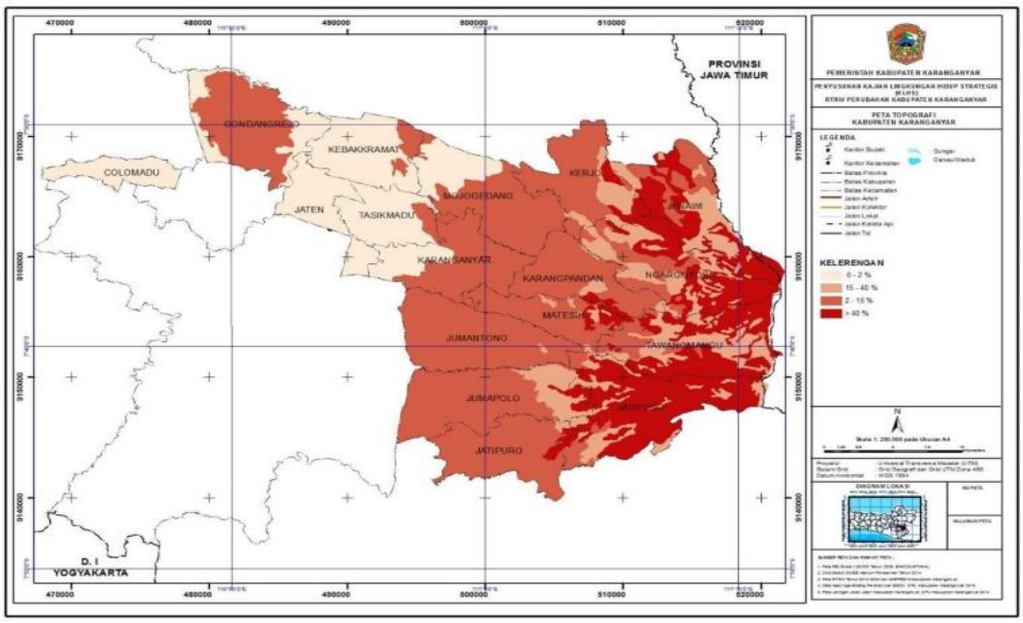

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Karanganyar

2.1.3. Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Kedawung Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M^3/detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah – Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020

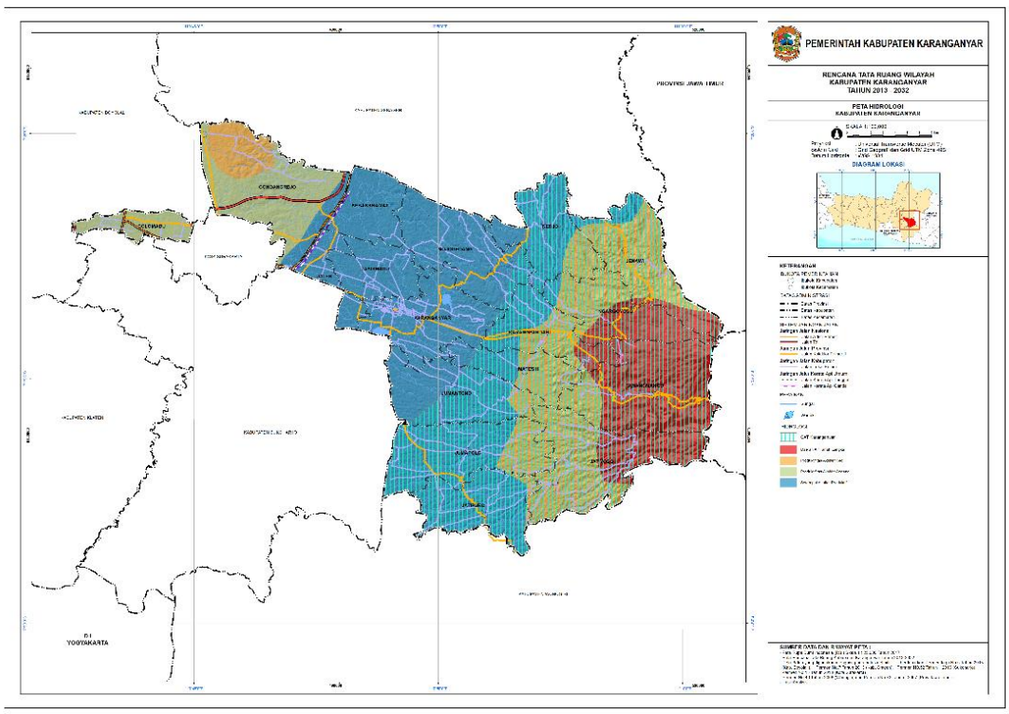

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Karanganyar

2.1.4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar,

menunjukkan bahwa jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2020 adalah 11 hari dibulan januari dengan curah hujan sebesar 411 mm, sedangkan hari hujan terendah adalah bulan juli dengan curah hujan hampir 3 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

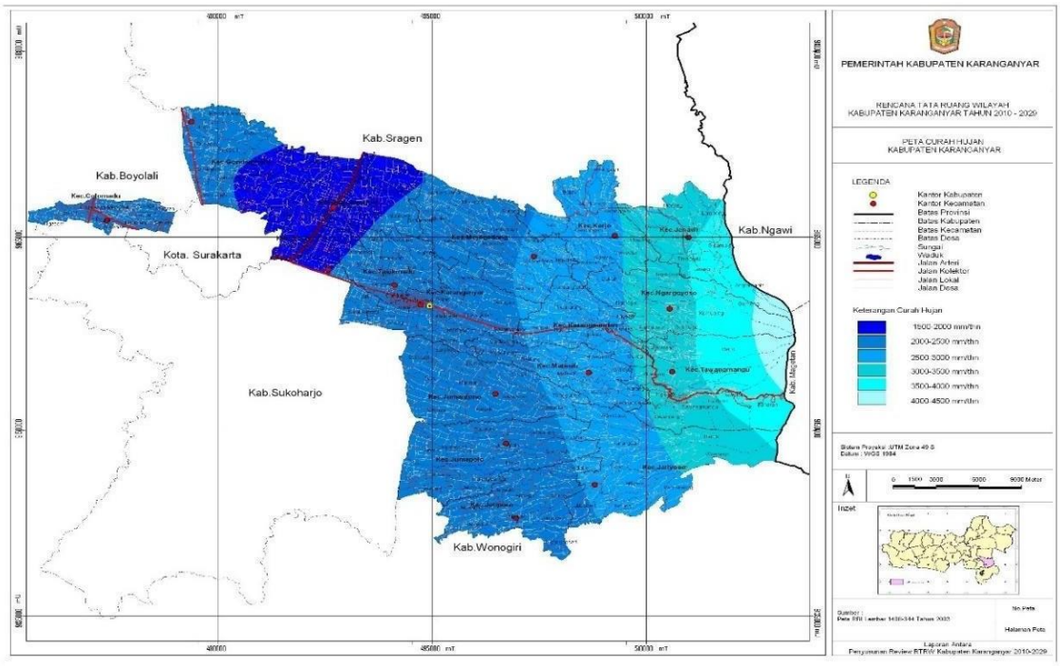

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya

perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

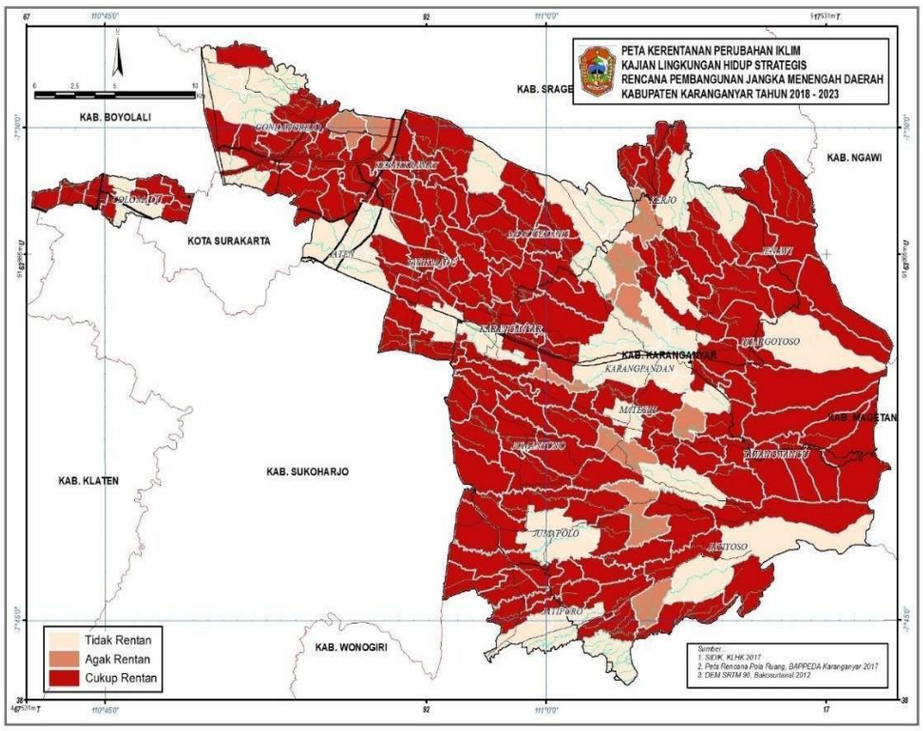

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Gambar 2.5

Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar

Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.4

Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar

Kategori	Desa	Persentase (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri tanah sawah 16.491 Ha dan tanah kering 60.887,64

Ha. Tanah sawah terdiri dari 12.985 tanah sawah dengan irigasi dan 3.506 Ha tanah sawah non irigasi.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah	Tanah Kering
1.	Jatipuro	3.436,50	1.154,94	2.281,56
2.	Jatiyoso	6.716,49	732,00	5.984,49
3.	Jumapolo	5.567,02	1.735,17	3.831,85
4.	Jumantono	5.355,44	1.536,10	3.819,34
5.	Matesih	2.626,63	1.130,38	1.496,25
6.	Tawangmangu	7.003,16	55,22	6.947,94
7.	Ngargoyoso	6.533,94	353,31	6.180,63
8.	Karangpandan	3.411,08	1.387,92	2.023,16
9.	Karanganyar	4.302,64	1.683,62	2.619,02
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.384,96	1.374,77
11.	Jaten	2.554,81	1.087,14	1.467,67
12.	Colomadu	1.564,17	373,69	1.190,48
13.	Gondangrejo	5.679,95	1.722,45	3.957,50
14.	Kebakkramat	3.645,63	1.929,51	1.716,12
15.	Mojogedang	5.330,90	2.122,17	3.208,73
16.	Kerjo	4.682,27	1.061,21	3.621,06
17.	Jenawi	5.608,28	495,90	5.112,38
Total		**76.778,64**	**19.945,67**	**56.832,97**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2021 menurut peta mencapai 76.778,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastuktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54). Berikut kondisi daya dukung lahan terbangun di setiap kecamatan.

Tabel 2.6
Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (LB)	LTp	Luas Lahan Terbangun (LTb)	DDLB	Status DDLB
Jatipuro	4.036,50	1.484,23	296,846	1.781,08	1,59	bersyarat atau sedang
Jatiyoso	6.716,49	1.232,18	246,436	1.478,62	3,18	baik
Jumapolo	5.567,02	2.070,00	414	2.484,00	1,57	bersyarat atau sedang
Jumantono	5.355,44	1.630,00	326	1.956,00	1,92	bersyarat atau sedang
Matesih	2.626,63	874	174,8	1.048,80	1,75	bersyarat atau sedang
Tawangmangu	7.003,16	530	106	636,00	7,71	baik
Ngargoyoso	6.533,94	840,04	168,008	1.008,05	4,54	baik
Karangpandan	3.411,08	1.177,78	235,556	1.413,34	1,69	bersyarat atau sedang
Karanganyar	4.302,64	1.571,80	314,36	1.886,16	1,60	bersyarat atau sedang
Tasikmadu	2.759,73	850,62	170,124	1.020,74	1,89	bersyarat atau sedang
Jaten	2.554,81	1.141,20	228,24	1.369,44	1,31	bersyarat atau sedang
Colomadu	1.564,17	899,9	179,98	1.079,88	1,01	bersyarat atau sedang
Gondangrejo	5.679,95	1.750,80	350,16	2.100,96	1,89	bersyarat atau sedang
Kebakkramat	3.645,63	1.031,00	206,2	1.237,20	2,06	bersyarat atau sedang
Mojogedang	5.330,90	2.051,43	410,286	2.461,72	1,52	bersyarat atau sedang
Kerjo	4.682,27	1.210,00	242	1.452,00	2,26	bersyarat atau sedang
Jenawi	5.608,28	765	153	918,00	4,28	baik

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2021

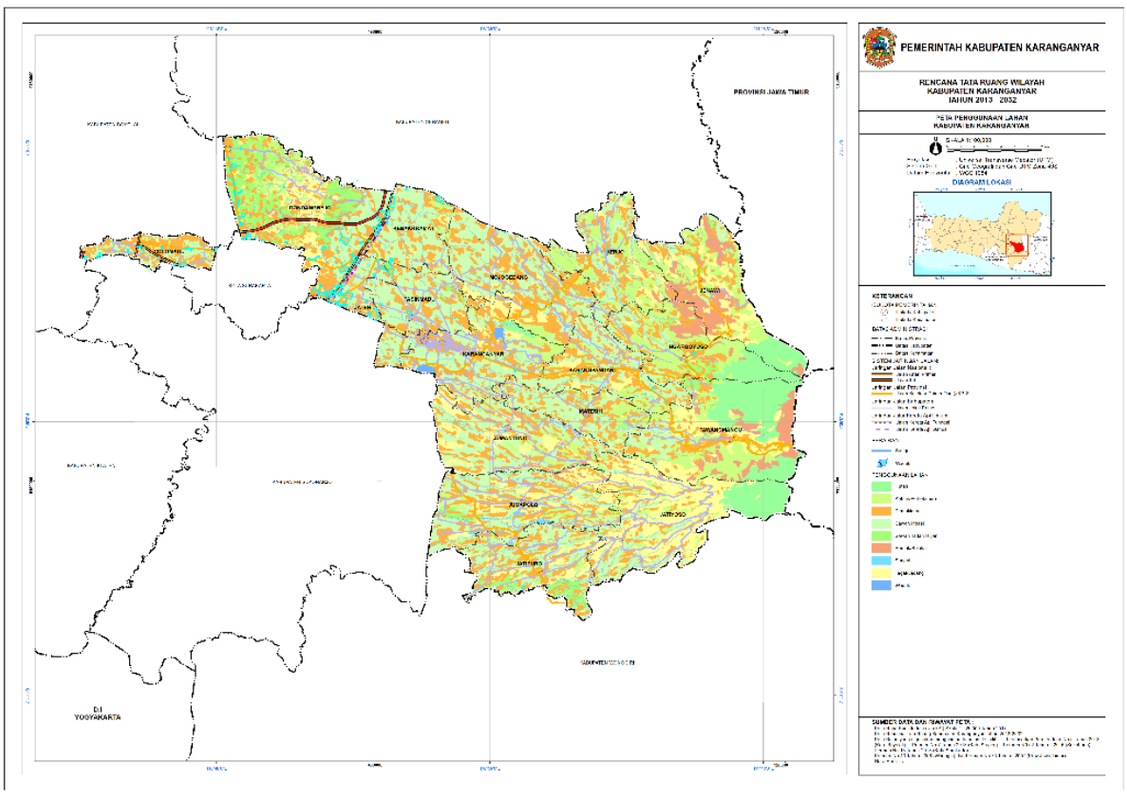

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Karanganyar

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Arah pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada Perda Nomor 19 Tahun 2019, terdiri dari program utama penataan ruang yang meliputi:

a. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
   1) Perwujudan pusat kegiatan:
      a) Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo;
      b) Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
      c) Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan
      d) Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih.
   2) Perwujudan sistem prasarana:
      a) Transportasi;
      b) Listrik;
      c) Telekomunikasi;
      d) Sumber Daya Air; dan
      e) Lingkungan.

b. Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten meliputi perwujudan:
   1) Kawasan lindung:
      a) Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
      b) Pembangunan Arboretum di Kecamatan Tawangmangu;
      c) Pembangunan Hutan Kota di sekitar Waduk Lalung dan Delingan.
   2) Kawasan budidaya:
      a) Kawasan hutan produksi;
      b) Kawasan peruntukan pertanian;
      c) Kawasan peruntukan perikanan;
      d) Kawasan peruntukan pertambangan;
      e) Kawasan peruntukan industri;
      f) Kawasan peruntukan pariwisata;
      g) Kawasan peruntukan permukiman; dan
      h) Kawasan peruntukan lainnya.

c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Arah penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar adalah:

1) KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi
   a) Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi:
      - Kawasan Perkotaan Jaten yang meliputi Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Gondangrejo;
   b) Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi:
      - Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih);
      - Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang; dan
      - Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo.
2) KSK bidang sosial dan budaya meliputi:
   a) Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih.

Berdasarkan Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, maka pengembangan wilayah Karanganyar memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

a. Kawasan Budidaya

Terdiri atas kawasan peruntukan : hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Matesih.
2) Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di seluruh Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso dan Tawangmangu.
3) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di seluruh kecamatan. Kawasan Pertanian Pertanian Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas ±23.618 Ha yang tersebar di seluruh

kecamatan.

4) Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan kecuali Colomadu, dengan komoditas sayur, buah, tanaman biofarmaka dan tanaman hias. Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili.
5) Kawasan peternakan meliputi:
   a) Peternakan unggas terletak di Kecamatan : Gondangrejo, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kerjo, Kebakkramat, Karanganyar; dan Jenawi.
   b) Peternakan sapi terletak di Kecamatan : Karanganyar, Jatipuro, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, Matesih; dan Gondangrejo.
   c) Peternakan domba/kambing terletak di Kecamatan : Jumantono, Jumapolo, Mojogedang, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat; dan Gondangrejo.
   d) Peternakan babi terletak di Kecamatan Jumantono, Jaten, Gondangrejo; dan Kebakkramat.
6) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas;
   a) Perikanan tangkap sungai, bendungan/danau/embung, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
   b) Budidaya perikanan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi;
7) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan : pertambangan mineral dan pertambangan panas bumi;
8) Kawasan peruntukan industri meliputi:
   a) Industri besar di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu;
   b) Industri menengah di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro dan

c) Industri kecil dan mikro di setiap kecamatan.

9) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan/binaan manusia;
10) Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan, meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
11) Kawasan peruntukan budidaya lainnya yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b. Kawasan Peruntukan Lindung

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung, meliputi :

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Jatipuro. Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mojogedang;
2) Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk, RTH Perkotaan dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal;
3) Kawasan Konservasi yang dimaksud yaitu berupa Kawasan pelestarian alam, meliputi Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
4) Kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir dan kawsan bencana putting beliung;
5) Kawasan lindung geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi dan sepadan mata air;
6) Kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu dan Situs Sangiran di

Kecamatan Gondangrejo.

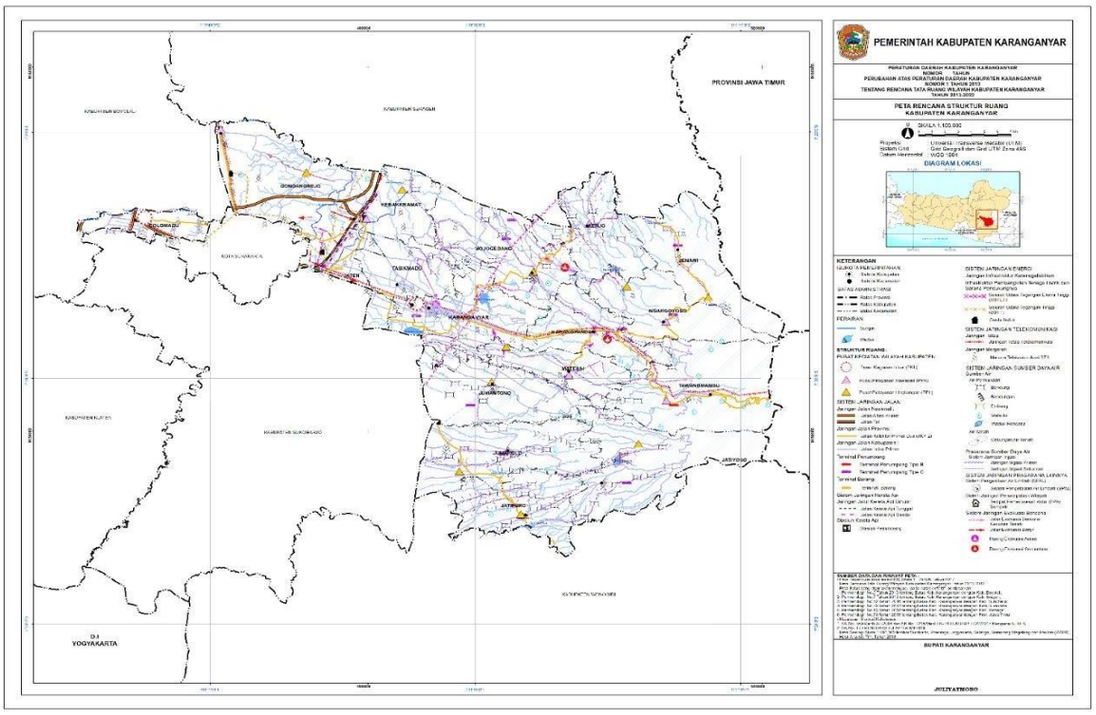

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.7
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar

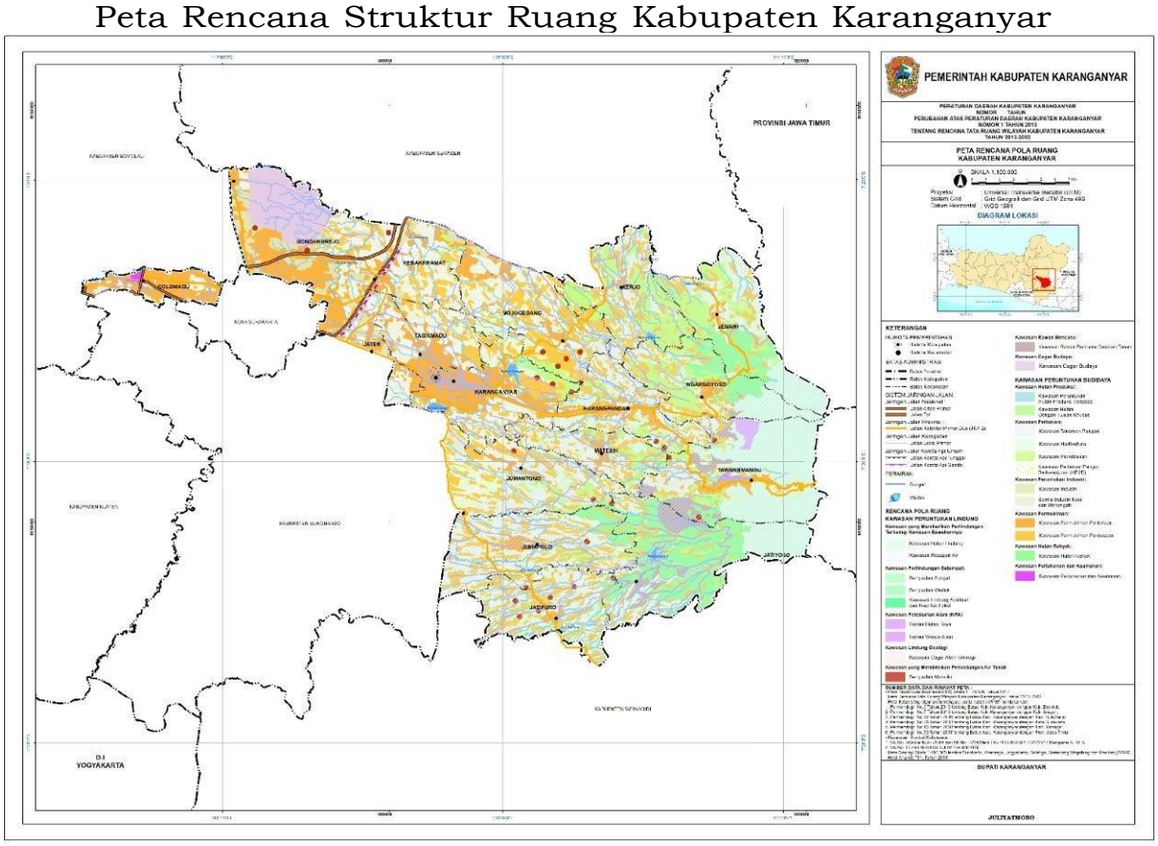

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.8
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karanganyar

2.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah:

Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 4 kawasan bencana gerakan tanah:

1) Sangat rendah, meliputi wilayah Kecamatan Colomadu, sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Matesih.
2) Rendah, meliputi wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro Dan Kecamatan Tawangmangu.
3) Menengah, meliputi wilayah Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar Dan Kecamatan Gondangrejo.
4) Tinggi, meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu Dan Kecamatan Jatiyoso.

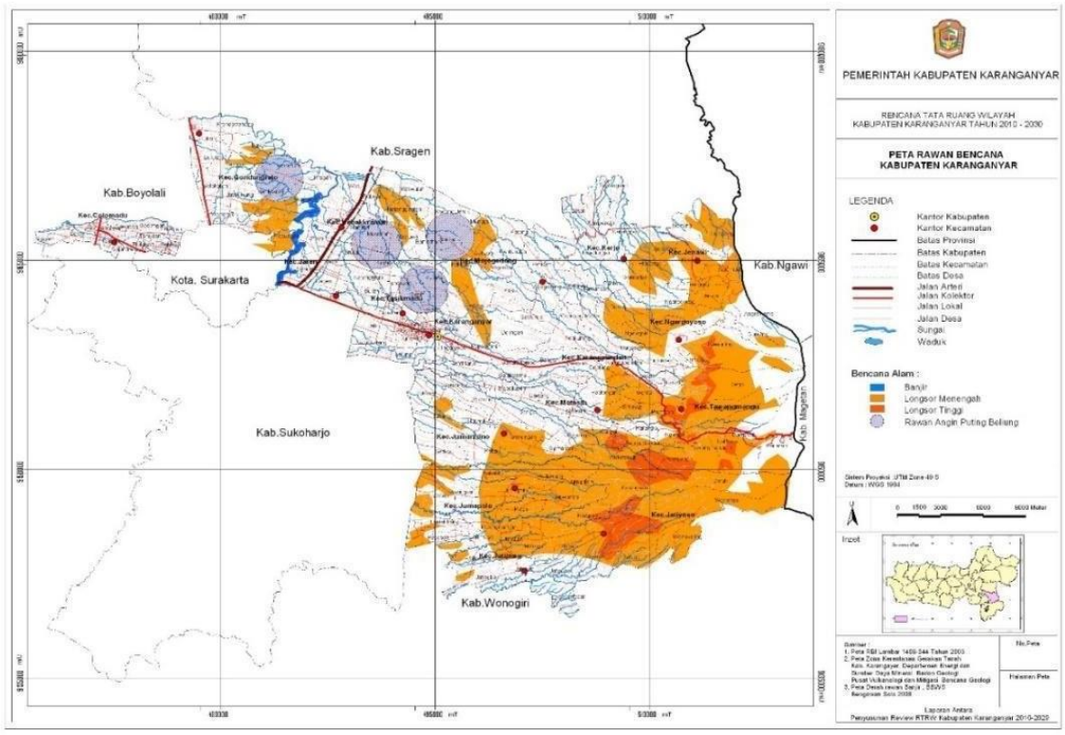

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.9

Peta Kawasan Rawan Bencana Alam

b. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.
c. Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu.

Sedangkan kejadian bencana alam yang dialami desa di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019				2020				2021			
		Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Total	Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Total	Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Total
1	Jatipuro	0	3	0	**3**	1	2	0	**3**	0	1	1	**2**
2	Jatiyoso	0	6	0	**6**	8	7	0	**15**	0	6	0	**6**
3	Jumapolo	0	1	0	**1**	3	5	0	**8**	0	3	0	**3**
4	Jumantono	0	3	0	**3**	1	3	0	**4**	1	1	0	**2**
5	Matesih	0	1	0	**1**	1	7	0	**8**	2	5	0	**7**
6	Tawangmangu	0	7	0	**7**	3	6	0	**9**	0	1	0	**1**
7	Ngargoyoso	0	6	1	**7**	2	10	0	**12**	1	7	0	**8**
8	Karangpandan	0	3	0	**3**	0	3	0	**3**	1	7	0	**8**
9	Karanganyar	1	2	0	**3**	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**
10	Tasikmadu	3	0	0	**3**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
11	Jaten	4	0	0	**4**	0	0	0	**0**	2	0	0	**2**
12	Colomadu	5	0	0	**5**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
13	Gondangrejo	6	2	0	**8**	0	1	0	**1**	4	1	0	**5**
14	Kebakkramat	4	0	0	**4**	1	1	0	**2**	2	0	1	**3**
15	Mojogedang	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1	1	0	**2**
16	Kerjo	0	3	0	**3**	1	2	0	**3**	0	2	0	**2**
17	Jenawi	0	6	0	**6**	3	5	0	**8**	0	7	0	**7**
Total		**23**	**43**	**1**	**67**	**25**	**52**	**0**	**77**	**14**	**42**	**2**	**58**

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Prakiraan terkait kinerja pelayanan atau fungsi ekosistem terkait dengan layanan fungsi penting terkait dengan fungsi penyedia dan pengaturan kehidupan. Gambaran kondisi jasa ekosistem ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsiannya.

Tabel 2.8
Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
Penyediaan	Penyediaan pangan	39.723,96	49,47	13.029,95	16,23	27.541,08	34,30
	Penyediaan air	23.524,90	29,30	26.599,01	33,13	30.171,08	37,58
Pengaturan	Pengaturan Pemurnian air	39.936,23	49,74	2.594,64	3,23	37.7634,13	47,03
	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	24.833,16	30,93	37.960,38	47,28	17.501,45	21,80
	Tata Kelola Air dan Banjir	22.382,96	27,88	52.522,43	65,41	5.389,60	6,71
	Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam	23.619,90	29,42	55.114,72	68,64	1.560,37	1,94
	Pengaturan iklim	22.382,82	27,88	49.121,84	61,18	8.790,33	10,95

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
	Pemeliharaan Kualitas Udara	22.382,82	27,88	15.993,76	19,92	41.918,41	52,21
	Biodiversiti	22.382,82	27,88	15.625,82	19,46	42.286,36	52,66

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Berdasarkan kondisi di atas maka beberapa fungsi jasa ekosistem perlu mendapat perhatian yaitu :

a. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (kelas tinggi hanya 1,94%);
b. Tata kelola air dan banjir (kelas tinggi hanya 6,71%);
c. Pengaturan iklim (kelas tinggi 19,95%);
d. Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (kelas tinggi 21,80%); dan
e. Penyediaan pangan (sebagian besar kelas rendah 49,47%).

Kondisi di atas menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami juga telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi resiko bencana yang mungkin terjadi.

2.1.8. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar hasil proyeksi BPS tahun 2022 sebanyak 947.642 jiwa, sedangkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jatipuro	29.096	29.004	33.647	34.186	34.799
2.	Jatiyoso	37.349	37.089	39.339	39.622	39.981
3.	Jumapolo	36.474	36.351	41.814	42.456	43.189
4.	Jumantono	43.437	42.939	48.854	49.520	50.289
5.	Matesih	41.408	40.994	44.314	44.712	45.197
6.	Tawangmangu	45.607	45.598	46.998	47.249	47.591
7.	Ngargoyoso	33.397	33.213	36.583	36.990	37.472
8.	Karangpandan	40.707	40.409	43.424	43.802	44.265
9.	Karanganyar	80.538	81.629	84.948	85.592	86.402
10.	Tasikmadu	60.468	61.461	66.690	66.430	66.434
11.	Jaten	84.371	85.583	84.226	84.414	84.761
12.	Colomadu	76.757	82.199	75.313	75.357	75.542
13.	Gondangrejo	78.628	81.112	87.095	88.178	89.443

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
14.	Kebakramat	63.232	64.075	64.418	64.683	65.071
15.	Mojogedang	62.632	63.217	69.372	70.233	71.238
16.	Kerjo	35.304	34.963	37.593	37.909	38.300
17.	Jenawi	26.541	26.683	27.335	27.475	27.668
	Total	**875.946**	**886.519**	**931.963**	**938.808**	**947.642**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2022 yaitu Kecamatan Gondangrejo dengan jumlah penduduk sebanyak 89.443 jiwa, sementara Kecamatan Jenawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 27.668 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 1.234 jiwa/km^2. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 4.830 jiwa/km^2, sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Jenawi dengan kepadatan sebesar 493 jiwa/km^2.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jatipuro	720,73	718,54	833,57	995	1.012
2.	Jatiyoso	556,04	552,21	585,71	590	595
3.	Jumapolo	655,18	652,97	751,10	763	776
4.	Jumantono	811,15	801,78	912,23	925	939
5.	Matesih	1.576,25	1.560,71	1.687,10	1.702	1.720
6.	Tawangmangu	651,25	651,11	671,10	675	680
7.	Ngargoyoso	511,13	508,32	559,89	566	573
8.	Karangpandan	1.193,40	1.184,64	1.273,03	1.284	1.298
9.	Karanganyar	1.871,67	1.897,18	1.974,32	1.989	2.008
10.	Tasikmadu	2.190,87	2.227,07	2.416,54	2.407	2.407
11.	Jaten	3.303,48	3.349,88	3.296,76	3.304	3.317
12.	Colomadu	4.907,74	5.255,12	4.814,89	4.818	4.830
13.	Gondangrejo	1.384,30	1.428,04	1.533,38	1.552	1.575
14.	Kebakkramat	1.734,28	1.757,58	1.766,99	1.774	1.785
15.	Mojogedang	1.174,86	1.185,86	1.301,32	1.317	1.336
16.	Kerjo	754,04	746,71	802,88	810	818
17.	Jenawi	473,27	475,78	487,40	490	493
Kabupaten Karanganyar		1.132,02	1.145,69	1.204,42	1.223	1.234

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018-2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jatipuro	0,71%	-0,32%	2,13%	2,14%	1,79%
2.	Jatiyoso	0,74%	-0,70%	1,22%	0.96%	0,91%
3.	Jumapolo	0,73%	-0,34%	2,05%	2,05%	1,73%
4.	Jumantono	0,74%	-1,15%	1,86%	1,82%	1,55%
5.	Matesih	0,75%	-1,00%	1,38%	1,20%	1,08%
6.	Tawangmangu	0,76%	-0,02%	1,01%	0,17%	0,72%
7.	Ngargoyoso	0,76%	-0,55%	1,61%	1,49%	1,30%
8.	Karangpandan	0,75%	-0,73%	1,35%	1,16%	1,06%
9.	Karanganyar	0,78%	1,35%	1,25%	1,01%	0,95%
10.	Tasikmadu	0,79%	1,64%	1,69%	0,00%	0,01%
11.	Jaten	0,78%	1,44%	0,71%	0,30%	0,41%
12.	Colomadu	0,85%	7,09%	0,56%	0,08%	0,25%
13.	Gondangrejo	0,80%	3,16%	1,76%	1,66%	1,43%
14.	Kebakkramat	0,78%	1,33%	0,90%	0,55%	0,60%
15.	Mojogedang	0,77%	0,93%	1,72%	1,66%	1,43%
16.	Kerjo	0,75%	-0,97%	1,33%	1,12%	1,03%
17.	Jenawi	0,76%	0,54%	1,00%	0,68%	0,70%
	Total	**0,77%**	**1,21%**	**1,33%**	**0,98%**	**0,94%**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS.

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar sebesar 0,94%, dengan laju pertumbuhan tercepat Kecamatan Jatipuro yaitu sebesar 1,79%% dan terendah di Kecamatan Tasikmadu sebesar 0,01%. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sejumlah 947.642 jiwa yang terdiri dari laki-laki 472.414 jiwa dan perempuan 475.228 jiwa. Gambaran sex ratio berdasarkan kelompok umur dapat terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.12
Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0-4	35.867	34.258	70.125	104,70
5-9	34.215	33.058	67.273	103,50
10-14	35.416	33.566	68.982	105,51
15-19	35.452	33.412	68.864	106,11
20-24	33.713	32.472	66.185	103,82
25-29	33.934	33.716	67.650	100,65
30-34	33.993	34.242	68.235	99,27
35-39	36.830	37.050	73.880	99,41
40-44	36.359	35.913	72.272	101,24
45-49	34.049	33.873	67.922	100,52
50-54	31.623	32.091	63.714	98,54
55-59	26.500	28.646	55.146	92,51
60-64	23.419	24.123	47.542	97,08
65-69	17.820	18.978	36.798	93,90

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
70-74	11.797	13.358	25.155	88,31
75+	11.427	16.472	27.899	69,37
Jumlah	**472.414**	**475.228**	**947.642**	**99,41**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS.

Berdasarkan tabel di atas terlihat sex ratio penduduk Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 menggambarkan jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, dimana pada Tahun 2022 sex ratio sebesar 99,41% (pembulatan 100%) yang berarti di setiap 99 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki-laki. Kondisi penduduk Kabupaten Karanganyar di Tahun 2022 digambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut.

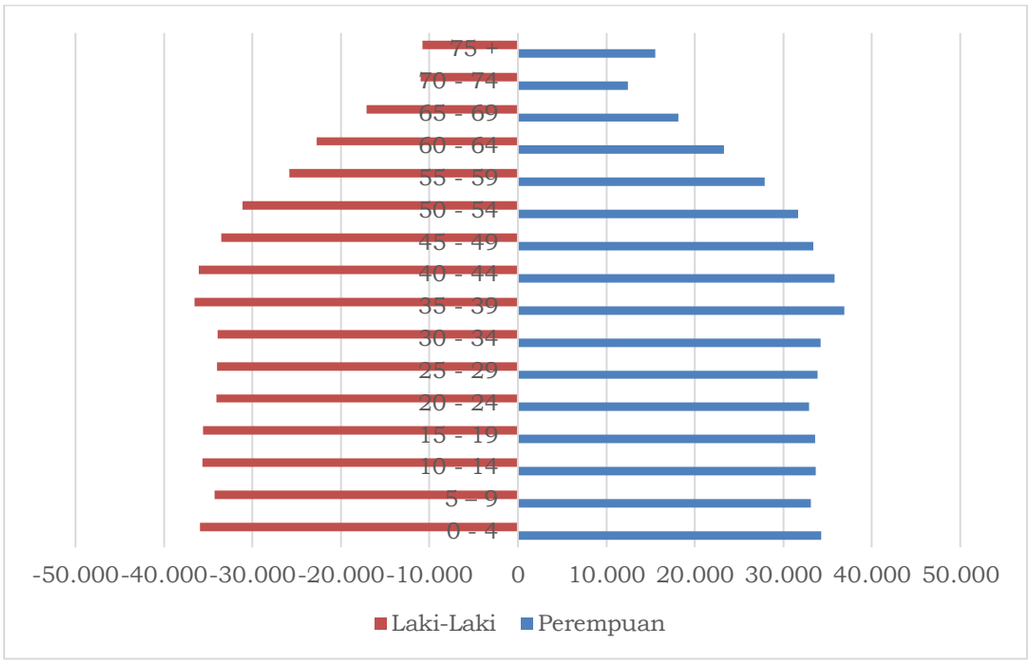

Sumber: Hasil Olah Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS.

Gambar 2.10
Piramida Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebesar 5,87% berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2018- 2022.

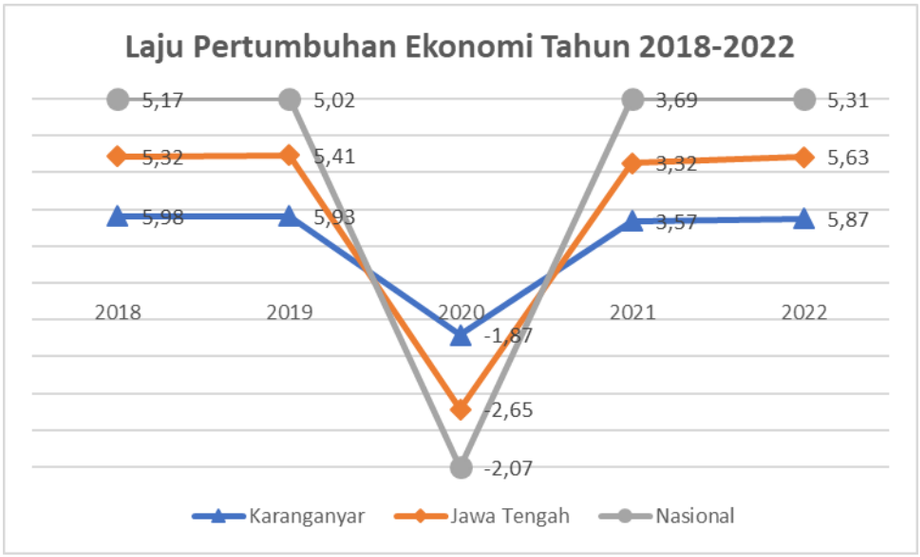

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Karanganyar 2018-2022, BPS

Gambar 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan kabupaten/kota sekitar kembali menggeliat setelah masa pandemi Covid 19. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Boyolali	5,72	5,96	-1,20	4,63	6,33
2	Klaten	5,57	5,57	-1,18	3,82	5,90
3	Sukoharjo	5,82	5,92	-1,70	3,82	5,61
4	Wonogiri	5,41	5,14	-1,41	3,35	5,63
5	**Karanganyar**	**5,98**	**5,93**	**-1,87**	**3,57**	**5,87**
6	Sragen	5,75	5,90	-1,81	3,57	5,76
7	Surakarta	5,75	5,78	-1,74	4,01	6,25
8	Jawa Tengah	5,32	5,41	-2,65	3,32	5,63
9	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan Subosukawonosraten pada tahun 2022 mengalami perbaikan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Subosukawonosraten adalah Kabupaten Boyolali (6,33 %), sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sukoharjo (5,61%).

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian daerah, selain itu juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang. Hal ini bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang meningkat menunjukkan adanya perkembangan ekonomi.

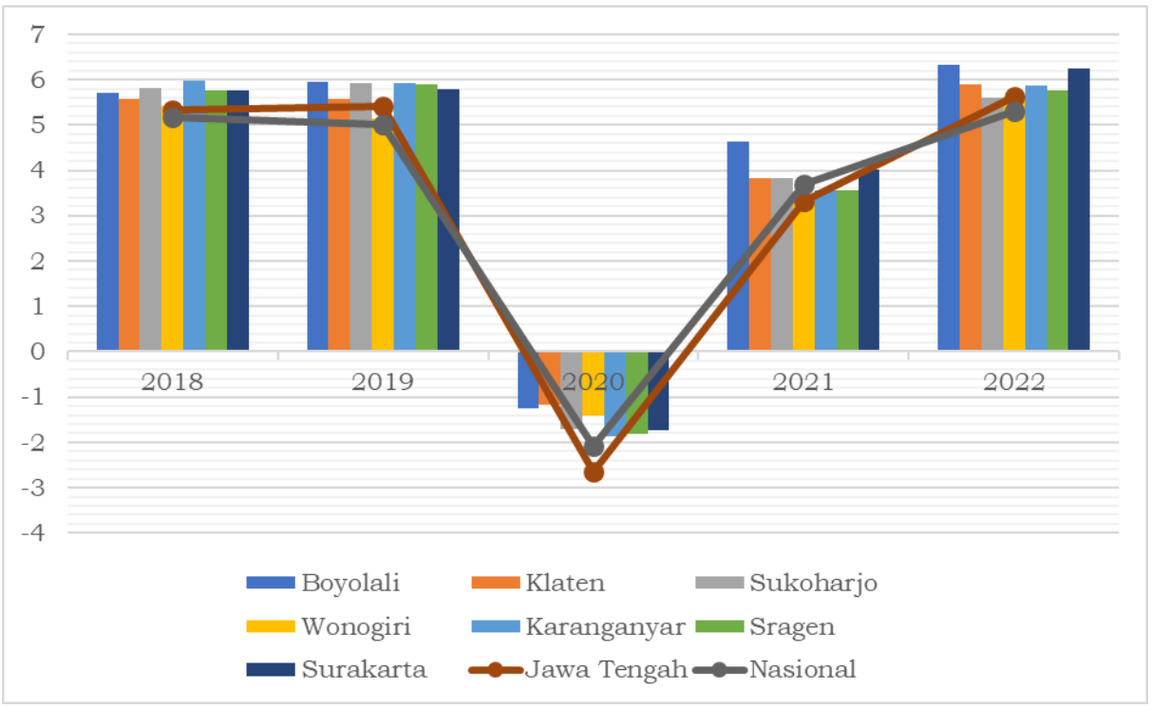

Sumber : Hasil Olah Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2017-2021

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Karanganyar dengan Migas tahun 2018-2022, laju pertumbuhan yang cenderung positif, pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19.

PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp.37.023,45 miliar. Adapun tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp.43.116,96 miliar. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp 25.150,28 miliar meningkat menjadi Rp.26.599,74 miliar pada tahun 2019. Sama halnya dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 menjadi Rp.26.103,23 miliar. Adapun tahun 2022 meningkat menjadi Rp.28.619,99 miliar.

Tabel 2.14
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2018	34.324,38	25.150,28
2019	37.014,75	26.599,74
2020	37.023,45	26.103,23
2021*	39.157,91	27.034,11
2022**	43.116,96	28.619,99

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2018-2022 masih didominasi oleh industri pengolahan serta pertanian kehutanan dan perikanan. Sedangkan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2018-2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB dan ADHK tahun 2018-2022.

Tabel 2.15

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah)

No	Kategori Lapangan Usaha	Tahun									
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.613,11	13,45	4.774,41	12,90	4.917,34	13,26	5.109,03	13,05	5.460,25	12,66
2	Pertambangan dan Penggalian	405,39	1,18	412,14	1,11	416,10	1,12	430,60	1,10	424,12	0,98
3	Industri Pengolahan	15.699,88	45,78	17.028,89	46,01	17.317,82	46,71	18.350,44	46,86	19.942,46	46,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	52,92	0,15	55,84	0,15	54,90	0,15	57,04	0,15	59,79	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	22,10	0,06	24,04	0,06	25,68	0,07	27,43	0,07	28,23	0,07
6	Konstruksi	2.391,04	6,97	2.662,58	7,19	2.5133,89	6,78	2.735,34	6,99	2.974,62	6,90
7	Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.846,01	11,22	4.192,54	11,33	4.075,14	10,99	4.404,58	11,25	4.837,54	11,22
8	Transportasi dan Pergudangan	827,74	2,41	892,33	2,41	713,30	1,92	761,85	1,95	1.374,86	3,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.092,71	3,19	1.207,96	3,26	1.130,25	3,05	1.225,77	3,13	1.546,82	3,59
10	Informasi dan Komunikasi	404,94	1,18	457,26	1,24	532,88	1,44	563,49	1,44	577,40	1,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.237,20	3,61	1.315,87	3,56	1.324,08	3,57	1.406,32	3,59	1.550,42	3,60
12	Real Estate	587,93	1,71	629,62	1,70	632,71	1,71	648,56	1,66	687,89	1,60
13	Jasa Perusahaan	129,55	0,38	147,44	0,04	143,74	0,39	149,86	0,38	163,18	0,38
14	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	663,41	1,93	687,21	1,86	687,15	1,85	676,21	1,73	704,08	1,63
15	Jasa Pendidikan	1.530,70	4,46	1.665,17	4,50	1.695,76	4,57	1.719,24	4,39	1.763,20	4,09
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	285,87	0,83	309,74	0,84	362,31	0,98	347,77	0,89	359,98	0,83
17	Jasa Lainnya	501,98	1,46	550,05	1,49	531,36	1,43	544,92	1,39	662,12	1,54
PDRB		34.292,47	100,00	37.013,09	100,00	37.074,42	100,00	39.158,45	100,00	43.116,96	100,00

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Tabel 2.16

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

(dalam milyar rupiah)

No	Kategori Lapangan Usaha	Tahun									
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3198,25	3,40	3255,97	1,80	3297,06	1,26	3368,36	2,16	3.464,22	2,85
2	Pertambangan dan Penggalian	259,75	2,20	260,97	0,47	260,32	-0,25	263,11	1,07	250,58	-4,76
3	Industri Pengolahan	11456,24	6,03	12177,78	6,30	12020,62	-1,29	12425,19	3,37	12.935,60	4,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	43,46	5,47	45,81	5,41	45,18	-1,36	47,20	4,46	49,26	4,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	19,61	5,18	20,98	6,99	21,39	1,93	22,68	6,04	23,05	1,64
6	Konstruksi	1705,07	9,32	1797,67	5,43	1711,16	-4,81	1825,51	6,68	1.887,03	3,37
7	Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3040,83	5,82	3249,33	6,86	3119,49	-4,00	3321,31	6,47	3.475,11	4,63
8	Transportasi dan Pergudangan	706,16	4,92	748,38	5,98	582,74	-22,13	599,12	2,81	1.021,76	70,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	828,70	7,39	905,38	9,25	842,63	-6,93	899,19	6,71	1.095,89	21,87
10	Informasi dan Komunikasi	427,72	12,91	477,49	11,64	555,49	16,33	586,02	5,50	598,62	2,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	855,66	5,88	895,22	4,62	902,12	0,77	916,42	1,59	929,59	1,44
12	Real Estate	476,21	5,49	504,13	5,86	502,29	-0,36	511,26	1,79	534,67	4,58
13	Jasa Perusahaan	93,99	10,12	104,09	10,75	98,94	-4,94	101,77	2,86	107,17	5,31
14	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	469,54	2,09	479,67	2,16	472,44	-1,51	468,86	-0,76	473,74	1,04
15	Jasa Pendidikan	973,74	6,61	1032,34	6,02	1030,55	-0,17	1031,00	0,04	1054,20	2,25
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	205,91	8,18	219,43	6,56	236,72	7,88	237,27	0,23	242,30	2,12
17	Jasa Lainnya	389,46	9,59	425,12	9,15	404,08	-4,95	409,85	1,43	477,19	16,43
PDRB		25 150,28	5,98	26599,74	5,76	26103,23	-1,87	27034,11	3,57	28619,99	5,87

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

2.2.3. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan, anggota parlemen, dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi. Keberhasilan pembangunan tersebut perlu diukur dengan alat yang sesuai/tepat.

Inflasi Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 sebesar 2,45%, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 1,38%. Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 2,58% dan meningkat pesat di tahun 2022 menjadi 7,03%. Laju inflasi yang menunjukkan tren meningkat ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap barang-barang tertentu diiringi dengan kenaikan harganya serta meningkatnya biaya produksi. Inflasi Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018-2022 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Namun capaian inflasi Kabupaten Karanganyar (berdasarkan perhitungan inflasi Kota Surakarta) tahun 2022, lebih rinci dapat kita lihat pada gambar berikut :

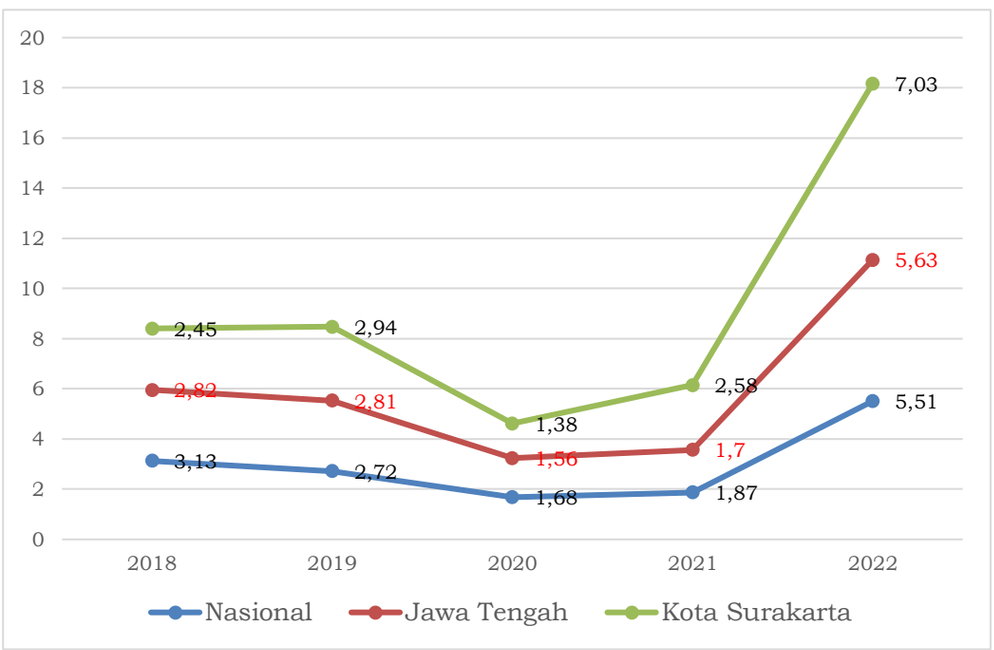

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Gambar 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

2.2.4. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2020 menurun, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021-2022 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Per kapita (Ribu Rp)	
	ADHB	ADHK 2010
2018	39.045,89	28. 609,84
2019	41.820,68	30.051,46
2020	39.781,43	28.051,40
2021*	41.710,81	28,796,21
2022**	45.499,21	30.201,27

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Kenaikan PDRB per kapita tahun 2021 ke tahun 2022, untuk PDRB ADHB dari 41.710,81 menjadi 45.499,21 dan PDRB ADHK dari 28,796,21 menjadi 30.201,27, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

2.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.

Pada tahun 2018-2022, perhitungan indeks gini Kabupaten Karanganyar mengikuti perhitungan indeks gini Provinsi Jawa Tengah. Angka indeks gini Kabupaten Karanganyar menunjukkan nilai yang normal/wajar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berkisar antara 0,360 - 0,374. Berikut adalah indeks gini Provinsi Jawa Tengah yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

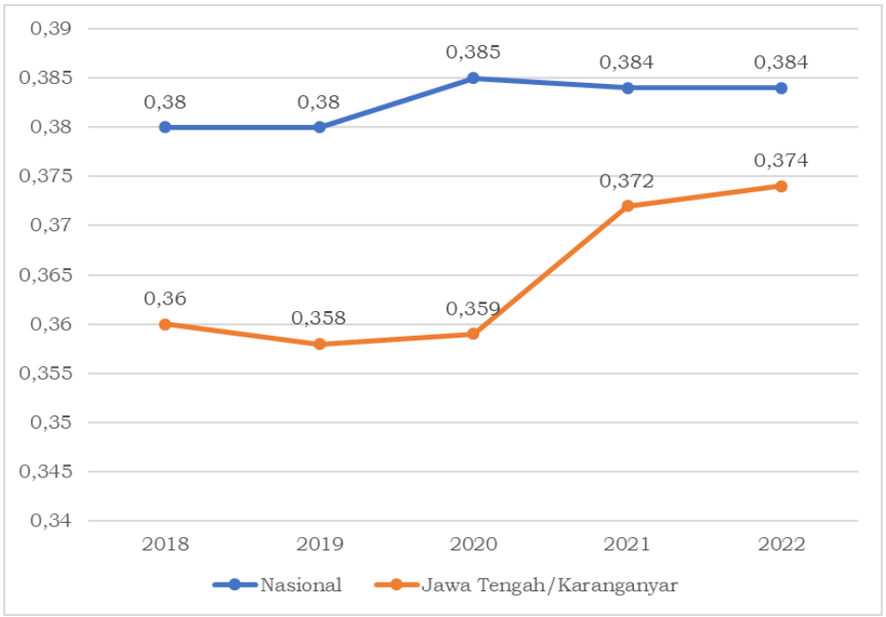

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

2.2.6. Penduduk Miskin

Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 persentase penduduk miskin berada pada angka 10,01%, mengalami penurunan 0,46% yaitu menjadi 9,55% pada tahun 2019. Namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 10,28%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 10,68%, walaupun tidak sebesar kenaikan pada tahun sebelumnya. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 adalah adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak sekali penduduk kehilangan pekerjaan, sedangkan di tahun 2021 masih terdampak dari adanya pandemi covid-19 pada tahun sebelumnya. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

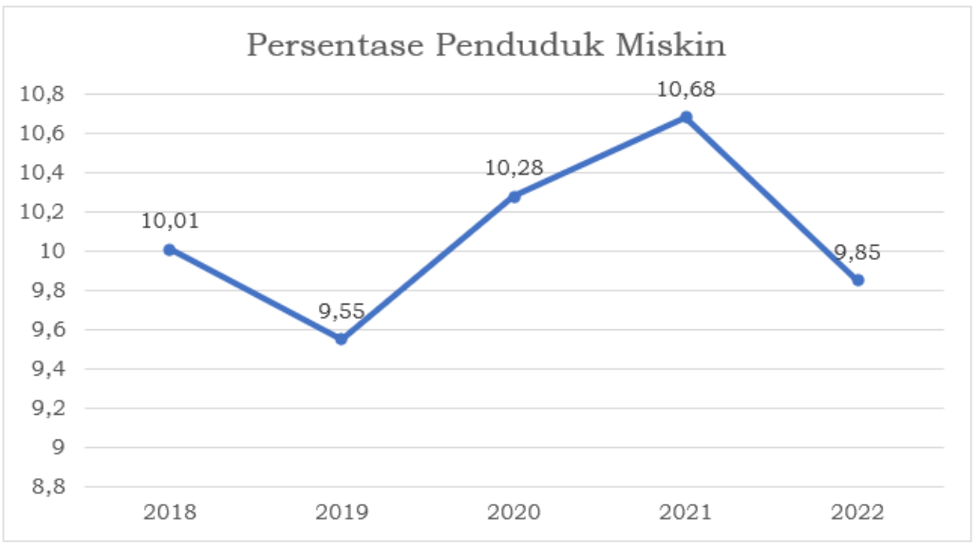

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022

Gambar berikut menunjukan tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022. Kabupaten Karanganyar tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Karanganyar capaian tingkat kemiskinannya relatif lebih buruk dibandingkan dengan capaian tingkat kemiskinan Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar ika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten pada tahun 2022, memiliki capaian tingkat kemiskinan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Namun capaiannya lebih buruk jika dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

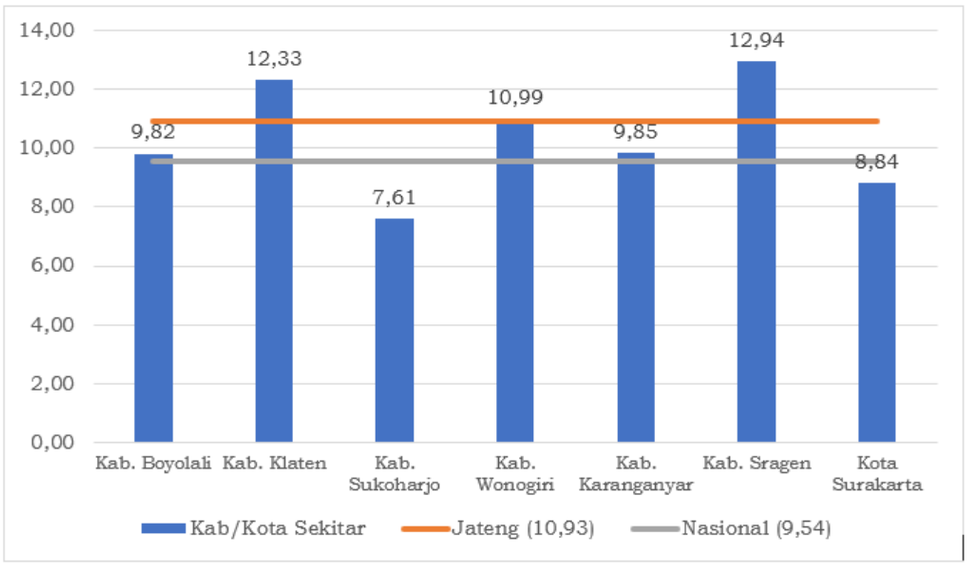

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Gambar 2.16
Garis Kemiskinan Kawasan Subosukawonosraten,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 mencapai 88,56 ribu jiwa, terlihat menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 45,41 ribu jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin terlihat meningkat di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018.

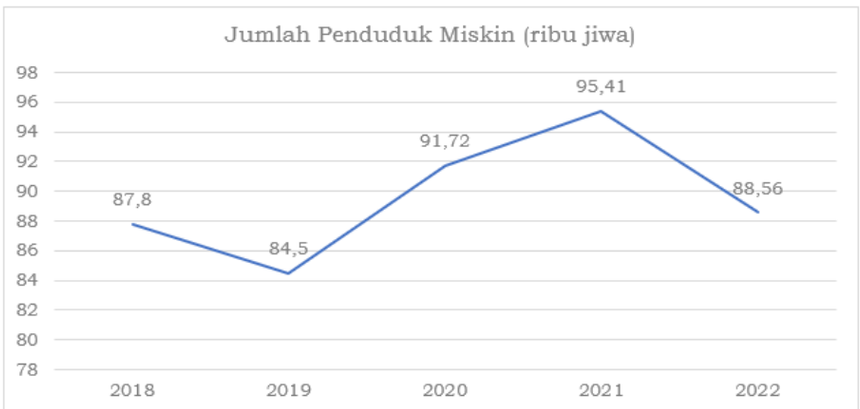

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Gambar 2.17
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022

Jumlah penduduk miskin terbesar di Kawasan Subosukawonosraten pada tahun 2022,adalah di Kabupaten Klaten sebanyak 144,87 ribu jiwa, Kabupaten Sragen sebanyak 115,14 ribu jiwa, Kabupaten Wonogiri sebanyak 105,19 ribu jiwa dan Kabupaten Boyolali sebanyak 97,18 ribu jiwa. Sementara yang terendah adalah di Kota Surakarta dengan jumlah sebesar 45,94 ribu jiwa, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 68,72 ribu jiwa, dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 88,56 ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah penduduk miskin relative lebih buruk dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan Subosukawonosraten, sedangkan sebaliknya Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan Subosukawonosraten. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

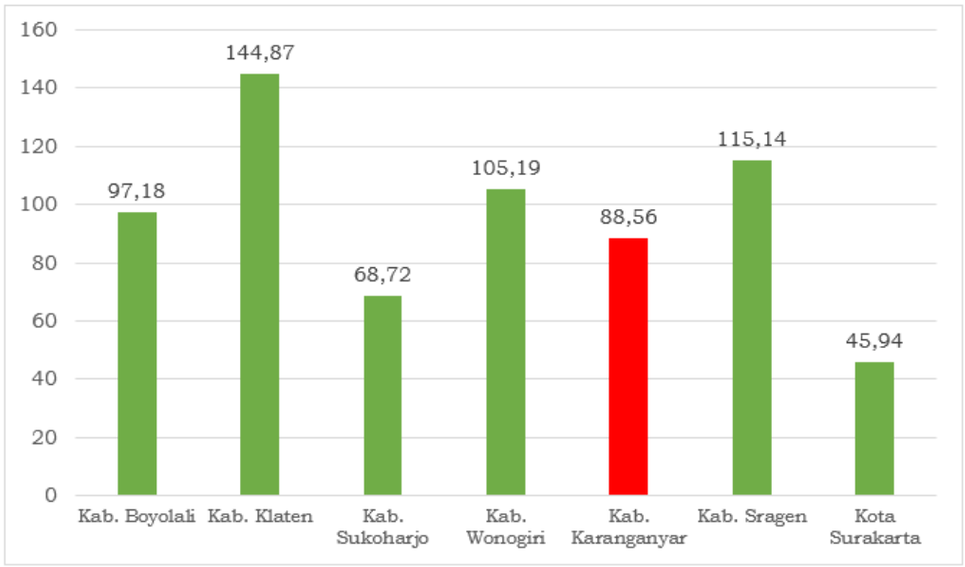

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Gambar 2.18
Jumlah Penduduk Miskin Kawasan Subosukawonosraten
Tahun 2022

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 nilai IPM menurun 0,03 poin. Untuk tahun 2021, seiring lewatnya masa pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi, IPM Kabupaten Karanganyar

kembali berjalan naik menjadi 75,99 dan meningkat lagi sebesar 76,58 di tahun 2022.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	77,36	77,38	77,47	77,55	77,64
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,66	13,67	13,68	13,69	13,7
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,52	8,56	8,57	8,79
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	11.223	11.569	11.428	11,509	11,798
IPM	Angka	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58

Sumber : Statisktik Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, BPS

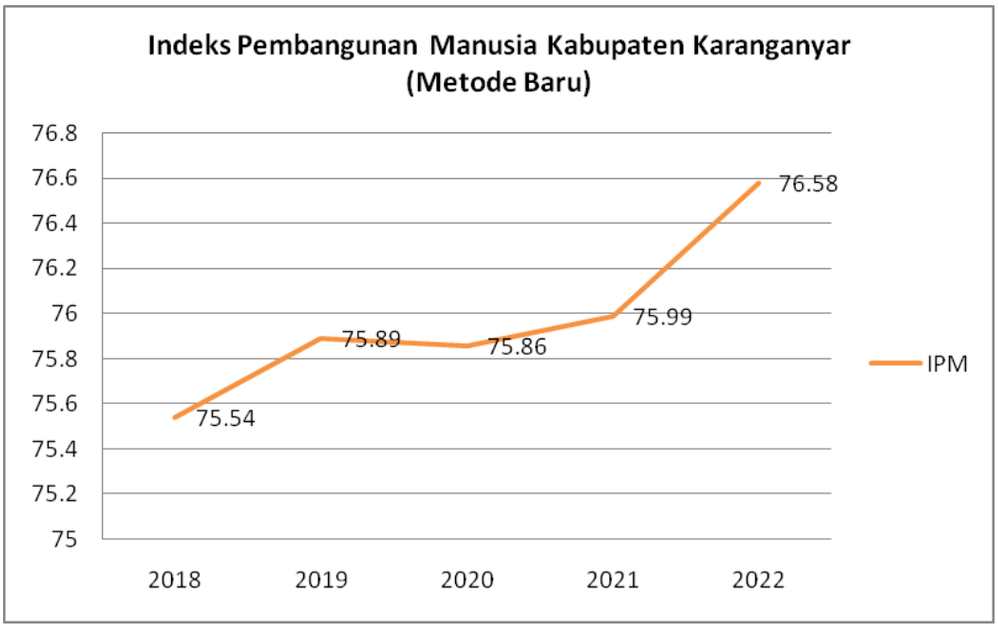

Sumber : Statisktik Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, BPS

Gambar 2.19
Nilai IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Adapun IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.19
IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Surakarta	81,46	81,86	82.21	82,62	83,08
2.	Sukoharjo	76,07	76,84	76.98	77,13	77,94
3.	**Karanganyar**	**75,54**	**75,89**	**75.86**	**75,99**	**76,58**
4.	Klaten	74,79	75,29	75.56	76,12	76,95
5.	Boyolali	73,22	73,80	74.25	74,40	74,97
6.	Sragen	72,96	73,43	73.95	74,08	74,65
7.	Wonogiri	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Nilai IPM Kabupaten/Kota wilayah Soloraya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan nilai IPM, tetapi mengalami penurunan 0,03 yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif cukup besar (-1,87%) di tahun 2020 pada saat pandemic Covid-19.

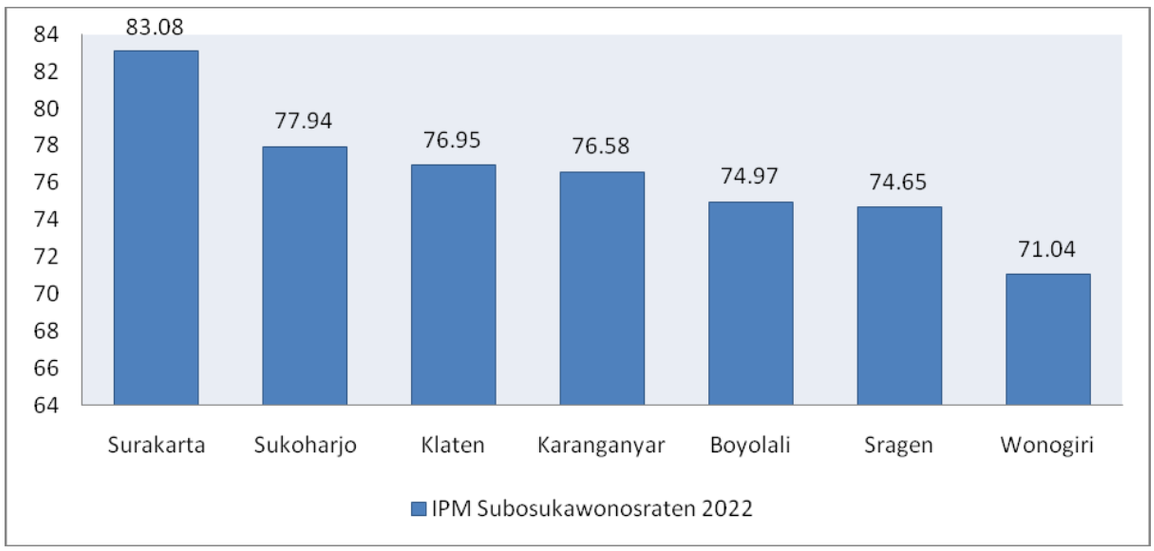

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.20
Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten
Tahun 2022

IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2022 sebesar 76,58 di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 72,79 dan juga nasional sebesar 72,91. Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dijabarkan berikut ini.

Tabel 2.20
IPM Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Karanganyar	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

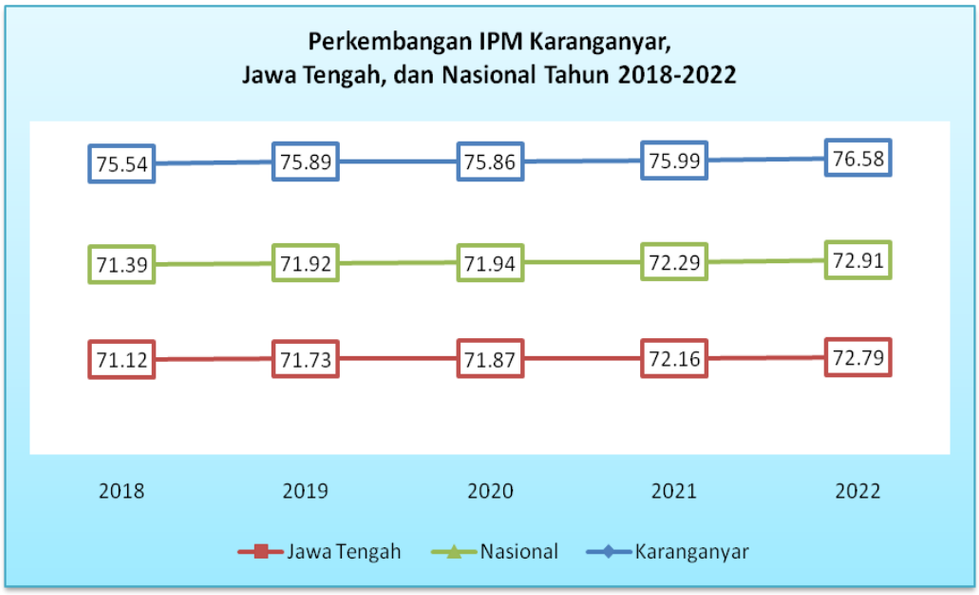

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.21
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dibandingkan
dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik dari 77,31 pada tahun 2017 menjadi 77,47 pada tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, AHH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 74,67 dan Nasional sebesar 71,85. Selengkapnya penjelasan angka harapan hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 2.21
Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Karanganyar	77,36	77,38	77,47	77,55	77,64
Jawa Tengah	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71.85

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

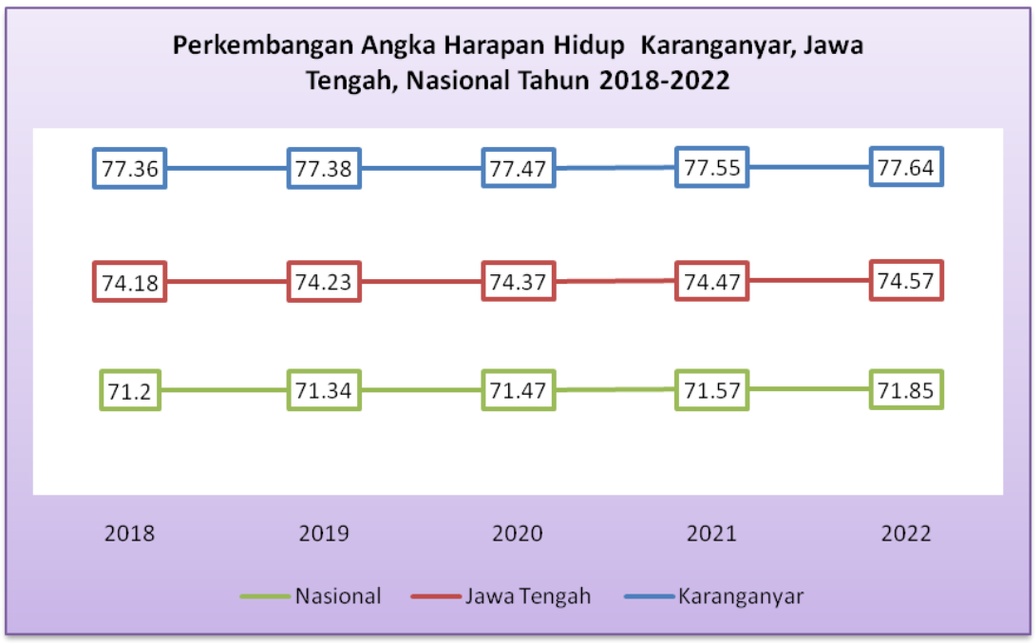

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-202

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari Tahun 2017 sebesar 13,65 menjadi 13,69 di Tahun 2021. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 12,81 dan Nasional sebesar 13,10. Perkembangan HLS selama 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Karanganyar	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70
Jawa Tengah	12,63	12,68	12,70	12,77	12,81
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

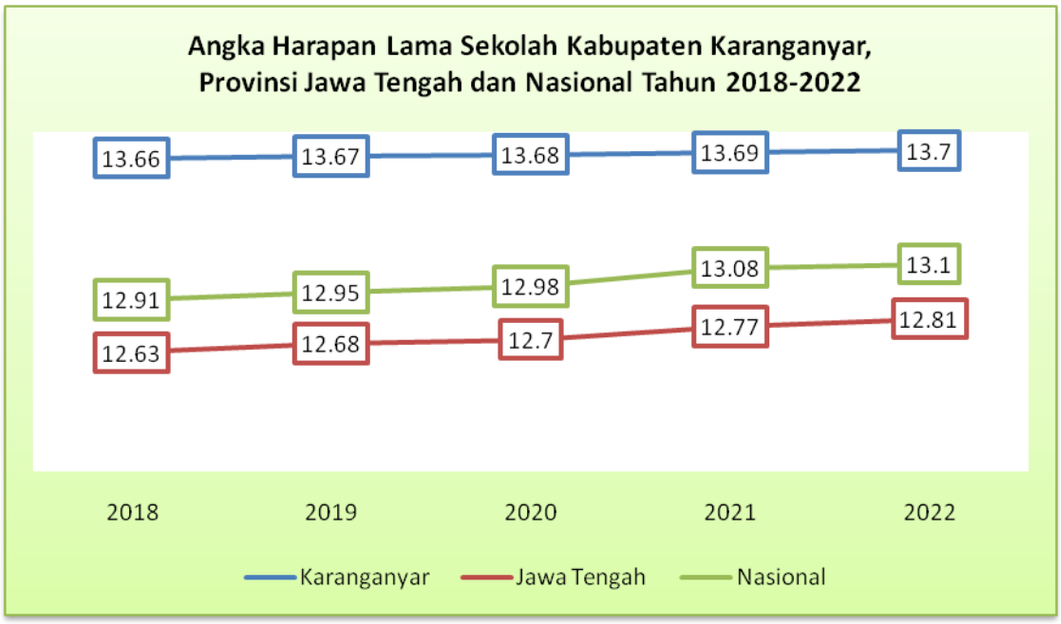

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2017- 2021 meningkat di Tahun 2017 dari 8,5 menjadi 8,57 pada Tahun 2021. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 berada di atas angka Jawa Tengah (7,75) dan Nasional (8,54), dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

.

Tabel 2.23
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Karanganyar	8,51	8,52	8,56	8,57	8,79
Jawa Tengah	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

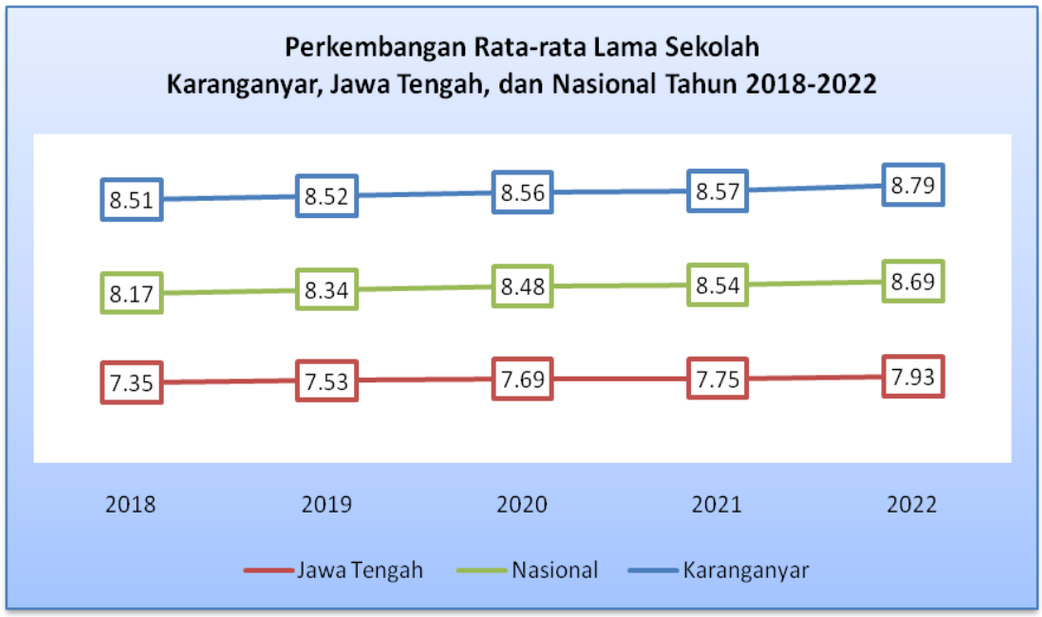

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.24
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.933.000,00 per tahun pada tahun 2017 menjadi Rp. 11.569.000,00 pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pandemi covid menjadi Rp. 11.428.000,00 dan kembali naik masa pemulihan ekonomi menjadi Rp. 11.509.000,00 per tahun di tahun 2021 dan Rp. 11.798.000 per tahun di tahun 2022. Pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.24
Pengeluaran per-Kapita Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Karanganyar	11.223	11.569	11.428	11.509	11.798
Jawa Tengah	10.777	10.102	10.930	11.034	11.377
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

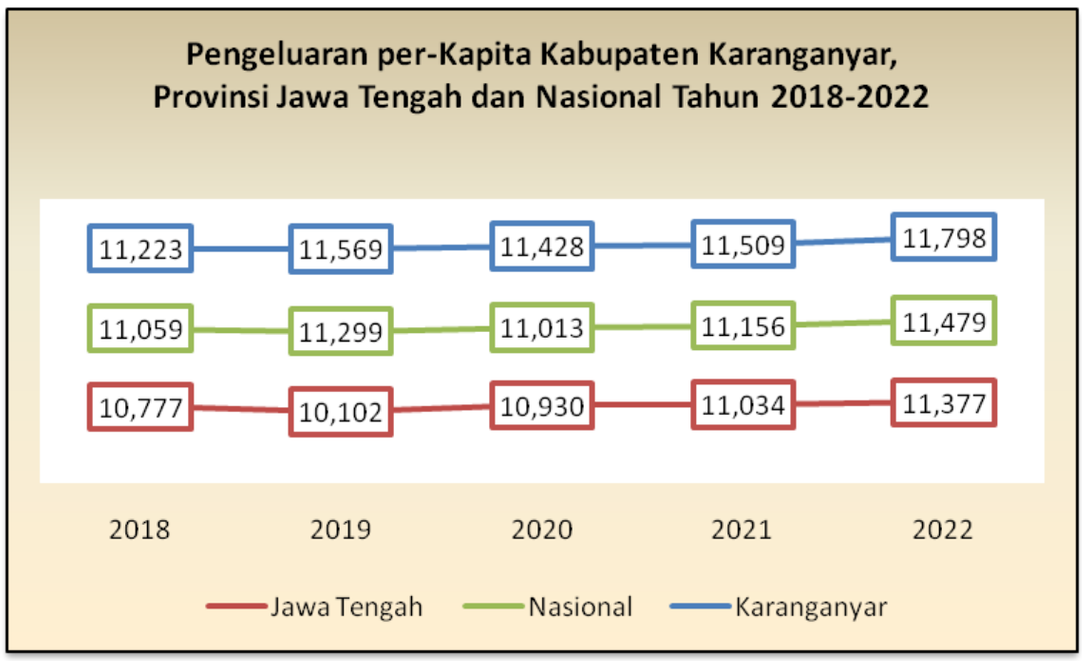

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Gambar 2.25
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

2.2.8. Fokus Sosial Budaya dan Pemuda

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 7 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan; 7) Sertifikasi dan Akreditasi.

Beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian indikator dalam RPJMD. Penyelenggaraan urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar berdasarkan 11 indikator penting dan sampai dengan tahun 2022 terdapat 9 indikator yang hasilnya telah mencapai 100%. Perincian dan kelengkapan data tentang penanganan permasalahan sosial, sebagai berikut **:**

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Na	Na	0,50	4,09	1,5
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00	100	100
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	Na	Na	100,00	100	100
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	124	113
8	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100
9	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100
10	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100
11	Prosentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar,
Tahun 2022 Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Persentase pelestarian seni dan budaya pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018-2020

sebesar 87,63% dan meningkat menjadi 91,10% pada tahun 2020. Persentase ragam budaya yang dikelola meningkat sebesar 1,0% pada kurun waktu 2018-2020, yaitu pada tahun 2018 sebesar 88,0% meningkat menjadi 89,0% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 82% di tahun 2021 karena masa pandemi covid.

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pelestarian senidan budaya	%	87,63	87,70	91,10	56	Na
2	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	88,00	89,00	89,00	82	Na

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2022

Capaian indikator Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dan Persentase cabang olahraga yang terbina dari tahun 2018-2020 capaian mengalami peningkatan yang sama yaitu pada tahun 2018 sebesar 17,0% meningkat menjadi 30,0% pada tahun 2020 dan menurun disebabkan pandemi covid menjadi 20% di tahun 2021. Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai mengalami fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2018-2020, tercatat pada tahun 2018 sebesar 20,00% meningkat menjadi 40,0% tahun 2019 kemudian turun menjadi 35,0% tahun 2020 dan 33% di tahun 2021.

Dengan adanya kondisi Pandemi COVID 19 yang terjadi di Tahun 2021, tidak banyak event keolahragaan yang diselenggarakan dan tidak ada peningkatan partisipasi pemuda, yang dalam hal ini adalah dalam berwirausaha, yang terjadi di tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	17,00	30,00	30,00	20	Na
2	Persentase cabang olahraga yang terbina	%	17,00	30,00	30,00	20	Na
3	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%	20,00	40,00	35,00	33	Na

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dari RPJMD Penetapan, terdapat perbedaan indikator yang akan digunakan, hal ini dikarenakan penggunaan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Beberapa indikator dikembalikan sesuai dengan kewenangan urusan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014. Apabila indikator tersebut di tahun 2020 tidak terisi maka indikator tersebut tidak lagi digunakan untuk kedepan dan diganti dengan indikator yang hanya terisi di tahun 2020.

Untuk menganalisis aspek pelayanan umum terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut periodisasi RPJMD yaitu tahun 2018-2023. Capaian kinerja RPJMD tersebut digambarkan dalam bentuk tabel sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 dan pasal 4 ditentukan 6 jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan 6) sosial, yang mulai berlaku pada Tahun 2019, maka terdapat beberapa SPM yang harus dilaksanakan oleh daerah, dan penulisannya, dinyatakan dalam bentuk narasi.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;

   Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 menunjukkan dari 7 indikator terdapat 1(satu) indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu indikator persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD mencapai 98,85%. Sedangkan 6 indikator yang lain capaiannya sudah optimal sebesar 100%. Untuk gambaran capaian indikator pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	Na	Na	98,36	98,85	98,85
2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Na	Na	100	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Na	Na	100	100	100
4	Persentase Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Na	Na	99,04	100	100
5	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	%	Na	Na	62	100	100
6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%	Na	Na	92,00	100	100
7	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	Na	Na	78	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2022

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2021 dan 2022 sudah mencapai 100%. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut :

1) Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
2) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah atau sedang belajar dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
3) Jumlah anak usia 7–18 tahun yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Terkait adanya Virus Covid-19 di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia membuat ruang gerak manusia terbatas, hal ini

berpengaruh juga terhadap pendidikaan, dimana siswa dari berbagai jenjang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, namun pada masa new normal mulai tahun 2022 pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan 100%, sehingga membawa dampak positif terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan menjadi 100%.

2. Kesehatan;

Capaian indikator kesehatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dari 25 indikator menunjukkan 10 indikator yang capainya sudah optimal sebesar 100% dan ada 15 indikator yang memerlukan perhatian untuk percepatan capaian agar memenuhi target yang direncanakan untuk tahun- tahun kedepannya. Untuk lebih jelasnya kondisi capaian indikator kesehatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama	%	100	100	100	100	100
2	Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
4	Persentase Desa STBM	%	5,31	31,86	100	100	100
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	%	30	30	30	100	100
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	87	99	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	85	87	100	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	75	81	100	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	91,55	97	100	96,46	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	30	36	100	97	100
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	75	89	100	100	100
16	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	45	60	100	100	100
17	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	78,16
19	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	%	30	30	30	90	100
20	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	%	30	30	30	75	100
21	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	%	30	30	30	100	100
22	Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan	%	100	100	100	100	100
23	Persentase TPM yang memenuhi syarat	%	72,91	69,88	64,21	100	100
24	Persentase Desa siaga Aktif	%	100	100	100	100	100
25	Persentase rumah tangga sehat	%	90	83,88	90	95,76	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2021 adalah sebesar 99,45%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Kesehatan di tahun 2022. Capaian indikator kinerja Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut :

1) Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
2) Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
3) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
4) Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
5) Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
6) Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
7) Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
8) Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
9) Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
10) Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
11) Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
12) Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes mellitus, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%

Tabel 2.30
Capaian Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan Target Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio Target	Persentase Capaian	Status
1	Dokter Spesialis	113	12,2	11	111	Tercapai
2	Dokter	324	35	45	78	Belum Tercapai
3	Dokter Gigi	53	5,7	13	44	Belum Tercapai
4	Keperawatan	1.127	121,7	180	68	Belum Tercapai
5	Kebidanan	754	81,4	120	68	Belum Tercapai
6	Perawat Gigi	20	2,2	18	12	Belum Tercapai
7	Apoteker	288	31,1	12	259	Tercapai
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	177	19,1	24	80	Belum Tercapai
9	Kesehatan Masyarakat	61	6,6	15	44	Belum Tercapai
10	Kesehatan Lingkungan	54	5,8	18	32	Belum Tercapai
11	Gizi	63	6,8	14	49	Belum Tercapai
12	Keterapian Fisik	93	10,0	5	201	Tercapai
13	Keteknisan Medik	177	19,1	16	119	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tiga belas jenis tenaga kesehatan hanya ada 4 (empat) jenis tenaga kesehatan yang sudah mencapai target kesediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, yaitu Dokter Spesialis, Apoteker, Keterapian Fisik dan Keteknisian Medik.

Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 65 per 100.000 KH, angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 98,60 per
100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan preeklamsi serta infeksi kehamilan/sepsis. Untuk Tahun

2020 dan Tahun 2021 kematian ibu juga disebabkan oleh covid-19. Tahun 2022 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, yaitu menjadi 52,07. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2018	42,01	78,60
2019	49,20	76,93
2020	65,00	98,60
2021	164,89	199
2022	52,07	100,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, dimana AKB pada tahun 2020 sebesar 8,40 per 1.000 KH, dan tahun 2021 menurun sebesar 8,33 per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 berada di atas Provinsi Jawa Tengah yaitu 8,10 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspeksi serta penyakit kongenital. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. Pada Tahun 2022 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karanganyar dapat diturunkan secara signifikan yaitu 7,20 per 1.000 KH. Angka kematian Bayi di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 berada di bawah Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah yaitu 8,37 per 1.000 KH. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2018	8,15	8,36
2019	8,36	8,24
2020	8,40	8,10
2021	8,33	7,87
2022	7,20	8,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Angka Kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan berobat.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelainan kongenital. AKABA di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan cenderung meningkat. Namun demikian capaiannya masih lebih baik dari AKABA Provinsi Jateng, walaupun demikian kita perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sebab seberapapun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan.

Tabel 2.33
Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2018	0,25	9,48
2019	0,31	9,63
2020	1,23	8,99
2021	2,58	8,95
2022	1,56	9,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di Kabupaten Karanganyar prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan peningkatan kewaspadaan. Namun demikian, prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang ditetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi (%)	0,030	0,030	0,02	0,02	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Penyakit Menular

Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Kondisi Penyakit Menular Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Angka Penemuan kasus TB Paru (%)	100	75	48	40	79
2. Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	0,001	0,001	0,001	0,008	0,001
3. Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	8,52	9,25	31,1	53,1	91
4. Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk)	1	0,002	1	0	0,002

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2022

Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kabupaten Karanganyar tahun 2018- 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,001. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami peningkatan, sehingga harus diwaspadai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan TB dan DBD merefleksikan kebiasaan perilaku sehat di masyarakat perlu menjadi perhatian lebih.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Infrastruktur jalan di setiap daerah merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketersediaan jalan yang baik akan membuat suatu wilayah cepat berkembang karena memiliki akses yang baik dan terhubung. Manfaat langsung dari pembangunan jalan dan Jembatan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan membuat pemerintah untuk menyediakan jalan dan jembatan dalam kondisi baik, termasuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator pembangunan jalan dan irigasi yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami penurunan sebesar 1,88% dari 82,12% di tahun 2021 menjadi 80,24% di tahun 2022. Sebagian masyarakat di Kabupaten Karanganyar merupakan petani, sehingga irigasi menjadi hal yang sangat penting. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat 2,37%, dari 69 % di tahun 2021 menjadi 71,37% pada tahun 2022. Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi selengkapnya

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	Na	Na	88,58	82,12	80,24
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66,00	67,00	87,26	69,00	71,37

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan).

Akses masyarakat pedesaan terhadap air minum dan sanitasi layak sampai dengan tahun 2022 sebesar 96% mendekati optimal di tahun 2022. Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	66	67	87,26	69	71,37
2	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum	%	76	80	80	94,4	96
3	Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani dibanding seharusnya)	%	Na	Na	95	95	95
4	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan IPAL	%	Na	Na	95	100	99,38
5	Persentase saluran dalam kondisi baik	%	Na	Na	70	0	71
6	Laju perkembangan luasan permukiman	%	Na	Na	60	62	69
7	Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan	%	Na	80	50	51	52
8	Persentase penurunan lingkungan tidak sehat	%	Na	Na	65	65	65
9	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	Na	Na	86	82,12	80,24
10	Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	%	Na	Na	81	81	82
11	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	Na	Na	81	77	82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2022 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2022. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Persentase penanganan lingkungan pemukiman kumuh; 2) Rasio tempat pemakaman umum; 3) Persentase meningkatnya lingkungan sehat.

Penanganan lingkungan pemukiman kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk capaian sampai dengan tahun 2019 menggunakan SK Kumuh Tahun 2015 dengan capaian 100% tuntas. Mulai tahun 2020 penanganan kumuh menggunakan SK Kumuh 2020 dengan total luasan kumuh sebesar 107,24 Ha. Capaiannya persentase pengurangan permukiman kumuh dengan menggunakan SK Kumuh 2020, pada tahun 2020

sebesar 0,52%, Tahun 2021 meningkat menjadi 19,76% dan tahun 2022 naik lagi menjadi 50%. Capaian indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan indikator antara lain rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk mulai ada/dihitung pada tahun 2020 dengan pencapaian rasio 0,3, capaian meningkat menjadi 0,95 di tahun 2021 dan turun menjadi 0,38 di tahun 2022. Capaian persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah yang merupan capaian target MCP KPK meningkat dari tahun 2019-2021 dari 37% naik 40%, naik lagi 57% di Tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 44% . Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	rasio	0	0	0,3	0,95	0,38
2	Persentase peningkatan penataan permukiman	%	0	0	70	74	74
3	Persentase pengurangan permukiman kumuh	%	Na	100	0,52	19,76	50
4	Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)	%	0	37	40	57	44

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Dalam rangka pengamanan dan pencegahan penyalahgunaan aset, salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah dengan pensertifikatan aset Pemerintah Daerah, dimana salah satunya adalah pensertifikatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan. Proses persertifikatan PSU Perumahan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 telah mencapai 1.124 sertifikat atau 107,56% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 1.045 sertifikat. Adapun untuk kebutuhan rumah (*backlog*) di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 tercatat sebanyak 45.411 rumah.

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2022 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2020. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
2) Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (KKUPM);

Penyelenggaraan urusan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat diselenggarakan oleh tiga perangkat daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan Satpol Pamong Praja). Capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 mengalami perubahan indikator menjadi 4 indikator. Terdapat 4 indikator telah dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya telah mencapai sebesar 100%. Sedangkan 1 indikator dengan capaian masih rendah (nol %) yaitu : persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana . Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Tahun 2022 mendapatkan nilai 0,79. Dari hasil capaian kinerja, diketahui pula pada tahun 2022 57,14% cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dengan 10,17% penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan jumlah indikator dari Satpol PP sebanyak 4 indikator diketahui sebanyak 2 indikator terlaksana dengan baik yaitu Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan dan cakupan warga negara yang mendapatkan pelayanan penegakan Perda telah mencapai sebesar 100%. Sedangkan rasio anggota Linmas terhadap jumlah pendudukmenurun menjadi 0,67 di tahun 2022, hal ini perlu mendapatkan perhatian. Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	BPBD						
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana	indek	0	0	0,75	0,75	0,79
2	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	0	0	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	0	4,5	6,17	10,17
4	Persentsae Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	0	0	100	100	100
5	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	0	0	25	20	20
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	0	100	100	100
	SATPOL PP						
7	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	%	100,00	100,00	100	100	100
8	Rasio linmas terhadap jumlah penduduk	%	0,68	0,68	0,68	0,65	0,67
9	Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda	%	80,00	81,00	100	100	100

Sumber : BPBD dan SATPOL PP Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2022 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2022. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
4) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
5) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

6. Sosial.

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 7 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan; 7) Sertifikasi dan Akreditasi.

Beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian indikator dalam RPJMD.

Penyelenggaraan urusan Sosial dalam perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 mengalami perubahan penambahan 1 indikator sehingga menjadi 11 indikator penting dan sampai dengan tahun 2022 terdapat 10 indikator yang hasilnya telah mencapai 100% dan 1 indikator yang masih memerlukan perhatian yaitu persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,5%. Perincian dan kelengkapan data tentang penanganan permasalahan sosial, sebagai berikut :

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Na	Na	0,50	4,09	1,5
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00	100	100
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	Na	Na	100,00	100	100
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	100	100
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Na	Na	100,00	124	113
8	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	Na	Na	100,00	0	100
9	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100
10	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	Na	Na	100,00	Na	100
11	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Na	Na	Na	Na	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar,
Tahun 2022 Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2022 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Sosial di tahun 2022. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadaJumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
2) Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
3) Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
4) Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
5) Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan penyandang PMKS dan pemberian jaminan sosial belum optimal karena baru dalam tahap sosialisasi pada tanggal 24 Juni 2021. Meskipun sebenarnya layanan tersebut sudah berjalan, hanya saja baru dibentuk sistemnya. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selama ini telah terjun ke masyarakat akan menjadi supervisor untuk menampung keluhan masyarakat di tingkat Kecamatan. Di setiap desa ada satu fasilitator yang akan menampung aduan dari masyarakat yang dinamakan Petugas Mandiri Kemiskinan (PMK). Dari desa akan melaporkan ke tingkat kecamatan, untuk selanjutnya dari kecamatan yang akan mengecek aduan dari masyarakat

untuk kemudian meneruskannya ke manager yang berada tingkat kabupaten.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Capaian urusan tenaga kerja Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan indikator mulai tahun 2020 menunjukkan bahwa Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja mencapai 60%, tahun 2021 tidak dilaksanakan program tersebut karena masa pandemi covid sehingga capaiannya 0%, tahun 2022 meningkat menjadi 65%. Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih meningkat terus dari tahun 2020-2022 sebesar 25%, 25,3% dan 27% di tahun 2022. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan mencapai 60,28% pada kondisi awal tahun 2020, kemudian turun menjadi 55,64% di tahun 2021 karena masa pandemi covid dan naik kembali pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 sebesar 56%, sedangkan capaian persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan dari tahun 2020-2022 capaiannya dapat optimal yaitu100%.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacuke rencana tenaga kerja	%	Na	Na	60	0	65
2.	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	%	Na	Na	25	25,3	27
3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	Na	Na	60,28	55,64	70,85
4.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	Na	Na	100	100	100
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,28	3,15	5,96	5,89	5,7
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24	70,45	73,55	73,15	70,70

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2022

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karanganyar yang ditandai dengan meningkatnya tingkat

pengangguran terbuka meningkat terus sampai tahun 2020 sebesar 5,96%, hal tersebut tidak terlepas sebagai dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Adanya Pandemi COVID-19 tersebut memberikan pukulan yang sangat keras kepada dunia usaha. Berbagai kebijakan guna menekan penyebaran virus COVID-19, diantaranya *Physical distancing*, *social distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan masalah tersendiri bagi dunia usaha. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan efisiensi dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Efisiensi tersebut bisa berupa efisiensi waktu (dengan pengurangan jam kerja) ataupun efisiensi sumber daya perusahaan, diantaranya dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Hal tersebut lah yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 memasuki masa new normal dan pemulihan ekonomi capaian menurun menjadi 5,89 di tahun 2021 dan menurun lagi menjadi 5,7% di tahun 2022.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenaga kerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. TPAK Kabupaten Karanganyar di tahun 2022 sebesar 70,70, yang artinya 70,70 persen dari penduduk berumur sepuluh tahun ke atas yang aktif di pasar tenaga kerja (angkatan kerja). TPAK itu sendiri merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang da jasa dalam suatu perekonomian.

Dalam menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja selama ini dilaksanakan oleh

DISDAGNAKERKOPUKM dengan program BLC (*Boarding Learning* Center) yang bertempat di Balai Latihan Kerja Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualitas seperti yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Indikator capaian dari urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Karanganyar mulai tahun 2020 mengalami perubahan dari 2 menjadi 6 indikator capaian. Penjelasan terkait 6 indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terangkum dalam tabel sebagi berikut :

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	Lembaga	Na	Na	50	30	40
2	Persentase kasus kekerasan perempuan	%	Na	Na	0,005	0,004	0,0046
3	Persentase Angka Perceraian	%	Na	Na	14,24	0,525	0,535
4	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	%	Na	Na	Na	Na	10
5	Prosentase desa layak anak	%	Na	Na	5	2	2
6	Prosentase kasus kekerasan anak	%	Na	Na	0,01	0,0075	0,0079

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, 2022

Disamping berdasarkan 6 indikator tersebut, kinerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari beberapa capaian data tahun 2022 berikut ini :

1) Persentase Perempuan Bekerja di Pemerintahan sebanyak 8.912 orang PNS, terdiri dari 3.516 laki-laki dan 5.395 perempuan atau sebesar 60,55%.
2) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD dari 45 orang terdapat 8 perempuan atau sebesar 20% (kurang dari 30%)

Berkenaan dengan perlindungan anak telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. Dengan adanya dua

peraturan tersebut sampai saat ini kasus terkait anan tidak terjadi (tidak ada data/peristiwa yang terjadi)

3. Pangan;

Capaian indikator urusan pangan Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2022 terdiri dari 8 indikator. Penjelasan terkait 8 indikator kinerja urusan pangan terangkum dalam tabel sebagi berikut :

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	Na	441.069	219.760	507.343	548.427
2.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	472.841	473.937	474.870	474.466	514.868
3.	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	Kw/Ha	65,08	60,44	60,44	61	62,20
4.	Produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	8,15	10,19	10,19	13,36	18,7
5.	Produktivitas Pertanian Perkebunan	Ton/Ha	0,58	0,61	0,61	0,73	0,72
6.	Produksi daging	Kg	7.721.978	8.065.887	7.772.525	8.142.810	8.738.693
7.	Produksi telur	Kg	22.913.394	23.269.510	22.762.730	21.669.692	20.613.510
8.	Produksi susu	Liter	288.764	266.826	221.256	212.198	199.304
9.	Skor PPH	Skor	82,9	80.1	85,7	83,2	89,2
10	Angka Konsumsi Energi	kkal/ kapita/ tahun	1.889	1.802	1.802	1.992	1.871,2

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator Urusan Pangan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2022, adalah persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) yaitu sebesar 105,89% untuk padi dan 100,03% untuk jagung.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahan

pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangan jenis pangan lokal.

4. Pertanahan;

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) Izin membuka tanah dan

6) penggunaan tanah. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2020 capaian kinerja urusan Pertanahan diukur berdasarkan 1 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : Cakupan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah dengan capaian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 100 %.

Tabel 2.44
Ringkasan Status Kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Tanah yang Telah Bersertifikat	Tanah yang Belum Bersertifikat
1	Sekretariat Daerah	26	10
2	Sekretariat DPRD	1	-
3	Inspektorat Daerah	1	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1	-
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	-
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65	30
7	Dinas Kesehatan	25	4
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	503	788
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	-

No	Perangkat Daerah	Tanah yang Telah Bersertifikat	Tanah yang Belum Bersertifikat
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	-
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15	4
13	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	48	6
14	Dinas Lingkungan Hidup	6	3
15	Dinas Perhubungan	9	-
16	Dins Pertanian, Pangan dan Perikanan	26	5
17	Dinas Pemberdayaan Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu	1	1
18	Dinas Sosial	2	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	-
20	Badan Keuangan Daerah	11	1
21	Badan Keuangan Daerah (pengelola)	6	3
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	-
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	-
24	Kecamatan Jatipuro	2	-
25	Kecamatan Jatiyoso	1	1
26	Kecamatan Jumantono	1	-
27	Kecamatan Jumapolo	1	-
28	Kecamatan Matesih	2	-
29	Kecamatan Tawangmangu	59	21
30	Kecamatan Ngargoyoso	1	1
31	Kecamatan Karangpandan	1	-
32	Kecamatan Karanganyar	427	169
33	Kecamatan Tasikmadu	1	-
34	Kecamatan Jaten	1	-
35	Kecamatan Colomadu	1	-
36	Kecamatan Gondangrejo	1	-
37	Kecamatan Mojogedang	1	-
38	Kecamatan Kebakkramat	1	-
39	Kecamatan Kerjo	1	-
40	Kecamatan Jenawi	-	1
Grand Total		**1254**	**1045**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, 2021

Dari 2.299 aset Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 baru 1.254 tanah yang bersertifikat. Dengan belum adanya sertifikat dapat menyebabkan timbulnya sengketa lahan. Hingga bulan Desember tahun 2022, dari 1.045 tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat di tahun 2022, sebanyak 143 tanah sudah bersertifikat, jadi total tanah yang telah bersertifikat hingga Desember 2022 sebesar 1.397 aset tanah. Kekurangan akan diselesaikan sampai tahun 2026 melalui kerjasama dan koordinasi dengan BPN Kabupaten Karanganyar.

5. Lingkungan Hidup;

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 9 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun; 2) Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu; 3) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH); 4) Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan; 5) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; 6) Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH; 7) Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional; 8) Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup; 9) Persentase jumlah sampah yang tertangani.

Capaian 2 indikator yaitu Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun (indikator 1) dan Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup (indikator 8) telah mencapai 100%. Capaian persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 62% di

tahun 2018 menjadi 75% di tahun 2022, demikian juga Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 32,44 % di tahun 2008 menjadi 75% di tahun 2022. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut yang diwujudkan melalui program pemerintah daerah oleh dinas terkait mulai tahun 2022.

Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD 2018-2023 dengan capaian meningkat dari 20% di tahun 2021 menjadi 60% di tahun 2022. Tingkat ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan-undangan di Kabupaten Karanganyar belum optimal, dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 73 % mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 80%. Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH dan Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional dari tahun 2020-2022 tetap, dengan masing- masing capaian sebesar 75% dan 70%. Capaian indikator sampah yang tertangani selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari 76 % di tahun 2021 menjadi 74 % di tahun 2022. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	%	Na	Na	100	100	100
2	Persentase hasilpemantauan kualitas lingkungan (air,udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	62	65	70	75	75,00
3	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	32,44	35	75	75	75
4	Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan	%	Na	Na	Na	20	60,00
5	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	Na	Na	80	80	73,00

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
6	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	%	Na	Na	75	75	75
7	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	%	Na	Na	70	70	70
8	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	Na	Na	100	100	100
9	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	47	60	55	76	74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator bidang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2022, adalah :

1) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota : 74%
2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 73 %

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pemerintah daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu:

a. Pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk.
b. Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil.
c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan:
   1) Pengumpulan data kependudukan.
   2) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
d. Profil Kependudukan, dengan kewenanga Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hal asasi penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara

hukum. Berlakunya UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Perubahan UU No 23 Tahun 2006 menjadi UU No 24 Tahun 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Cakupan penerbitan KTP el di Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah berada di atas 90%, yaitu dari 97,25% pada tahun 2018 menjadi sebesar 98,45% pada tahun 2022. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar perlu memberikan pelayanan jemput bola dalam, menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di dalam maupun luar lingkungan sekolah, termasuk memberikan pelayanan jemput bola kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Substansi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sedangkan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometric), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang

tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan.

Strategi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan pemutakhiran dan peningkatan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas informasi kependudukan. Strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta dapat mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : ketersediaan data penduduk yang akurat dan selalu diperbaharui, data persebaran penduduk, inovasi pelayanan, penggunaan teknologi informasi, SDM dan sarana pendukung pelayanan adminduk termasuk diantaranya ruang pelayanannya.

Dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu segera mungkin untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran anak sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran sangat penting agar anak memperoleh pelayanan publik dari pemerintah maupun non- pemerintah ke depannya. Pencatatan Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten/Kota.

Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) sejak tahun 2018 sebesar 90,10% di atas 85% (target Nasional), dan tahun 2022 meningkat sebesar 98,1%.

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian. Persentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi meningkat setiap tahunnya dan mencapai tingkat optimal sebesar 100%.

Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP, KIA)	Na	Na	Na	77,21	88,50	86,28
	Cakupan Penerbitan Kartu Ke luarga	%	95,00	96,00	100,00	100	100
	Cakupan Penerbitan KTP El	%	97,25	99,11	99,87	99,36	98,45
	Cakupan Penerbitan KIA	%	13,30	23,07	31,75	66,13	60,4
2	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	%	90,10	92,38	93,82	99,08	98,1
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	38,50	69,40	100,00	100	100
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	90,10	92,38	93,82	96,33	100
	Cakupan penerbitan akte Perkawinan	%	Na	Na	100	100	100
	Cakupan penerbitan akte perceraian	%	Na	Na	100	100	100
3	Prosentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi	%	87,00	87,50	100,00	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 2022

Dari tabel di atas, cakupan kepemilikian dokumen kependudukan secara keseluruhan dari 7 indikator (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan KTP EL, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akte Kematian, Cakupan Penerbitan Akte perkawinan, Penerbitan Akte perceraian) Rata-rata dari ketujuh indikator tersebut 99,05%. Dokumen Kependudukan yang belum sepenuhnya mencakup seluruh penduduk

adalah, Kepemilikan KTP Elektronik baru mencapai 98,45% dari seluruh wajib KTP. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru mencapai 60,4%. Sosialisasi dan pelayanan sudah dilaksanakan secara berkelanjutan terus menerus untuk mencapai cakupan 100%, namun selain keterbatasan sumber daya masyarakat, masyarakat sendiri juga ada yang mengurus dokumen adminduk kalau sudah diperlukan bukan karena kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Rincian urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertambah 1 sub urusan sehingga menjadi 5 sub urusan yaitu 1) Penataan Desa; 2) peningkatan Kerjasama Desa; 3) Kerja Sama Desa; 4) Administrasi Pemerintahan Desa; dan 5) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Pentingnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah wadah partisipasi masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. LPMD/LPMK mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan swadaya serta gotong royong masyarakat. Capaian indikator kineja untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	0	0	100	100	100
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	Na	Na	63	85	95

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	100	100	100	100
4	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	%	Na	100	100	100	100
5	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	%	Na	60	60	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2022 Keterangan :
Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Kecilnya nilai tingkat pembentukan kawasan perdesaan di tahun 2022 dikarenakan proses pelaksanaan terkendala pandemi covid dan belum ada usulan pembentukan usulan kawasan baru.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa, dengan mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi Pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik Wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

a. Desa Sangat Tertinggal : IDM$\leq$0,491
b. Desa Tertinggal : 0,491<IDM$\leq$0,599
c. Desa Berkembang : 0,599<IDM$\leq$0,707
d. Desa Maju : 0,707<IDM$\leq$0,815

e. Desa Mandiri : IDM>0,815

Berdasarkan skor tersebut, setidaknya ada tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan, yaitu mulai dari Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika salah satu skor indikator bergeser turun, makan bisa berakibat menurunnya status desa, misalkan dari Desa Berkembang menjadi Desa Tertinggal. Adapun faktor kerentanan itu misalnya terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam dan konflik sosial berkepanjangan.

Tabel 2.48
Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6416	0,6869	0,6919	0,6937	0,7078
	a. Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,6450	0,7899	0,8019	0,8056	0,8228
	b. Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,5950	0,6319	0,6423	0,6388	0,6648
	c. Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0,6850	0,6389	0,6317	0,6366	0,6358

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2022

Berdasarkan hasil IDM Kabupaten Karanganyar terlihat bahwa desa-desa di Kabupaten Karanganyar dalam status Desa Maju dengan nilai capaian Indek Desa Membangun tahun 2022 sebesar 0,7078, namun faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tetapi juga bisa naik menjadi Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Mandiri, sebuah Desa Maju harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa serta kewirausahaan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi memadukan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan pengendalian penduduk. Selain itu juga mengatur kelahiran melalui pengendalian TFR (Total Fertility Rate). TFR adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas saat TFR dihitung (Kasto, 1995). TFR Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 adalah 2,09 artinya rata rata perempuan

di Jawa Tengah memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran supaya menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang pada anak.

Capaian indikator urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tahun 2022 menunjukkan kondisi yang baik walaupun ada indikator yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) yaitu capaian indikator Prosentase KB MKJP dari 37,05% menjadi 32,22% di tahun 2022. Faktor penyebab turunnya capaian persentase KB MKJP yaitu adanya data PA (Peserta Aktif) yang di-DO (Drop Out) dan beberapa PA (Peserta Aktif) yang beralih ke metode pil. Capaian angka pemakaian kontrasepsi/ CPR juga mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 75,15% menjadi 71,57%. Penyebab turunnya Capaian angka pemakaian kontrasepsi/ CPR yaitu banyaknya pasangan yang memasuki usia menopause dan pasangan yang menginginkan anak segera (IAS) bertambah.

Selengkapnya capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio KB	Rasio	Na	Na	Na	8:1	11,04:01
2	Persentase KB MKJP	%	81,70	78,77	32	37,05	32,22
3	Prosentase tribina aktif	%	25,93	26,33	88	95,17	95,27
4	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	%	81,70	78,77	74,94	75,15	71,57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, 2022

Pencapaian indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2022, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1) TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,22
2) Unmeetned sebesar 14,34%

9. Perhubungan;

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 capaian kinerja urusan Perhubungan diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar: 2) Persentase pemasangan rambu-rambu; 3) Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten); 4) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik; 5) Jumlah orang melalui terminal per tahun; 6) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum; dan 7) Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang.

Untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan di Kabupaten Karanganyar, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemasangan rambu-rambu, capaiannya tahun 2022 sebesar 60 %, meningkat jika dibangdingkan tahun sebelumnya dengan capaian di tahun 2020 sebesar 48,15%. Peningkatan terminal tipe c sesuai standar, pelan tapi pasti menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir dari 20 % menjadi 40 %.

Terkait adanya Virus Covid-19 di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia membuat ruang gerak manusia terbatas, hal ini berpengaruh juga terhadap transportasi seperti jumlah orang melalui terminal per tahun mengalami penurunan drastis di tahun 2022. Dari 3.502.804 di tahun 2019 menjadi hanya 233.990 orang di tahun 2020. Selengkapnya capain kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	50,00	50,00	71,90	68,93	70
2	Persentase terminal kondisi baik	%	10	20	20	30	47,29
3	Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	125	103,3	105,12	105,02	100,57

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2022

Pencapaian indikator bidang Perhubungan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2022, adalah :

1) Rasio konektivitas kabupaten / kota : 67
2) Kinerja lalu lintas kabupaten / kota : 0,80

Pada saat ini ada 14 trayek yang terlayani di Kabupaten Karanganyar. Kebutuhan pelayanan trayek yang ada di Kabupaten Karanganyar sejumlah 21 trayek. Ada 7 trayek sesuai kebutuhan yang belum terlayani. Trayek tersebut merupakan trayek-trayek yang ada di pedesaan. Berkurangnya angkudes yang beroperasi menyebabkan banyak masyarakat yang memilih beralih pada mode transportasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Karanganyar semakin hari semakin mengalami penurunan. Minimnya jumlah penumpang menjadi penyebab terus berkurangnya angkutan yang beroperasi. Minimnya jumlah angkutan yang beroperasi disebabkan karena masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan umum jenis bus beroperasi pada pagi saat anak-anak sekolah dan para pekerja berangkat serta pulang.

Di Tahun 2022, jumlah titik parkir di Kabupaten Karanganyar terdiri dari 71 titik di Zona A dan 162 titik di Zona B. Wilayah (Zona) A meliputi :

- Seputaran Taman pancasila
- Depan SDN 1 Karanganyar sampai dengan Buk Siwaluh
- Selatan Taman Pancasila sampai SMK Wikarya
- Taman Pancasila sampai dengan Terminal Jungke
- Seputar Pasar Jungke
- Seputar Alun-Alun Karanganyar
- Sepanjang Jalur Car Free Day pada Hari Minggu
- Lingkungan Pasar Karangpandan
- Wilayah Kecamatan Tawangmangu
- Seputaran Desa Ngringo
- Kecamatan Colomadu

Wilayah (Zona) B, meliputi :

- Kecamatan Karanganyar, kecuali yang termasuk Zona A
- Kecamatan Karangpandan, kecuali yang termasuk Zona A
- Kecamatan Tasikmadu

- Kecamatan Mojogedang
- Kecamatan Kerjo
- Kecamatan Gondangrejo
- Kecamatan Jaten, kecuali Desa Ngringo
- Kecamatan Jatipuro
- Kecamatan Kebakkramat
- Kecamatan Ngargoyoso
- Kecamatan Matesih
- Kecamatan Jumapolo
- Kecamatan Jumantono
- Kecamatan Jatiyoso
- Kecamatan Jenawi

Pengaturan parkir yang dilaksanakan sesuai wewenang Dinas Perhubungan hanya parkir tepi jalan umum dan parkir khusus dalam terminal yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Terdapat juga dua titik black spot/DRK, yaitu Ruas Jalan Tunggul, Jantiharjo, Karanganyar dan Simpang 4 Gayamdompo, Karanganyar. Volume ratio Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebesar 0,80 dengan jam sibuk 16.00-17.00. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) pada tahun 2022 sebanyak 5.774 unit dengan kendaraan yang sudah lulus uji sebanyak 11.809 unit.

Di Kabupaten Karanganyar terdapat 33 perlintasan Kereta Api, yang terdiri dari :

- Perlintasan Kereta Api Palur sampai dengan Grompol (Wilayah Jaten dan Kebakkramat), terdapat 19 perlintasan yang terdiri dari : 9 perlintasan berpalang dan 10 perlintasan tidak berpalang
- Perlintasan Kereta Api Wilayah Gondangrejo, terdapat 14 perlintasan yang terdiri dari : 1 perlintasan berpalang dan 13 perlintasan tidak berpalang

10. Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi Publik serta 2) Aplikasi Informatika. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1)

Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP); 2) Persentase KIM aktif; 3) Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab; 4) Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik; 5) Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi.

Tujuan pembangunan website Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintahan daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet. Website merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pembangunan website pemerintah yang terintegrasi dan selalu update merupakan hal yang sangat penting. Capaian website Perangkat Daerah yang terupdate di Kabupaten Karanganyar sebesar selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, dari 61,90 % di tahun 2018 menjadi 78,57 % pada tahun 2020, dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 97,43 %. Peningkatan tersebut sejalan dengan capaian indikator Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab, meningkat dari 55 % di tahun 2018 menjadi optimal sebesar 100% di tahun 2022.

Indikator capaian KIM aktif menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 108,29 menjadi 86,4% di tahun 2022 dan capaian prosentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik juga menurun dari 100% optimal di tahun 2021 menjadi 40% di tahun 2022, demikian juga untuk capaian indikator Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi dari optimal sebesar 102,5% di tahun 2021 menjadi 25% di tahun 2025 . Ketiga indikator tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk percepatan pencapaiannya di tahun mendatang. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)	%	61,90	73,81	78,57	99,6	100
2	Persentase KIM aktif	%	35,29	59,00	60,86	108,29	83,3
3	Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [(jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x100 %]	%	55,00	54,55	62	108,33	100
4	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	40,00	50,00	55	100	63
5	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	25,00	30,00	35	102,5	25

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2022

Terkait website dan media sosial yang di kelola oleh masing- masing OPD memang belum optimal dikarenakan belum tingginya kesadaran semua pihak untuk memanfaatkan kana-kanal atau media-media tersebut. Hal ini dibuktikan masih kurangnya update data atau berita yang ditanyangkan atau disampaikan oleh masing-masing OPD. Perlu adanya pemantauan dan dorongan pada admin website dan media sosial perangkat daerah untuk senantiasa mengupdate atau memperbarui informasi atau data-data yang seharunya dipublikasikan. Terlalu banyaknya kanal yang harus dikelola oleh admin pemerintah Kabupaten serta adanya perangkat daerah yang tidak mencantumkan nomor kontak aduan mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan opini, aspirasi dan aduan masyarakat. Terjadinya penumpukan aduan pada nomor kontak kabupaten menyebabkan jumlah aduan yang terjawab belum maksimal. Kepatuhan kepada pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal disebabkan sampai saat ini belum adanya Arsitektur SPBE Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan SPBE di daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM, yaitu : Pertama, Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perizinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT sampai dengan tahun 2022 sebesar 39 %, Persentase koperasi aktif sebesar 24 % di tahun 2022; prosentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) sebesar 1 % di tahun 2022 meningkat dari 0,97% di tahun 2021. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase unit usaha simpan pinjam yang baru	Na	Na	Na	11	6,72	16
2	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	18	47	39	49	49
3	Persentase Koperasi aktif	%	Na	Na	22	23	24
4	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yangsudah mengikuti Diklat	orang	Na	Na	475	300	500
5	% koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan	%	Na	Na	60	81	90
6	Persentase pertumbuhan usaha UMKM baru	%	Na	Na	5	4,9	4,9
7	Persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)	%	Na	Na	1,1	0,97	1,0

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KabupatenKaranganyar, 2022

Semenjak Covid-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestik dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dampak tersebut diantaranya karena :

a. Dampak omzet penjualan

   Terjadinya penurunan omzet penjualan akibat dari turunnya pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat.

b. Dampak pada permodalan

   Terjadinya Pandemi Covid 19 juga berpotensi menyebabkan gulung tikarnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kesulitan mendapatkan modal kembali akibat adanya Pandemi tersebut. Hal tersebut muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: a) tutup karena tidak bisa mendistribusikan produk barang atau jasa, dan b) tutup karena alasan mematuhi perintah PSBB.

c. Dampak pada distribusi

   Akibat adanya kebijakan PSBB berimbas pada kesulitan distribusi oleh pelaku UMKM. Baik distribusi produk yang dihasilkan ataupun kesulitan distribusi untuk mendapatkan bahan bakunya.

12. Penanaman Modal;

Urusan kewenangan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari 4 sub urusan menjadi 5 sub urusan meliputi (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Promosi Penanaman Modal; (3); Pelayanan Penanaman Modal; (4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Capaian kineja urusan penanaman modal diukur dengan Persentase Peningkatan jumlah investor, Peningkatan nilai investasi, jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan, Jumlah pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan, persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru dan Persentase peningkatan jumlah investor. Capaian dari indikator tersebut yang mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu nilai investasi di tahun 2020 menjadi 3,033 triliun rupiah dari semula 12,3 triliun di tahun 2019, meningkat di tahun 2021 menjadi 3,217 trilyun dan 4,091 trilyun di tahun 2022. Penurunan terjadi di jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan, dari 570 di tahun 2021 menjadi 525 buah di tahun 2022. Dengan adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan pemulihan pasca pandemi, menyebabkan investasi yang masuk juga sangat terbatas. Sehingga pemilihan investasi yang masuk juga kurang optimal. Dimana investasi yang masuk tergantung dari kepentingan penanam modal investasi.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan nilai investasi	Rp (Triliun)	17,2	12,3	3,033	3,217	4,091
2	Prosentasi peningkatan jumlah investor	%	9,00	10,00	11,00	38,00	13,00
3	Jumlah penambahan pelayanan perizinan yang di keluarkan	buah	823	517	437	570	525
4	Prosentase Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	%	30	30	30	62	68
5	% ketersediaan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2022

13. Kepemudaan dan Olahraga;

Urusan kepemudaan dan olahraga sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1) Sub Urusan Kepemudaan, Kewenangan Kabupaten meliputi
   a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota.
   b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota
2) Sub urusan keolahragaan, Kewenangan Kabupaten meliputi
   a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
   b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota
   c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi
   d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota
   e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
3) Sub urusan kepramukaan, kewenangan Kabupaten adalah pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintah urusan Kepemudaan dan Olah raga di Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan indikator pada Perubahan RPJMD 2018-2023 meliputi 3 indikator program (*outcome*) yang terdiri dari 1) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda; 2) Persentase meningkatnya prestasi olahraga; dan 3) Persentase lembaga kepramukaan (Kwarcab, Gugus) yang aktif.

Capaian indikator Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dari tahun 2018-2022 capaian mengalami peningkatan dari 20,0% pada tahun 2021 sebesar 40,0% di tahun 2022. Persentase meningkatnya prestasi olahraga mengalami peningkatan dari 15% di tahun 2020 menjadi 33% di tahun 2021, sedangkan Persentase lembaga kepramukaan (Kwarcab, Gugus) yang aktif tetap 20% di tahun 2021.

Dengan adanya kondisi Pandemi COVID 19 yang terjadi di Tahun 2020, tidak banyak event keolahragaan yang diselenggarakan dan tidak ada peningkatan partisipasi pemuda, yang dalam hal ini adalah dalam berwirausaha, yang terjadi di tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Partisipasi pemuda belum optimal dikarenakan : masih belum adanya Peraturan Bupati terkait turunan dari Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kepemudaan dalam penyelarasan penyelenggaraan urusan pemuda; Belum adanya sinergitas urusan pemuda yang masih berada di beberapa instansi; Masih belum maksimalnya potensi-potensi dan pembinaan pemuda yang berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai seperti pada perlombaan pemuda pelopor, kapal nusantara, pemuda wirausaha, TUB BB, dll; Belum maksimalnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan pemuda.

Pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan serta organisasi keolahragaan masih dalam tahap pengembangan dengan rincian : Tahun 2018 dan 2019 belum ada perda tentang keolahragaan, pada tahun 2020 telah disusun Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Keolahragaan akan tetapi masih perlu diselaraskan dengan Peraturan Bupati; Masih lemahnya pendataan dan pembinaan atlet usia dini; Belum adanya kurikulum pelatihan olahraga yang menjadi acuan dalam pembinaan atlet dalam meraih prestasi; Terjadinya pergantian pengurus Organisasi Olahraga yang mempengaruhi kebijakan dalam koordinasi dan pembinaan atlet; Masih minimnya anggaran dalam pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana Olahraga.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	17	30	30	20	40
2	Persentase meningkatnya prestasi olahraga	%	Na	Na	15	33	150
3	Persentase lembaga kepramukaan (Kwarcab, Gugus) yang aktif	%	Na	Na	20	20	40

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2022

14. Statistik;

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Urusan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar diukur melalui indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral. Capaian indikator prosentase ketersediaan data statistik sektoral dari tahun 2018-2022 sangat baik yaitu sudah mencapai 100% tiap tahun. Perpindahan data (obyek) dari kabupaten ke provinsi seperti data jumlah siswa SMA/SMK, jumlah industri besar, jumlah lulusan kuliah, dll, belum optimal. belum adanya portal data menyebabkan belum optimalnya fasilitasi data statistik sektoral.

Selama tahun 2018-2022 tersebut jumlah aparatur yang melaksanakan Urusan Statistik sejumlah empat orang yang terdiri dari dua orang ASN dan dua orang Tenaga Harian Lepas. Dengan keterbatasan jumlah SDM pelaksana tersebut, data statistik sektoral yang dihasilkan diantaranya PDRB, Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indek Harga Konsumen dan lain-lain, yang semuanya terdapat dalam website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

15. Persandian;

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan

kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Untuk mengetahui kinerja urusan persandian dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah memiliki capaian yang baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,0% meningkat menjadi 10,00% di tahun 2019 dan menjadi 21,0% pada tahun 2020 dan capaian optimal sebesar 100% di tahun 2021 dan tahun 2022.

Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sejumlah 43 Perangkat Daerah atau 100,00% dari total Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar.

16. Kebudayaan;

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selain itu kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang didalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat.

Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan kabupaten meliputi sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar ditunjukkan dengan 4 indikator dengan perubahan indikator pada tahun 2020, keempat indikator tersebut meliputi 1) Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara); 2) Prosesntase pengembangan kesenian tradisional; 3) Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi; dan 4) Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat).

Persentase fasilitasi pengembangan budaya nasional (nusantara) meningkat menjadi 82% di tahun 2021.

Prosesntase pengembangan kesenian tradisional menurun drastis dari 130% di tahun 2020 menjadi 56% di tahun 2022. Penurunan drastis disebabkan karena pada masa pandemi covid tidak diselenggarakan event kesenian tradisional. Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi meningkat dari 20% menjadi 34,57% di tahun 2021, dan Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat) juga meningkat dari 90% menjadi optimal sebesar 100% di tahun 2021. Penjelasan terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara)	%	Na	Na	80	82	Na
2	Prosesntase pengembangan kesenian tradisional	%	Na	Na	130	56	Na
3	Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi	%	Na	Na	20	34,57	Na
4	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%	Na	Na	90	100	Na

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2022

17. Perpustakaan;

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan kabupaten meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan untuk Persentase perpustakaan aktif; Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan ; Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat; Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar.

Persentase Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan) pada tahun 2018 sebesar 100,00% menurun menjadi 99,00% pada tahun 2020 dan menurun drastis di tahun 2021 dan 2022 menjadi 12,6%. Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya sampai di tahun 2021 menjadi 20% karena adanya PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi maupun Pusat, dan prosentase perpustakaan aktif menurun dari 100% di tahun 2021 menjadi 70,36% di tahun 2022. Indek pembangunan literasi masyarakat (IPLM) tahun 2022 sebesar 89,99, sementara tingkat kegemaran membaca tahun 2022 sebesar 69,09.

Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan)	%	100,00	99,99	99,99	4,0	12,6
2	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	%	Na	88,99	82	20	55
3	Persentase Perpustakaan Aktif	%	Na	Na	Na	100	70,36

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2022

18. Kearsipan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi sub urusan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2022 belum terselenggara, hal ini harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kearsipan. Masih terbatasnya jumlah lembaga/ instansi yang dapat mampu mengolah arsip statis dan dinamis masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengukur kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari indikator Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku dan Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan, indikator ini mengalami perubahan dari sebelumnya dan pengukuran di mulai pada tahun 2020 sebesar 77% menurun di tahun 2021 sebesar 42,9% dan meningkat kembali perlahan menjadi 55,8% di tahun 2022. Prosentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan mulai diukur pada tahun 2020 sebesar 43% menurun setiap tahunnya menjadi 11,62% di tahun 2022. Capaian indikator kinerja urusan kearsipan memerlukan perhatian khusus untuk percepatan percepatan pencapaian sesuai target yang direncanakan. Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku	%	Na	Na	77	42,9	55,8
2	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	Na	Na	43	14,3	11,62

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2022

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan;

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya dan Prosentase produk perikanan yang dipromosikan. Kinerja sub urusan perikanan tangkap terutama dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya yang menunjukkan kenaikan kinerja setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 1.787.640 kg menjadi sebesar 1.897.814 kg di tahun 2022.

Prosentase produk perikanan yang dipromosikan indikatornya mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian di tahun 2022 sebesar 46,4% . Tentunya perlu upaya peningkatan promosi produk perikanan melalui pembudayaan gemar makan ikan pada masyarakat sejak usia dini. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, tentunya perlu dikembangkan unit pengolahan dan pemasaran ikan yang memenuhi aspek keamanan pangan. Selengkapnya capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	1.787.640	1.740.624	1.841.875	1.871.031	1.897.814
2	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	578.409	581.301	511.673	517.216	521.899
3	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	45	45	30	30	46,4
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	18,76	20,04	20,26	21,71	22,18

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2020

2. Pariwisata;

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat

kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2019-2021 mengalami penurunan cukup tajam akibat pandemi covid 19 di awal tahun 2019, untuk data kunjungan wisatawan mancanegara turun drastis dari 5.991 menjadi 623 dan nihil di tahun 2021, dan kunjungan wisatawan lokal juga menurun dari 2.193.362 turun menjadi 1.085.071 dan turun lagi sebesar 918.261 di tahun 2021. Jumlah kunjungan wisatawan mulai membaik dan berangsur normal pada tahun 2022 setelah covid 19 berstatus endemi dan akses ke tempat wisata sudah berjalan normal, termasuk sudah dibukanya akses kunjungan untuk wisatawan mancanegara. Dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata sebagai salah satu kebutuhan pasca pandemi covid 19. Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Kabupaten Karanganyar sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Wisatawan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wisatawan Mancanegara	10.639	5.991	623	-	2.181
2.	Wisatawan Lokal	2.196.566	2.193.362	1.085.071	918.261	1.901.924
	Jumlah	2.207.205	2.199.353	1.085.694	918.261	1.904.105

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Tahun 2022

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, dari 10% menjadi 35% di tahun 2021. Prosentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan mulai terukur pada tahun 2020 dengan capaian 20% dan meningkat menjadi 30% di tahun 2021, peningkatan capaian ini juga tercermin pada indikator capaian Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dari 30% meningkat menjadi 42% di tahun 2022 dan indikator Persentase peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif juga meningkat dari 20% di tahun 2020 menjadi 55% di tahun 2022. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	10,00	20,00	30	33	35
2	Persentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan	%	Na	Na	20	33	30
3	Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	Na	Na	30	47	42
4	Persentase peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Na	Na	20	28	55

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2022

Pencapaian indikator Urusan Pariwisata yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2020, adalah :

- Jumlah wisatawan sejumlah 1.085.694 orang, yang terdiri dari 623 wisatawan mancanegara dan 1.085.071 orang wisatawan lokal

Tabel 2.61

Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Karanganyar

No	Tahun	Jumlah Obyek Wisata
1	2018	66
2	2019	68
3	2020	68
4	2021	80
5	2022	86

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2022

Kualitas dan kuantitas destinasi wisata perlu perhatian dalam : memanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung aktivitas on-line wisatawan, masyarakat dan pelaku wisata; monitoring dan evaluasi terkait pemutakhiran data secara berkala antara potensi dan daya tarik wisata; Standar pelayanan sudah memenuhi tapi perlu peningkatan kualitas untuk mengikuti tren wisatawan dan daya saing dengan destinasi wisata; Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata seperti akses jalan, penerangan dan tempat parkir yang memadai.

Belum optimalnya promosi pariwisata Kabupaten Karanganyar disebabkan terbatasnya partisipasi dan penyelenggaran event pariwisata dalam dan luar negeri, pemanfaatan media teknologi pemasaran serta masih kurangnya kajian dokumen pendukung pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Karanganyar.

3. Pertanian;

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan penyuluhan pertanian.

Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari capaian prosentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 59% mengalami kenaikan menjadi 65% di tahun 2022, dan untuk ketersediaan kebutuhan daging sapi, kambing, ayam dan kelinci mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian prosentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik capaiannya tetap dari tahun 2020 sampai 2021. Capaian angka kesakitan ternak besar, kecil dan unggas juga mengalami penurunan, kondisi ini sangat baik untuk kelangsungan ketersediaan pangan hewani, capain tersebut adalah sebesar 10%, 18,4% dan 19% menjadi 5,4%; 10,7%;
10,45% di tahun 2022.

Prosentase bencana pertanian yang tertangani dan

Cakupan kelompok tani yang aktif capaiannya telah optimal sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi oleh keaktifan dan kemampuan kelembagaan petani. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kelembagaan petani diantaranya : persentase kelompok tani yang dibina; persentase lembaga keuangan mikro (milik kelompok tani) yang berkembang baik; serta persentase UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan – yang juga yang dikelola kelompok tani) yang berkembang baik. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	55	57	59	59	65
	Sapi	ekor	64.763	65.404	66.293	66.762	68.329
	Kambing/ Domba	ekor	146.287	147.127	146.923	149.337	151.327
	Ayam	ekor	9.893.512	10.154.881	9.956.867	10.005.850	10.215.220
	Kelinci	ekor	12.585	13.010	13.424	13.772	13.791
2	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	65	70	70	70	75
3	Angka kesakitan ternak besar (%)	%	11,27	11,16	5,57	5,4	8,1
	Angka kesakitan ternak kecil (%)	%	21,6	21,62	10,78	10,7	16,5
	Angka kesakitan unggas (%)	%	24,7	22,7	10,50	10,45	15,1
4	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan kelompok tani yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2022

4. Perdagangan;

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :

a. Rekomendasi Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:
   - Pengelolaan usaha perdagangan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
   - Penerbitan rekomendasi teknis izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
   - Penerbitan rekomendasi teknis tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
   - Penerbitan rekomendasi teknis surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
     1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
     2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
     3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
   - Penerbitan rekomendasi teknis surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
   - Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   - Rekomendasi teknis penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
   - Rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

b. Sarana Distribusi Perdagangan
   - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
   - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
   - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
   - Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi

di wilayah kerjanya.

d. Pengembangan Ekspor

- Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Peningkatan daya saing pasar rakyat dilakukan dengan pemberian kriteria pasar sehat, sampai dengan tahun 2022 capaian sebesar 50% pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat. Pembinaan terhadap PKL terus dilakukan agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, sampai dengan tahun 2020 PKL yang di bina dan ditata sebesar 31,93%.

Dalam rangka pengembangan dan perluasan pasar dagang untuk meningkatkan perdagangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karanganyar diukur dengan capaian prosentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 10% menjadi 11,6% di tahun 2021. Begitu pula Persentase pasar rakyat (milik pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 44,4% di tahun 2021 menjadi 50% di tahun 2022. Jumlah pelaku ekspor juga meningkat dari 42 orang menjadi 44 orang di tahun 2021.

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, secara rutin dinas akan melakukan tera terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Sampai dengan tahun 2021 capaian Prosentase alat timbang yang ditera ulang sebesar 87,52%. Dalam upaya peningkatan kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar memfasilitasi mitra dengan pameran produk lokal yang dihasilkan untuk mendongkrak penjualan dan promosi, capaian jumlah produk lokal yang telah difasilitasi dalam kemitraan pameran terukur mulai tahun 2020 sebesar 5 produk dan naik drastis menjadi

150 produk di tahun 2021. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	%	Na	Na	10	11,6	85.71
2	Persentase pasar rakyat (milik pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	35,29	41,18	41,18	44,4	50,00
3	Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga	%	Na	Na	5,5	16,67	22.22
4	Jumlah pelaku ekspor	orang	Na	Na	42	44	45
5	Persentase alat timbang yang ditera ulang	%	Na	Na	25	87,52	87.85
6	Jumlah produk lokal yang telah diifasilitasi dalam kemitraan pameran	Produk	Na	Na	5	150	200

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2022

Keterangan :

Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

5. Perindustrian;

Urusan perindustrian dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembangunan Industri
   - Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, termasuk didalamnya pemenuhan dukungan sarana dan prasarana industri yang memenuhi standar. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Dimana infrastruktur industri yang ada terbagi atas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi. Sedangkan untuk infrastruktur penunjang terdiri atas perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

b. Perizinan
   - Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
   - Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.

- Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

- Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,16% dan naik kembali menjadi 9,47% di tahun 2021. Pengelolaan perindustrian mulai tahun 2020 menggunakan aplikasi digital yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional. Prosentase pengisian aplikasi nasional merupakan indikator baru yang terukur mulai tahun 2020 sebesar 20% dengan penurunan capaian menjadi 16, 66% di Tahun 2021.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	%	4,99	6,47	2,16	9,47	11
2	Persentase pengisian aplikasi nasional	%	Na	Na	20	16,66	18

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2022 Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

6. Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Berikut capaian kinerja urusan transmigrasi. Capaian indikator kinerja urusan transmigrasi di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 100% yaitu telah memberangkatkan 5 (lima) Kepala Keluarga. Tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan pemberangkatan transmigrasi karena situasi pandemi covid 19 dan belum pulihnya pertumbuhan ekonomi. Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya situasi

pandemi covid 19, maka di tahun 2022 telah dilaksanakan kembali pemberangkatan transmigrasi sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	5	5	0	0	2

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2022

2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar harus terpadu dengan rencana pembangunan, baik tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun arahan kebijakan pembangunan nasional.

Pelaksanaan urusan penunjang perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar diketahui berdasarkan sepuluh indikator terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain perencanaan jumlah program yang memenuhi target, realisasi RPJMD, nilai SAKIP, IKM, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP), kesesuaian prioritas nasional dan RKPD, keselarasan program renja PD dengan program RKPD, hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD, realisasi capaian RPJMD, serta hasil kajian dan inovasi yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah sebagai pendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan lainnya. Indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan mengalami perubahan indikator menjadi 10 indikator capaian, 4 indikator telah mencapai 100%, sedangkan yang lainnya proses capaian.

Capaian nilai SAKIP dan nilai AKIP tiap tahun mengalami peningkatan menjadi 73,56% di tahun 2021. Capaian IKM Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD juga mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 85% di tahun 2021. Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah dan Persentase inovasi yang diimplementasikan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang masing- masing capaiannya menjadi 50% dan 40% di Tahun 2021. Capaian kinerja dari masing-masing di jelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	Na	Na	91	100	Na
2	Capaian realisasi RPJMD	%	Na	Na	91	100	89
3	Nilai SAKIP	Nilai	70.43	72.4	73.45	73.56	Na
4	IKM	Skor	Na	82	88.3	85	71,18
5	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	70.43	72.4	73.45	73.56	Na
6	Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	%	Na	100	100	100	100
7	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	Na	100	100	100	100
8	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	Na	83.40	77	85	83,48
9	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	Na	42.5	25	50	57
10	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	Na	32	20	40	78,69

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

2. Keuangan;

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan mengalami perubahan dan mulai diukur mulai tahun 2020 menjadi tiga indikator kinerja dengan capaian yang mengalami penurunan akibat inflasi dan masa pemulihan ekonomi di tahun 2022. Ketiga indikator itu adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel dan Optimalisasi pendapatan daerah yang masing-masing capaiannya menurun menjadi, 54%; 49% dan 58% di tahun 2022. Ketiga indikator ini perlu mendapat

perhatian untuk percepatan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Selengkapnya Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	%	Na	Na	100	92,59	54
2	Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	%	Na	Na	100	92,39	49
3	Optimalisasi pendapatan daerah	%	Na	Na	100	94,37	58

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2022

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Ada perubahan indikator yang menjadi tanggung jawab Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang harus dicapai dan mulai diukur pada tahun 2020, yakni persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dan persentase penyelesaian administrasi kepegawaian. Adapun capaian indikator persentase ASN pada tahun 2022 yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi sebesar 80%, sedangkan indikator persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 70%. Hal tersebut dikarenakan adanya efek Pandemi Covid 19, dimana kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk ASN sangat jarang dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya capaian indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	Na	Na	65	100	80
2	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	Na	Na	70	87,28	70

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, 2022

Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

4. Penelitian dan Pengembangan;

Pentingnya penelitian dan pengembangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjalankan fungsi dalam melakukan penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Sedangkan Pemerintah Jawa Tengah melalui Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman bagi pengembangan inovasi di kabupaten/kota. Penelitian dan pengembangan inovasi daerah sangat penting dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai dengan 2021 tercapai 100%.

Indeks Inovasi Daerah yang masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya se-Subosukawonosraten dan se-Provinsi Jawa Tengah, yaitu 47,31 di tahun 2022. Kabupaten Karanganyar menempati peringkat 31 dari 35 Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah dan peringkat 7 dari 7 Kabupaten dan Kota se-Subosukawonosraten.

5. Pengawasan

Peningkatan pengawasan adalah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan

Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan sembilan indikator dalam RPJMD, dengan capaian kinerja yang pada umumnya baik, terutama Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN (yang dapat dilakukan secara daring); tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas; SP4N LAPOR!); Opini BPK atas laporan keuangan dan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT.

Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang pengawasan diukur dalam 10 indikator, indikator yang telah mencapai 100% sampai tahun 2022 sebanyak 2 indikator. Kinerja masing-masing indikator dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah	%	12	10	8	-	-
2	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	-	-	-	96	97
3	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30	25	87	15
4	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	92	93	94	95
5	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah LHR LKPD	%	1	1	1	1	1
7	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	95	100	100	100	100
8	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	40	48	60	76	80
9	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100
10	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	2

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2022

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaianpelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif.

6. Sekretariat Daerah

Indikator capaian untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan menjadi 8 indikator. Keenam indikator telah mencapai 100% di tahun 2021, tetapi mengalami penurunan di tahun 2022. Selengkapnya gambaran capaian indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang
Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	%	100,00	100,00	100,00	100	70
2	Cakupan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100	80
3	Persentase jumlah total proyekkonstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100,00	100,00	100,00	1	Na
4	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan	%	Na	57,35	58,94	66,26	Na

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	metode kompetitif						
5	Cakupan Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa	%	81,68	100,00	100,00	100	80
6	Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	100,00	100	90
7	Predikat Nilai Ekppd	nilai	Na	Na	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah	%	Na	Na	100,00	100	80

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan)

Pelaksanaan urusan penunjang terkait dengan Sekretariat Dewan adalah memfasilitasi anggota DPRD dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan capaian kinerja meningkatkan kapasitas dan peningkatan DPRD dalam rangka meningkatkan pengawasan pengesahan Perda dan APBD sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Karanganyar.

Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang Sekretariat DPRD mengalami perubahan indikator menjadi persentase capaian kinerja fisik (kegiatan) dan mulai diukur tahun 2020 sebesar 92 % dan menurun di tahun 2021 menjadi 85 %.

8. Kecamatan

Capaian indikator kecamatan yang meliputi indikator Indeks kepuasan masyarakat, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase wilayah dalam keadaan kondusif, Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dan Persentase wilayah tertib Perda menunjukkan dari 17 kecamatan rata-rata capaiannya sudah 100%. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
KECAMATAN JATIPURO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	78,7	81.4	87.7
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100,00	100,00
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100,00	99,66
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100,00	99,00
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	99,00	100,00	99,00
	Nilai SAKIP		Na	72.63	73.4	69	Na
KECAMATAN JATIYOSO	Indeks Kepuasan Masyarakat		Na	Na	65	80,11	69
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	96,00	100,00	99,00
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100,00	100,00	96,00	100,00	99,00
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	97,00	100,00	99,00
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	97,00	100,00	99,70
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	96,00	100,00	99,00
	Nilai SAKIP		Na	Na	71.82	72.54	Na
KECAMATAN JUMANTONO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			87,413	85,02	85,50
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	90,00	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	97,00	100,00	80,00	99.99	70
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	80,00	100	73
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	90,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	90,00	100	75
	Nilai SAKIP		Na	Na	73,4	73,5	Na
KECAMATAN JUMAPOLO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	80,64	80,90	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	98,00	100,00	100,00	100	100
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	91,00	100	96,97

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	99,38
	Nilai SAKIP		Na	Na	69,93	70,55	Na
KECAMATAN MATESIH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	83,57	85,19	83,47
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	100
	Nilai SAKIP		Na	Na	83,57	84,99	Na
KECAMATAN TAWANG MANGU	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	75	94,57	78,82
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	95.11	67.29
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	95.7	62.86
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100	100.00
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	62.92
	Nilai SAKIP		Na	Na	72,78	73,09	Na
KECAMATAN NGARGO YOSO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	82,05	85,33	84,92
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	85,00	99.71	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100,00	100,00	85,00	100	100
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	85,00	100	100
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	85,00	100	100
	Nilai SAKIP		Na	Na	67,6	68,76	Na
KECAMATAN KARANG ANYAR	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	79,29	85	85,05
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	99,61	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan	%	Na	Na	100,00	96,15	100

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	kondusif						
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	98,84	99,96	90.21
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	99,92	98,82	100
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	98,84	Na	Na
	Nilai SAKIP		Na	Na	69,76	70,39	Na
KECAMATAN KARANG PANDAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	70	85,45	82,3
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100	99.66
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100	99
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	99
	Nilai SAKIP		Na	Na	66,14	70,11	Na
KECAMATAN TASIKMADU	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	80	84	49
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	94.3	84
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	95.5	65
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	99.1	22
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	98.6	30
	Nilai SAKIP		Na	Na	69,62	73,4	Na
KECAMATAN JATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	77,91	78,79	80,96
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	90,00	80	90
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	90,00	90	90
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	90,00	90	90
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	90	100
	Nilai SAKIP		Na	Na	75,23	75,28	Na
KECAMATAN COLOMADU	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	80,64	78,18	78,20
	Persentase lembaga kemasyarakatan	%	Na	Na	100,00	100	100

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	aktif						
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	100
	Nilai SAKIP		Na	Na	76,44	72,78	Na
KECAMATAN GONDANG REJO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	84,25	83,25	Na
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Nilai SAKIP		Na	Na	76,86	74,87	Na
KECAMATAN MOJO GEDANG	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	77,03	80,61	Na
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	100,00	Na
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	99,00	100,00	Na
	Nilai SAKIP		Na	Na	66,1	68,1	Na
KECAMATAN KEBAK KRAMAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	80	85	81
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	100,00	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	98,00	100	81
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	97,00	100	83
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi	%	Na	Na	98,00	Na	Na

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	baik						
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	100	97
	Nilai SAKIP		Na	Na	72,78	73,09	Na
KECAMATAN KERJO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	83,65	80,47	83,785
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	96,60	84.7	40.1
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100,00	98,90	100,00	83.81	54.9
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	100,00	98.62	Na
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	100,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	100,00	99.95	31.25
	Nilai SAKIP		Na	Na	70,57	70,71	Na
KECAMATAN JENAWI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	Na	70	85,10	85,225
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	85,00	85	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	85,00	85	100
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	85,00	85	100
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	85,00	Na	Na
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	85,00	85	100
	Nilai SAKIP		Na	Na	69,62	72,57	Na

Sumber : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan).

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik terdapat 5 indikator dan ada satu yang mencapai 100% yaitu : persentase konflik sosial yang ditangani pada tahun 2021 mencapai 100% dan tahun 2022 turun menjadi 90%. Sedangkan untuk indikator lain sebagai berikut: persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang sebesar 60%; persentase masyarakat yang paham terhadap politik 75%, Persentase ormas yang difasilitasi 42%

dan Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa sebesar 55%.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan, sebagai berikut :

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	BAKESBANGPOL						
1.	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	Na	Na	60	84	60
2.	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	Na	Na	80	90	75
3.	Persentase ormas yang difasilitasi	%	Na	Na	35	42	42
4.	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	%	Na	Na	60	82	60
5.	Persentase konflik sosial yang ditangani	%	Na	Na	80	100	90

Sumber : Badan Kesatuan bangsa Politik Kabupaten Karanganyar, 2022Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan).

Dilihat dari segi penyelenggara Pemilu (KPU), angka partisipasi di Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2019 mencapai angka 83,56 % (Pilpres), 83, 43% (DPR RI), 83,47 % (DPD RI). Angka partisipasi di Kabupaten Karanganyar melebihi target yang dipatok oleh KPU RI sebesar 77,5% secara nasional. Belum tercapainya partisipasi pemilih yang mencapai 100% merupakan tantangan tersendiri dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 bernilai 80% dan belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan :

1. Secara umum pendataan penduduk sebagai basis data pemilih dalam Pemilu. Mobilitas masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam Pemilu. Karena Pemungutan suara didasarkan syarat administrasi kependudukan, sesuai dengan KTP, sehingga bagi masyarakat yang diluar wilayah administrasi tidak bisa menggunakan hak nya secara penuh.
2. Pemahaman masyarakat, khususnya pemilih terkait partisipasinya dalam menyalurkan hak pilih
3. Secara teknis, mungkin adanya kerumitan dalam menggunakan hak pilihnya; seperti surat suara yang

besar dan jumlahnya banyak, factor geografis jarak yang jauh dari TPS, memilih bukan sebuah kewajiban, dll

4. Keengganan masyarakat dalam urusan politik. Karena dimata masyarakat umum bahwa politik itu kejam dan kotor.

Dengan demikian perlu adanya pendidikan politik yang gencar untuk memerangi buta politik. Karena politik adalah kehidupan berbangsa dan dari politik itu pembangunan suatu bangsa akan tercipta.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. Di sinilah peran daya saing sangat dibutuhkan, daya saing daerah merupakan alat/sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dipergunakan sebagai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Angka Indek Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar 3,427, mengalami penurunan pada masa pandemi covid di Tahun 2021 sebesar 3,287 dan naik kembali pada masa pemulihan ekonomi menjadi sebesar 3,617. European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah.

2.4.1 Institusi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara institusi merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini ditunjukkan dengan adanya prestasi dibidang pengelolaan pemerintahan, yaitu opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2016-2022. Pencapaian prestasi ini didukung dengan penilaian SAKIP yang semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, dan B pada tahun 2017 dan 2018 dan nilai BB di tahun 2022, dan penghargaan juara nasional dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) dan penghargaan Paramasamya Nugraha.

2.4.2 Kondisi Makroekonomi

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2022 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 7 tahun terakhir 2016-2022 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sebesar 1,38 % berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 1,56% dan tahun 2022 sebesar 3,17% juga berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 5,63%. Peningkatan inflasi di tahun 2022 dibanding tahun 2021 disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan bermotor, yang berakibat pada kondisi ekonomi masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

2.4.3 Infrastruktur

Kondisi jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2022, total panjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang 1162,51 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 9,9 km, jalan Provinsi 106,1 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1046,51 km.

Pada Tahun 2022 berdasarkan jenis permukaan,jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal sepanjang 835,790 km atau 71,9% dari total panjang jalan Kabupaten. Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan

dengan selamat dan nyaman. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Pada tahun 2022 jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 437,54 km atau 41,81%, jalan kondisi sedang 420,58 km atau 40,19%, jalan kondisi rusak sepanjang 145,71 km atau 13,92% dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 42,68 km atau 4,08%. Secara rinci kondisi jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.73
Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Keterangan	Jalan Kabupaten									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
I. Jenis Permukaan										
a. Aspal	919,920,00	87,850	919,920,00	87,850	883,840,00	84,460	879,140,00	84,010,00	835,790,00	79,860
b. Kerikil	5.650,00	0,540	5,650	0,540	7,21,9	0,690,18	4 13,75	0,381,31	6,9236,66	0,663,50
c. Tanah										
d. Tidak dirinci	121,57	11,61	121,57	0,00	153,57	14,35	149,62	14,30	167,14	15,97
e. Beton										
JUMLAH	1.047,14	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00
II. Kondisi Jalan										
a. Baik	510.87	48.77	603.67	57.65	685.87	65.54	516.14	49.32	437.54	41.81
b. Sedang	256.51	24.49	246.25	23.52	218.79	20.91	365.87	34.6%	420.58	40.19
c. Rusak	221.84	21.18	160.56	15.33	137.25	13.12	147.55	14.10	145.71	13.92
d. Rusak berat	58.29	5.56	36.66	3.50	4.6	0.44	16.95	1.62	42.68	4.08
JUMLAH	1.047,51	100,00	1.047,14	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022

Sementara itu terkait dengan kondisi jaringan irigasi dan embung yang berada di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Kondisi jaringan irigasi Tahun 2018-2022

Kondisi Jaringan irigasi	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	km	%	km	km	%	km	%	km	%	km
1. Baik	49	49	50	49	49	50	66,82	383.054,24	65,32	374.455,89
2. Sedang	31	31	31	31	31	31	17,59	100.837,6	18,09	103.703,71
3. Rusak	12	12	12	12	12	12	8,09	46.351,44	8,59	49.217,55
4. Rusak berat	8	8	7	8	8	7	7,5	42.979,67	8	45.845,78
JUMLAH	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**573.222,94**	**100**	**573.222,94**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022

Tabel 2.75
Kondisi Embung Tahun 2018-2022

Kondisi Embung	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	jml	%	jml	jml	%	jml	%	jml	%	jml
1. Baik	4	57,14	5	4	57,14	5	52,04	5	48,39	5
2. Sedang	2	28,57	1	2	28,57	1	29,82	1	31,32	1
3. Rusak	0	0	0	0	0	0	2,55	1	3,1	1
4. Rusak berat	1	14,29	1	1	14,29	1	15,59	1	17,19	1
JUMLAH	7	100	7	7	100	7	100	8	100	8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2022

Infrastruktur jaringan irigasi dan embung pada kondisi baik semakin menurun dari Tahun 2021 ke 2022 karena keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Komposisi penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Komposisi Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-4	70,210
2.	5-9	67,375
3.	10-14	69,320
4.	15-64	646,859
5.	65 keatas	85,008
Jumlah		938,808

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Dilihat dari tabel komposisi penduduk tersebut di atas diketahui jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas) sejumlah 291.913 orang dan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 646.859 orang, sehingga diperoleh angka rasio ketergantungan sebesar 45,12 %. Yang artinya setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung 45 penduduk usia tidak produktif.

Dengan komposisi diatas maka Kabupaten Karanganyar masuk dalam kondisi bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi ini akan menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, tetapi apabila tidak dikelola dengan benar akan membawa kerugian karena angka pengangguran akan meningkat. Bonus demografi akan menguntungkan jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar

kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Bonus demografi harus direspons sebagai sebuah keberkahan yang berdampak positif bagi pembangunan SDM yang unggul, dimulai dengan prioritas di sektor kesehatan dan dilanjutkan dengan memperkuat pembangunan di sektor vokasi.

Jumlah TPAK tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 73,55% menjadi 73,15% karena terdampak pandemic COVID-19. Namun sisi positifnya persentase TPT pada tahun 2021 juga mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Adapun penurunan jumlah TPT tahun 2021 menjadi 5,89% dari yang semula pada tahun 2020 sebesar 5,96%. Melihat jumlah usia produktif (646.859 orang) yang cukup besar dengan persentase TPT semakin kecil merupakan pertanda baik karena dari jumlah usia produktif yang ada hanya sebagian kecil yang menjadi pengangguran terbuka. Namun masih tetap menjadi evaluasi besar bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan penyerapan jumlah angkatan kerja.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022 jumlah TPAK mengalami penurunan menjadi 70,70% dengan jumlah TPT yang ikut menurun menjadi 5,70%. Meskipun jumlah TPT mengalami penurunan yang dalam hal ini menjadi pertanda baik, akan tetapi penurunan TPAK lebih besar jumlahnya. Perubahan jumlah TPAK tahun 2022 terlihat lebih signifikan daripada perubahan pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terlalu signifikan. Perubahan ini menandakan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

2.4.5 Keamanan dan Kemudahan Berinvestasi

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.77
Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2017-2021

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perkosaan (Pasal 285)	1	0	-	-	-
2	Perzinahan (Pasal 287)	3	0	-	-	-
3	Pembunuhan (Pasal 340)	0	0	0	0	-
4	Penganiayaan (Pasal 351)	14	19	-	-	12
5	Pencurian Biasa (Pasal 362)	28	17	-	-	15
6	Pencurian Pemberatan (Pasal 363)	32	51	-	-	22
7	Pencurian Kekerasan (Pasal 365)	3	5	-	-	1
8	Penggelapan (Pasal 372)	12	8	18	12	13
9	Penipuan (Pasal 378)	23	17	18	25	8
10	Curanmor	15	14	-	-	10
11	Lain-lain	52	51	28	16	20
12	Keterlibatan Umum	-	-	22	30	-
13	Pencurian	-	-	47	52	-
14	Penculikan	-	-	0	0	-
15	Penyelundupan	-	-	0	0	-
16	Narkotika	-	-	50	48	-
17	Uang Palsu	-	-	1	0	-
18	Pelanggaran Pengairan	-	-	0	0	-
19	Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	31.852	15.044	-
20	Kesusilaan	-	-	11	15	-

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS

2.5. Evaluasi capaian indikator RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran untuk masing-masing Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1. Capaian Pembangunan Misi ke 1

Misi ke 1 RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah "Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh keberhasilan pelaksanaan misi ke 1 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 6 sasaran serta diukur melalui 11 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 terdapat 8 indikator yang tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai yaitu tingkat pembangunan infrastruktur, indek resiko bencana, persentase kawasan kumuh dan persentase berkurangnya korban bencana alam

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2023) sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu

sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras , maka sampai dengan tahun 2022 sudah baik. Dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Misi Ke 1 RPJMD Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah			Na	Na	Na	58	55,57	58,66	58,63	59,35	99,95	Tidak Tercapai	98,79	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
	1) Persentase Kawasan Kumuh	%	1,09	0,95	1,6	0,52	0,82	0,62	0,55	0,39	88,71	Tidak Tercapai	141,03	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
	2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	Na	Na	Na	81,52	77	82	82	83	100,00	Tercapai	98,80	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
	3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan	%	Na	Na	Na	75	78,32	76	76	77	100,00	Tercapai	98,70	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
	4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan	%	Na	Na	Na	75	66,12	76	76	77	100,00	Tercapai	98,70	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2. Indek Resiko Bencana		Indeks	130,4	130,4	130,4	108	108,03	108,03	91,51	108,03	118,05	Tercapai	118,05	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
	5) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	Na	0,09	0,08	0,04	0,06	0,05	0,12	0,05	41,67	Tidak Tercapai	41,67	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras
3. Indek Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	62,2	64,31	64,6	67,39	64,04	57,78	63,22	58,24	109,42	Tercapai	108,55	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
	6) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,25	90	90	80	72,36	75,3	80,71	75,4	107,18	Tercapai	107,04	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
	7) Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,43	69,41	69,49	69,41	56,67	52,7	55,71	52,8	105,71	Tercapai	105,51	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
	8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	55,17	41,21	42,02	42,02	63,33	34,12	43,78	35,85	128,31	Tercapai	122,12	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X,
**) Sangat Tinggi X≥91%, Tinggi 91%>X≥76%, Sedang 76%>X≥66%, Rendah 66%>X≥51%, Sangat Rendah X≤50%
***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >80% , Perlu Upaya Keras X≤ 80%

2.5.2. Capaian Pembangunan Misi ke 2

Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah "*Pemberdayaan Perekonomian Rakyat*" keberhasilan pelaksanaan misi ke 2 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 6 sasaran serta diukur melalui 11 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebanyak 7 indikator telah tercapai dan sebanyak 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu tingkat tingkat inflasi, Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB, Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB dan TPAK.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2023) sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Misi Ke 2 RPJMD Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi		*%*	*5,77*	*5,98*	*5,93*	*-1,87*	*3,57*	*3,6-4,5*	*5,87*	*4,25-5*	*163,06*	*Tercapai*	*138,12*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
5. Tingkat inflasi		*%*	*3,15*	*2,48*	*2,3*	*1,38*	*2,58*	*3,0±1*	*7,03*	*3,0±1*	*42,67*	*Tidak Tercapai*	*42,67*	*Sangat Rendah*	*Perlu Upaya Keras*
6. PDRB Perkapita (Rp.000)		*Rp.000*	*27.303*	*28.712*	*30.052*	*28.051*	*28.796*	*28.780*	*28.796*	*29.450*	*100,06*	*Tercapai*	*97,78*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	13,73	13,45	12,09	13,26	13,05	15,51	*12,66*	16,01	*81,62*	*Tidak Tercapai*	*79,08*	*Tinggi*	*Perlu Upaya Keras*
	10) Skor Pola Pangan harapan	Nilai	85	82,9	80,1	81,2	85,7	83,1	89,2	84,3	*107,34*	*Tercapai*	*105,81*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	3,2	3,19	3,26	3,05	3,33	5,25	3,83	5,5	*72,95*	*Tidak Tercapai*	*69,64*	*Sedang*	*Perlu Upaya Keras*
	12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,68	5,82	6,86	-4	6,47	1,67	4,63	1,7	*277,25*	*Tercapai*	*272,35*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,88	6,03	6,3	-1,17	3,24	3	4,11	3,2	*137,00*	*Tercapai*	*128,44*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,5	1,5	0,5	49,89	6,08	0,25	27,16	0,25	*10864,00*	*Tercapai*	*10864,00*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
7. Tingkat Pengangguran Terbuka		*%*	*3,17*	*2,28*	*3,15*	*5,96*	*5,89*	*5,85*	*5,7*	*5,8*	*102,63*	*Tercapai*	*101,75*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
	15) TPAK	%	70,24	70,45	70,19	73,55	73,15	74,51	70,7	74,99	*94,89*	*Tidak Tercapai*	*94,28*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X,
**) Sangat Tinggi X≥91%, Tinggi 91%>X≥76%, Sedang 76%>X≥66%, Rendah 66%>X≥51%, Sangat Rendah X≤50%
***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >80% , Perlu Upaya Keras X≤ 80%

2.5.3. Capaian Pembangunan Misi ke 3

Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah *"Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis"* keberhasilan pelaksanaan misi ke 3 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 2 sasaran serta diukur melalui 4 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 terdapat 3 indikator yang tercapai dan 1 indikator yang tidak tercapai yaitu harapan lama sekolah.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2023) sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80

Capaian Indikator Misi Ke 3 RPJMD Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		*Indeks*	*75,2*	*75,54*	*75,9*	*75,9*	*75,99*	*76,19*	*76,58*	*76,3*	*100,51*	*Tercapai*	*100,37*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	16) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,65	13,66	13,67	13,68	13,69	13,87	13,7	13,98	*98,77*	*Tidak Tercapai*	*98,00*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	17) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,51	8,52	8,56	8,57	8,67	8,79	8,71	*101,38*	*Tercapai*	*100,92*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	18) Usia harapan Hidup	Tahun	77,31	77,36	77,38	77,47	77,55	77,63	77,64	77,84	*100,01*	*Tercapai*	*99,74*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X,

**) Sangat Tinggi X≥91%, Tinggi 91%>X≥76%, Sedang 76%>X≥66%, Rendah 66%>X≥51%, Sangat Rendah X≤50%

***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >80% , Perlu Upaya Keras X≤ 80%

2.5.4. Capaian Pembangunan Misi ke 4

Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah *"Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan"* keberhasilan pelaksanaan misi ke 4 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 1 sasaran serta diukur melalui 4 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2022, seluruh indikator telah tercapai.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2023) sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, seluruh indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras , maka sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, seluruh indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 4 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81

Capaian Indikator Misi Ke 4 RPJMD Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
9. *Indeks Desa Membangun (IDM)*		*indek*	*0,64*	*0,642*	*0,69*	*0,69*	*0,6937*	*0,6852*	*0,7078*	*0,6858*	*103,30*	*Tercapai*	*103,21*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	19) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,644	0,645	0,79	0,802	0,8056	0,7909	0,8228	0,7919	*104,03*	*Tercapai*	*103,90*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	20) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,594	0,595	0,632	0,642	0,6388	0,6329	0,6648	0,6339	*105,04*	*Tercapai*	*104,87*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	21) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,684	0,685	0,639	0,632	0,6366	0,6317	0,6358	0,6317	*100,65*	*Tercapai*	*100,65*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X,

**) Sangat Tinggi X≥91%, Tinggi 91%>X≥76%, Sedang 76%>X≥66%, Rendah 66%>X≥51%, Sangat Rendah X≤50%

***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >80% , Perlu Upaya Keras X≤ 80%

2.5.5. Capaian Pembangunan Misi ke 5

Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah "*Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga"* keberhasilan pelaksanaan misi ke 5 tersebut dicapai melalui 2 tujuan dan 6 sasaran serta diukur melalui 24 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 terdapat 10 indikator yang tercapai dan 14 indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai Kabupaten Peduli HAM, Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional, Angka kemiskinan, Pengeluaran Perkapita, Persentase Penanganan PMKS, IPG (Indeks Pembangungan Gender), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Layak Anak, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE, Nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Indeks Arsip.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2023) sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 24 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 16 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sedang dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dari sebanyak 24 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 11 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Misi Ke 5 RPJMD Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM			*79,3*	*79,41*	*79,4*	*98,2*	*NA*	*80,5*	*78,25*	*80,5*	*97,20*	*Tidak Tercapai*	*97,20*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	230	175	140	198	164	125	120	120	*96,00*	*Tidak Tercapai*	*100,00*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	23) Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda	%	85	85	86	82,3	100	90	98,2	92	*109,11*	*Tercapai*	*106,74*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	*100,00*	*Tercapai*	*100,00*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan			*76*	*76*	*77*	*89,4*	*79*	*80*	*80*	*80*	*100,00*	*Tercapai*	*100,00*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	76	87,63	87,7	89,8	100	90	100	90	*111,11*	*Tercapai*	*111,11*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	12,85	13	13,15	88,97	88,98	13,6	88,98	13,75	*654,26*	*Tercapai*	*647,13*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
12. *Prestasi Pemuda dan Olah Raga*			*20*	*20*	*40*	*15*	*24*	*10*	*52*	*15*	*520,00*	*Tercapai*	*346,67*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Unit	10	10	20	0	4	5	2	8	*40,00*	*Tidak Tercapai*	*25,00*	*Sangat Rendah*	*Perlu Upaya Keras*

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
	28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	10	10	20	15	20	5	50	7	*1000,00*	*Tercapai*	*714,29*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
13. Angka kemiskinan		*%*	*12,3*	*10,01*	*9,55*	*10,3*	*10,68*	*9,25*	*9,85*	*8,96*	*93,91*	*Tidak Tercapai*	*90,96*	*Tinggi*	*Akan Tercapai*
	29) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	10,93	11,32	11,98	12,76	12,47	14,12	*13,14*	15,45	*93,06*	*Tidak Tercapai*	*85,05*	*Tinggi*	*Akan Tercapai*
	30) Persentase Penanganan PMKS	%	1,02	1,15	1,5	1,56	29,32	2,25	2,17	2,5	*96,44*	*Tidak Tercapai*	*86,80*	*Tinggi*	*Akan Tercapai*
14. *IPG (Indeks Pembangungan Gender)*		indeks	96,5	96,7	97	96,48	96,63	97,3	96,93	97,35	*99,62*	*Tidak Tercapai*	*99,57*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,27	74,31	74,52	74,76	74,29	74,81	73,38	74,95	*98,09*	*Tidak Tercapai*	*97,91*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	32) Kabupaten Layak Anak	*Score*	370	732,11	742	Na	757,9	770	642,35	780	*83,42*	*Tidak Tercapai*	*82,35*	*Tinggi*	*Akan Tercapai*
15. Indeks Reformasi Birokrasi			*Na*	*Na*	57,35	58,94	59	75	63	80	*84,00*	*Tidak Tercapai*	*78,75*	*Tinggi*	*Perlu Upaya Keras*
	33) Indeks SPBE	Indeks	0	2,04	2,99	3,02	2,4	3,37	3,32	3,5	*98,52*	*Tidak Tercapai*	*94,86*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*
	34) Nilai SAKIP	nilai	57,52	62,38	65,02	67	68,13	80	68,37	85	*85,46*	*Tidak Tercapai*	*80,44*	*Tinggi*	*Akan Tercapai*
	35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*100,00*	*Tercapai*	*100,00*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	74,67	76,67	78,67	57,16	68,32	62	68,32	65	*110,19*	*Tercapai*	*105,11*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	37) IKM Kabupaten	%	Na	Na	81,08	81,56	82,17	81,26	83,13	81,67	*102,30*	*Tercapai*	*101,79*	*Sangat Tinggi*	*Sudah Tercapai*
	38) Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	2,645	3	2,879	3	*95,97*	*Tidak Tercapai*	*95,97*	*Sangat Tinggi*	*Akan Tercapai*

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian			2022		*Target Akhir RPJMD*	Capaian Tahun 2022		Capaian Akhir Target RPJMD		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian		% Capaian Tahun 2022	*) Status	% Capaian s/d Tahun 2022	**) Status	***) Status
	39) Indeks Arsip	Indeks	49	67	75	80	45,09	83	64,36	85	*77,54*	*Tidak Tercapai*	*75,72*	*Sedang*	*Perlu Upaya Keras*

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X,
**) Sangat Tinggi X≥91%, Tinggi 91%>X≥76%, Sedang 76%>X≥66%, Rendah 66%>X≥51%, Sangat Rendah X≤50%
***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >80% , Perlu Upaya Keras X≤ 80%

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu perlu dilakukan analisis ratio-ratio keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan

Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1.Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2018-2023 fluktuatif dari sebesar Rp. 2.113.929.231.663,00 pada tahun 2018, meningkat menjadi Rp. 2.179.409.706.710,00 pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 menurun menjadi Rp. 2.121.386.179.225,00 dan meningkat kembali menjadi Rp. 2.165.983.748.571,95 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 sangat menurun yaitu sebesar Rp. 1.945.869.907.601,05 dan meningkat kembali menjadi Rp2.179.409.706.710,00 di tahun 2023. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar terlihat pada gambar berikut:

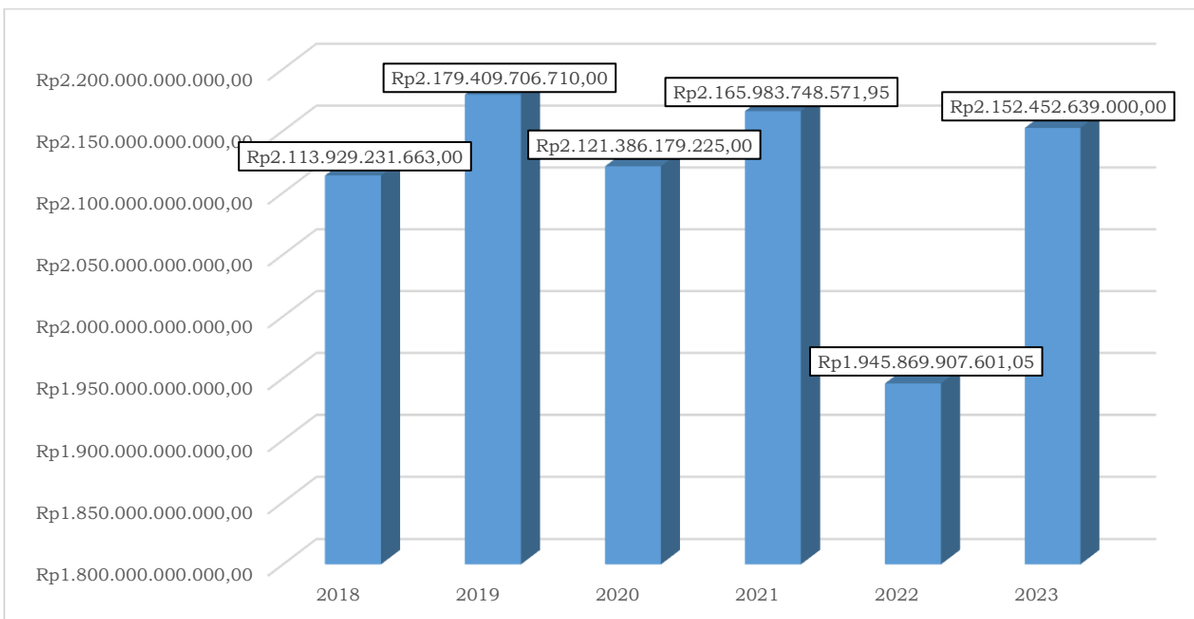

Sumber: BPKAD Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023 (Rupiah)

Pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh dana transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 0,74% pada tahun 2018 menjadi -10,16% pada tahun 2022. Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,23% pada tahun 2018 meningkat menjadi 6% pada tahun 2022. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut juga menunjukkan derajat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa derajat kemandirian daerah dari aspek keuangan meningkat. Adapun lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung meningkat dari sebesar 4,06% pada tahun 2018 menjadi 4,12% pada tahun 2022.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir sebesar 0,72%. Persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2018 – 2022 sebesar 7,28%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 13,00% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -0,79%.

Pertumbuhan pendapatan berasal dari Dana transfer menunjukan perkembangan yang fluktuatif, tertinggi pada tahun 2018 sebesar 62,71% dan terendah di tahun 2022 sebesar -9,48%. Dana transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rata-rata pertumbuhan dana transfer selama 5 tahun terakhir sebesar -2,87%.

Lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2018-2022 menunjukan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 21,71% dan terendah pada tahun 2019 sebesar -13,95%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan selama 5 tahun terakhir sebesar -3,05%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2018 - 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**16,23**	**13,00%**	**-0,79%**	**10,91%**	**6,00%**	**7,28%**
1.1	Hasil Pajak Daerah	7,91	10,86%	-4,56%	10,25%	11,31%	6,96%
1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,97	-46,63%	26,71%	-20,08%	-33,68%	-18,42%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,66	8,92%	-0,10%	-3,68%	-1,72%	0,86%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6,69	13,00%	1,40%	15,22%	3,66%	11,22%
2	**Dana Transfer**	**79,71**	**1,27%**	**-4,30%**	**1,05%**	**-9,48%**	-2,87%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	72,51	1,12%	-3,41%	-1,34%	-8,12%	-2,94%
2.1.1	Dana Perimbangan	62,71	2,49%	-8,17%	1,40%	-7,93%	-3,05%
2.1.2	Dana Bagi hasil (DBH)	1,84	-23,99%	34,90%	28,84%	-	-15,06%
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	46,30	4,07%	-9,92%	-1,51%	-	-26,84%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	14,58	0,80%	-6,52%	6,83%	-	-24,72%
2.1.5	-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	-	-	32,56%	-	-
2.1.6	-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	-	-	2,16%	-	-
2.1.7	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	9,80	-7,66%	30,42%	-15,02%	-9,28%	-0,38%
2.2	-Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	-	-	-48,80%	-47,44%	-
2.3	-Dana Desa	0,00	-	-	1,92%	0,33%	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,20	2,82%	-17,05%	33,24%	-21,09%	-0,52%
2.4.	Pendapatan Bagi Hasil	6,74	4,60%	-13,38%	28,44%	-18,04%	0,41%
2.5.	Bantuan Keuangan	0,46	-23,39%	-90,86%	948,62%	-92,39%	185,50%
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4,06**	**-0,69%**	**21,71%**	**-13,95%**	**4,12%**	-23,23%
	Pendapatan Hibah	4,06	-0,69%	21,71%	-91,73%	-100,00%	-42,68%
Pendapatan Daerah		**0,00**	**0,00**	**-2,66**	**2,10**	**-10,16**	**0,72**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 16,23%-23,24%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini

menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2022 sebesar 23,24% dan tahun 2023 sebesar 17,79%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Karanganyar termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajad desentralisasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

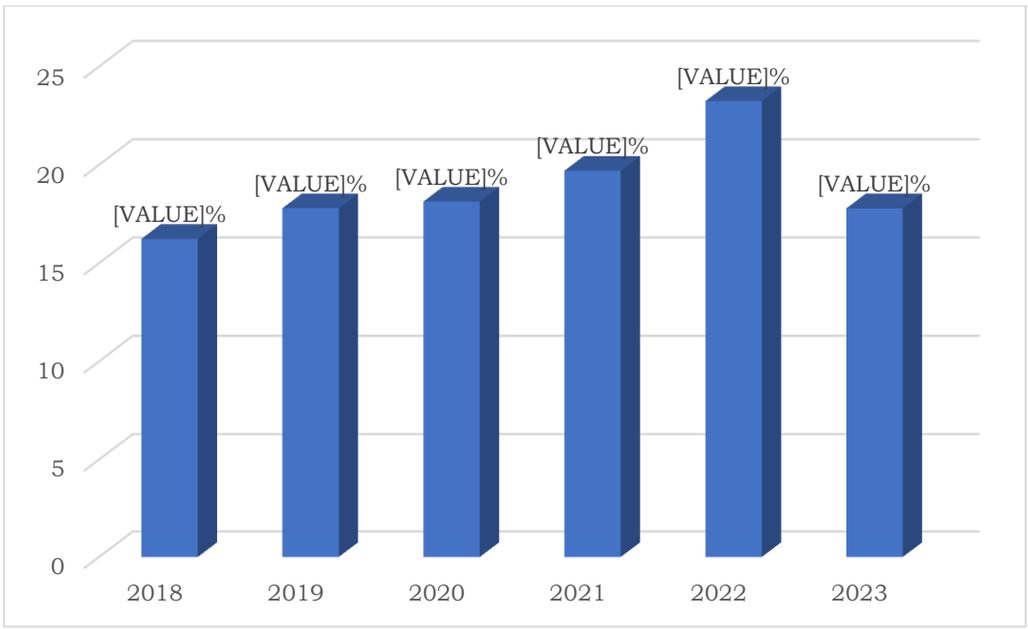

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.2.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023 (%)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2023 sebesar 81,88%, kemudian di tahun 2022 rasio ketergantungan keuangan sebesar 76,76% menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 79,71%. Meskipun menurun rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Karanganyar terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%. Perkembangan rasio

ketergantungan Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

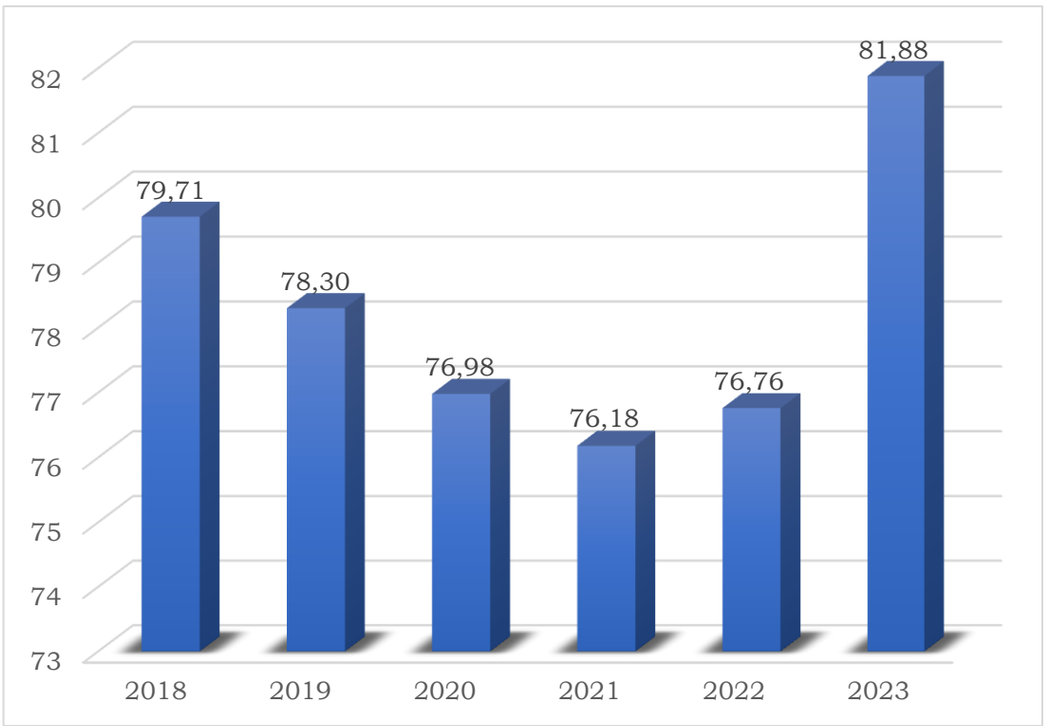

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.3.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (%)

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana perimbangan dengan kisaran antara 76,18% hingga 79,71% antara tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 16,23% hingga 17,38%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 16,47% hingga 23,24%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

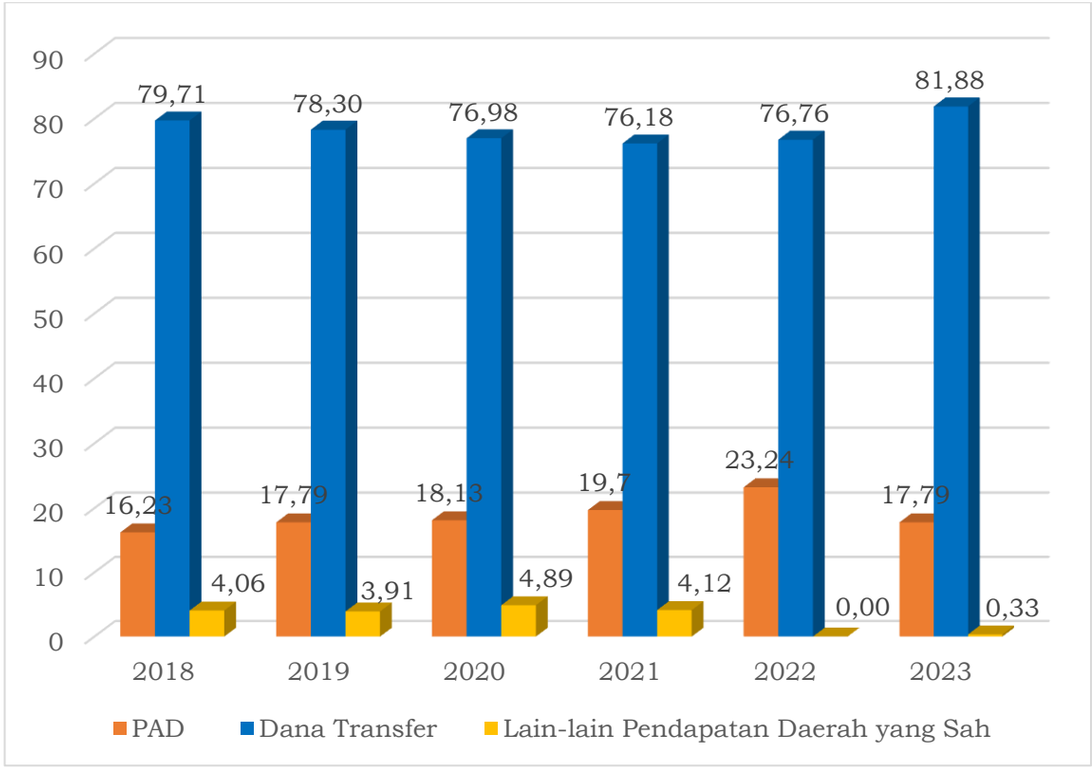

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.4.
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 (%)

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.

Perkembangan Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Rp. 000)

Uraian	Perkembangan Pendapatan					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
PENDAPATAN	**2.113.929.231,66**	**2.179.409.706,71**	**2.121.386.179,23**	**2.165.983.748,57**	**1.945.869.907,60**	0,72%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**343.156.469,17**	**387.763.013,24**	**384.682.993,53**	**426.649.591,41**	**452.267.634,80**	7,28%
Pendapatan Pajak Daerah	167.176.622,02	185.331.600,52	176.873.002,21	194.996.239,46	217.058.330,59	6,96%
Hasil Retribusi Daerah	20.521.606,74	10.952.823,84	13.878.450,82	11.091.427,28	7.356.149,92	-18,42%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.026.583,49	15.278.078,43	15.262.591,95	14.701.590,40	14.448.842,31	0,86%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.431.656,93	176.200.510,45	178.668.948,56	205.860.334,26	213.404.311,99	11,22%
PENDAPATAN TRANSFER	**1.684.924.722,50**	**1.706.390.533,47**	**1.632.940.401,70**	**1.650.042.337,16**	**1.493.602.272,95**	-2,87%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.532.821.734.70**	**1.549.992.823,97**	**1.497.208.670,57**	**1.477.187.615,30**	**1.357.200.461,95**	-2,94%
Dana Perimbangan	1.325.732.297,70	1.358.762.557,97	1.247.805.559,57	1.265.238.854,30	1.164.918.813,95	-3,05%
Dana Bagi hasil (DBH)	38.881.727,99	29.554.921,49	39.870.047,37	51.368.507.40	-	13,25%
Dana Alokasi Umum (DAU)	978.664.650,00	1.018.544.740,00	917.524.339,00	903.630.027,00	-	-2,45%
Dana Alokasi Khusus	308.185.919,72	310.662.896,48	290.411.173,20	310.240.319,90	-	0,37%
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	44.573.076,03	59.084.548,24	-	32,56%
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	245.838.097,17	251.155.771,65	-	2,16%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	207.089.437,00	191.230.266,00	249.403.111,00	211.948.761,00	192.281.648,00	-0,38%
-Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	83.272.655,00	42.634.697,00	22.407.052,00	-48,12%
-Dana Desa	-	-	166.130.456,00	169.314.064,00	169.874.596,00	1,12%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.102.987,79	156.397.709,50	129.731.731,13	172.854.721,86	136.401.810,85	-0,52%
Pendapatan Bagi Hasil	142.435.400,65	148.991.486,50	129.054.883,13	165.757.129,86	135.861.810,85	0,41%
Bantuan Keuangan	9.667.587,14	7.406.223,00	676.848,00	7.097.592,00	540.000,00	185,50%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.848.040,00	85.256.160,00	103.762.783,99	89.291.820,00	0	2,36%
Pendapatan Hibah	85.848.040.,00	85.256.160,00	103.762.783,99	8.580.000,00	0	-23,57%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

3.1.2.Kinerja Belanja Daerah

Penyajian belanja daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

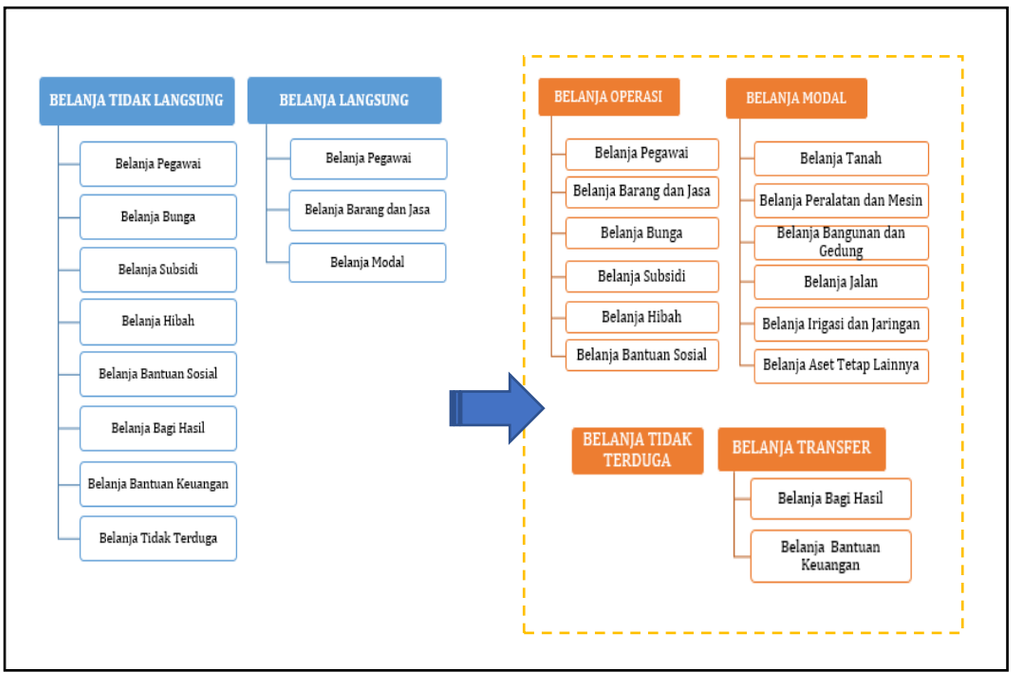

Gambar 3.5.
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karanganyar fluktuatif dalam kurun waktu tahun 6 tahun terakhir (2018-2023). Pada tahun 2018 belanja daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 2.054.581.557.575,00 meningkat di tahun 2019 menjadi Rp2.262.015.969.098,00 namun kembali turun menjadi Rp2.092.032.552.152,00 di tahun 2020. Belanja daerah kembali meningkat menjadi Rp 2.138.939.585.089,00 pada tahun 2021 namun menurun cukup signifikan di tahun 2022 menjadi Rp1.896.784.064.024,00. Kemudian di tahun 2023 belanja daerah Kabupaten Karanganyar kembali meningkat menjadi

Rp2.243.052.409.000,00. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

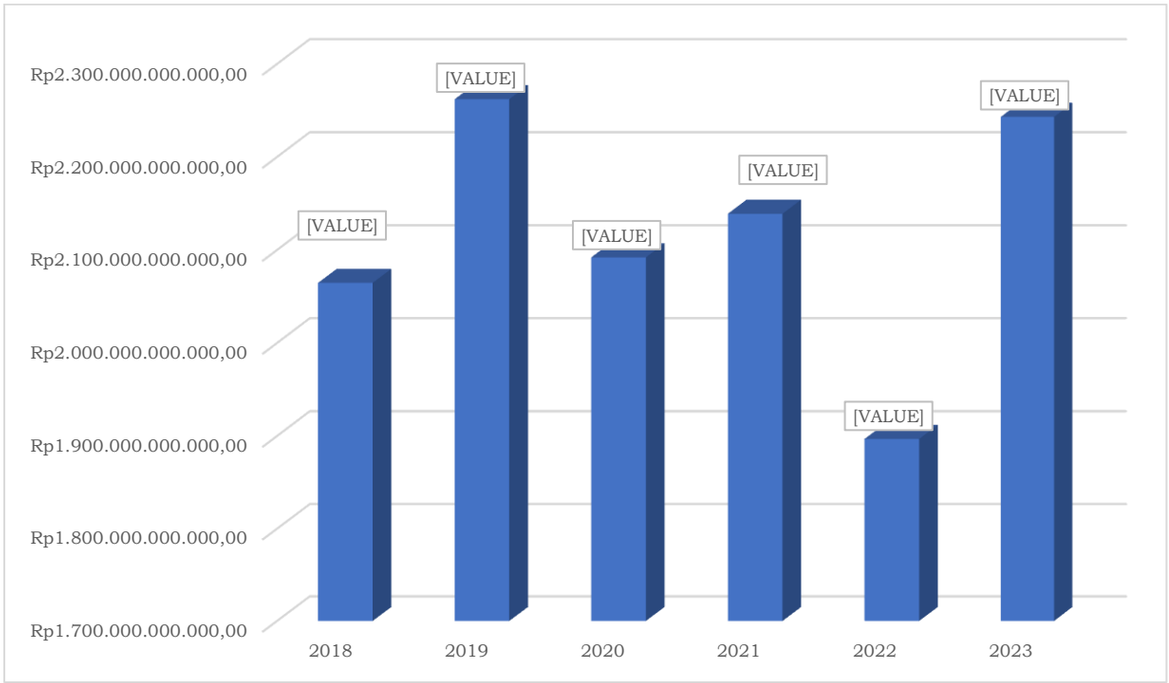

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.6.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 (Rupiah)

Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Karanganyar dalam 5 tahun terakhir sebesar 4,76%. Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 35,62%, dan terendah tahun 2022 sebesar -11,32%. Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 – 2022 menunjukan perkembangan fluktuaktif. Tertinggi tahun 2019 sebesar 9,13%. Selama 5 tahun terakhir rata-rata belanja Operasi sebesar -I,28%, pada tahun 2022 Belanja Operasi turun mencapai -13,14%. Komponen Belanja Modal menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Belanja Modal tertinggi di tahun 2021 sebesar 30,47%. Rata-rata pertumbuhan belanja Modal sebesar -7,80%.

Perkembangan persentase belanja daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2022 (%)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
A	**BELANJA OPERASI**	**13,73%**	**9,13%**	**-2,50%**	**1,40%**	**-13,14%**	-1,28%
1	Belanja Pegawai	42,65%	7,51%	-3,61%	4,39%	-7,57%	0,18%
2	Belanja Barang dan Jasa	23,2%	16,26%	-3,19%	6,72%	-23,30%	-0,87%
3	Belanja Bunga	-	-	-	-39,14%	-85,74%	-24,98%
4	Belanja Hibah	4,21%	-12,84%	7,47%	-38,73%	-12,97%	-14,27%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,23%	183,33%	-9,29%	-54,49%	87,70%	51,81%
B	**BELANJA MODAL**	**12,69%**	**9,52%**	**-48,22%**	**30,47%**	**-22,98%**	-7,80%
1	Belanja Modal Tanah	Na	-86,62%	-85,70%	-92,69%	1335,08%	267,52%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Na	-5,83%	-9,76%	-6,51%	-23,82%	-11,48%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Na	51,05%	-48,37%	123,17%	-38,46%	21,85%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Na	6,34%	-84,61%	24,96%	59,88%	1,64%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Na	16,79%	-8,67%	-34,36%	-23,57%	-12,45%
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,03%**	**5,36%**	**4114,98%**	**-70,44%**	**-64,74%**	996,29%
	Belanja Tidak Terduga	0,03%	5,36%	4114,98%	-70,44%	-64,74%	996,29%
D	**BELANJA TRANSFER**		**11,61%**	**-4,64%**	**-0,63%**	**5,10%**	2,86%
1	Belanja Bagi Hasil	0,84%	2,89%	-6,81%	10,69%	8,26%	3,76%
2	Belanja Bantuan Keuangan	14,7%	12,11%	-4,52%	-1,22%	4,91%	2,82%
Jumlah Belanja		**-0,09%**	**35,62%**	**-7,51%**	**2,24%**	**-11,32%**	**4,76%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2023

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukan bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 berkisar antara 71,46% - 75,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

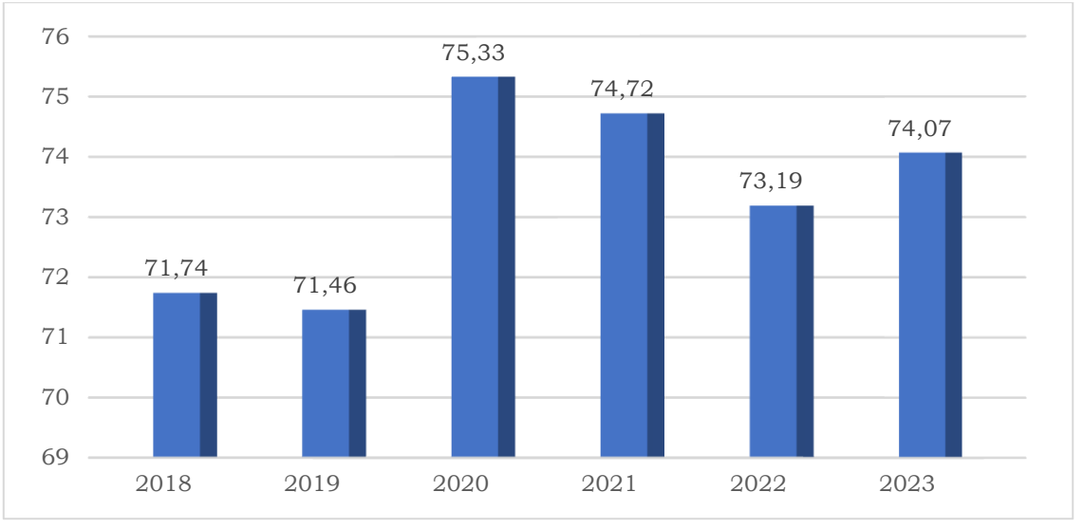

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.7.
Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Tahun 2018 - 2023 (%)

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukan perkembangan fluktuatif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2022 sebesar 10,21%, cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2018 sebesar 12,69%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

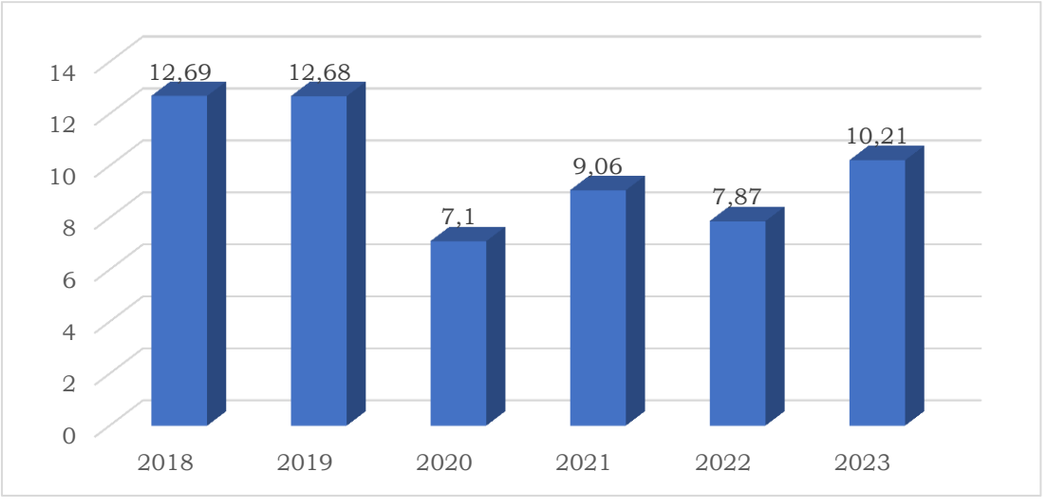

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.8.
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun 2018 - 2023 (%)

Perincian belanja daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 -2023 (Rp.000)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	**BELANJA OPERASI**	1.481.193.790,44	1.616.390.077,67	1.576.031.073,07	1.598.110.006,73	1.388.164.617,29	1.661.396.132.714	0,72%
1	Belanja Pegawai	884.808.751,87	951.287.944,94	916.916.841,22	957.166.908,66	884.708.137,91	1.026.224.015.126	7,28%
2	Belanja Barang dan Jasa	467.242.012,41	543.230.050,11	525.901.451,70	561.260.028,97	430.506.386,32	544.223.991.568	6,96%
3	Belanja Bunga	-	-	4.491.725,22	2.733.790,77	389.705,07	-	-18,42%
4	Belanja Hibah	124.394.226,16	108.417.082,63	116.516.504,92	71.394.673,32	62.134.221,30	83.784.819.120	0,86%
5	Belanja Bantuan Sosial	4.748.800,00	13.455.000,00	12.204.550,00	5.554.605,01	10.426.166,68	7.163.306.900	11,22%
B	**BELANJA MODAL**	261.936.024,36	286.884.774,88	148.559.342,37	193.819.710,16	149.278.348,29	229.047.070.886	-2,87%
1	Belanja Modal Tanah	13.771.067,85	1.842.390,00	263.418,10	19.259,68	276.392,40	1.000.000.000	-2,94%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.886.713,24	62.045.501,93	55.987.005,03	52.344.671,11	39.877.610,46	62.432.258.334	-3,05%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.347.891,39	88.135.887,85	45.505.391,92	101.554.104,71	62.492.880,18	77.080.318.000	13,25%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.555.944,03	100.554.234,95	15.472.178,57	19.334.579,10	30.912.974,63	61.938.230.000	-2,45%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.374.407,85	34.306.760,16	31.331.348,75	20.567.095,55	15.718.490,62	26.421.264.552	0,37%
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	583.892,50	615.170,57	25.929.320,69	7.665.558,40	2.703.168,25	8.000.000.000	32,56%
	Belanja Tidak Terduga	583.892,50	615.170,67	25.929.320,69	7.665.558,40	2.703.168,25	8.000.000.000	2,16%
D	**BELANJA TRANSFER**	320.867.850,27	358.125.945,98	341.512.816,03	339.344.309.80	356.637.930,20	344.609.205.400	-0,38%
1	Belanja Bagi Hasil	17.419.192,00	17.923.459,00	16.702.671,60	18.488.988,80	20.016.732,80	19.577.417.200	-48,12%
2	Belanja Bantuan Keuangan	303.448.658,27	340.202.486,98	324.810.144,43	320.855.321,00	336.621.197,40	325.031.788.200	1,12%
	Jumlah Belanja	2.064.581.557,58	2.262.015.969,10	2.092.032.552,15	2.138.939.585,09	1.896.784.064,02	2.243.052.409.000	-0,52%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2023

3.1.3.Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, yang merupakan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Gambaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Rp.000)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pendapatan Daerah	2.113.929.231,66	2.179.409.706,71	2.121.386.179,23	2.165.983.748,57	1.945.869.907,60	2.152.452.639,00
A	BELANJA OPERASI	884.808.751,87	951.287.944,94	916.916.841,22	957.166.908,66	884.708.137,91	1.026.224.015,13
	Belanja Gaji dan Tunjangan	884.808.751,87	951.287.944,94	916.916.841,22	957.166.908,66	884.708.137,91	1.026.224.015,13
B.	Belanja Modal	94.555.944,03	100.554.234,95	15.472.178,57	19.334.579,10	30.912.974,63	61.938.230,00
	Belanja Jalan, irigasi, jaringan	94.555.944,03	100.554.234,95	15.472.178,57	19.334.579,10	30.912.974,63	61.938.230,00
C	Pembiayaan	15.000.000,00	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00
	Penyertaan Modal	15.000.000,00	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL A+B+C	994.364.695,90	1.061.842.179,89	961.589.019,79	986.001.487,76	926.621.112,54	1.098.162.245,13
	Kemampuan Keuangan Daerah	1.119.564.535,76	1.117.567.526,82	1.159.797.159,44	1.179.982.260,81	1.019.248.795,06	1.054.290.393,87

Sumber: Data diolah dari LRA 2018 – 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan riil keuangan Kabupaten Karanganyar pada tahun Rp 1.119.564.535,76 ribu Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2022 kemampuan riil turun menjadi sebesar Rp 1.019.248.795,06 ribu. Namun di tahun 2023 kemampuan riil sedikit meningkat menjadi Rp 1.054.290.393,87 ribu. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi bagi daerah Kabupaten/Kota, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar telah melebihi Rp 550.000.000.000,00, sebagaimana pasal 5 ayat 2 poin a Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

3.1.4.Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan

transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
b. Pencairan Dana Cadangan.
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
f. Penerimaan Piutang Daerah.
g. Penerimaan Dana Bergulir.
h. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

a. Pembentukan dana cadangan.
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Data Bergulir.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi tahun 2018 sebesar Rp187.137.756,96 ribu, tetapi tahun 2023 turun menjadi Rp Rp100.600.000,00 ribu. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

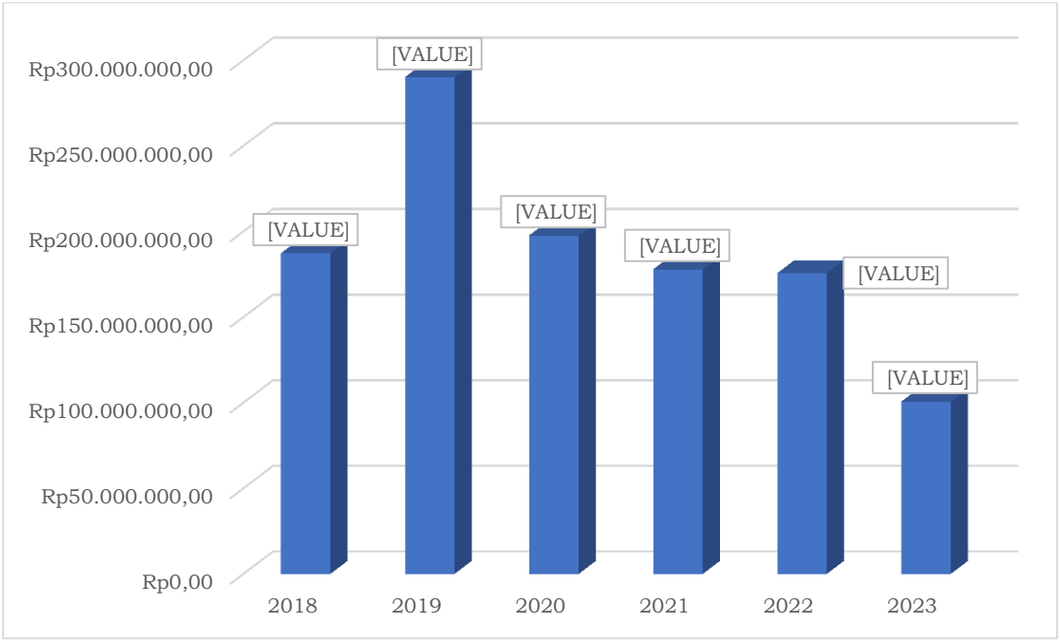

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2023

Gambar 3.9.
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 (Rp. 000,00)

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Karanganyar berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 15 milyar dan pada tahun 2023 turun menjadi Rp 10 milyar. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

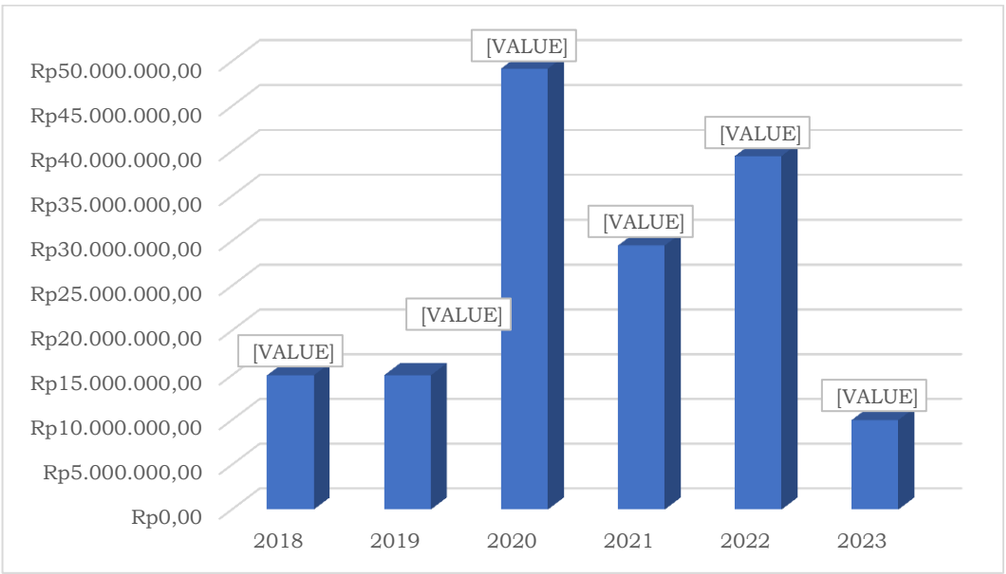

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

Gambar 3.10.
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Rp. 000,0)

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2018 - 2023

U R A I A N	REALISASI (Rp.000)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN DAERAH				**207.380.886,33**	**215.059.189,41**	**110.600.230.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**187.137.756,96**	**290.053.215,65**	**197.608.653,26**	**177.880.886,33**	**175.602.029,81**	**100.600.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.963.056,96	221.485.431,05	197.446.953,26	177.762.280,33	175.425.049,81	100.600.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	174.700,00	68.457.159,60	161.700,00	118.606,00	176.980,00	-
Penarikan dari AMU Bank Jateng	-	110.625,00	-	-		-
Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	-	-	-	-		-
Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng	-	-	-	-		-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**49.200.000,00**	**29.500.000,00**	**39.457.159,60**	**10.000.230.000**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.000.230.000
Pembayaran Pokok Hutang	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	28.457.159,60	-
Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	-	-	-	-		-
Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	-	-	-	-		-
Pembayaran Hutang Belanja	-	-	-	-		-
Pembayaran Hutang Retensi	-	-	-	-		-
PEMBIAYAAN NETTO	**172.137.756,96**	**280.053.215,65**	**148.408.653,26**	**148.380.886,33**	**136.144.870,21**	**90.599.770.000**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2023

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Karanganyar anggaran tahun 2018-2022, penyusunannya telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah Kepada Masyrakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pemerintah menerbitkan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama tahun 2022 dimasa Omicron ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. UU ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan

pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD ini. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah, dengan adanya UU nomor 1 tahun 2022 Pemerintah kabupaten/ kota mendapatkan keuntungan, karena **dapat mengoptimalkan pajak secara lebih mandiri**. Contoh pajak motor, pembagiannya 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten kota.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karanganyar pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tingkat realisasi belanja Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 97,66% dengan surplus sebesar Rp 49.347.674.088,00; pada tahun 2019 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 103,79% dengan defisit sebesar Rp 82.606.262.388,00; pada tahun 2020 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 98,62 % dengan surplus sebesar Rp 29.353.627.073,00; pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar 98,75 % dengan surplus anggaran sebesar Rp 27.044.163.482,95,-; pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar 97,48% dengan Surplus

anggaran sebesar Rp 49.085.843.577,05. Data di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada atahun 2018 – 2022 bekisar 97% - 103%.

b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karanganyar Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, terutama pada Belanja Operasi mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.7.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2022 (RP. 000,00)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1.	2018	884.808.751,87	2.064.581.557,58	42,86%
2.	2019	951.287.944,94	2.262.015.969,10	42,05%
3.	2020	916.916.841,22	2.092.032.552,15	43,83%
4.	2021	957.166.908,66	2.138.939.585,09	44,75%
5	2022	884.708.137,91	1.896.784.064,02	46,64%
6	2023	1.026.224.015,13	2.243.052.409,00	45,75%

Sumber : Data diolah dari LPKD 2018 – 2023 diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, tahun 2018 persentasenya sebesar 42,86% dan tahun 2023 sebesar 45,75%.

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Rp.000)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Pendapatan Daerah	2.113.929.231,66	2.179.409.706,71	2.121.386.179,23	2.165.983.748,57	1.945.869.907,60
A	BELANJA OPERASI	884.808.751,87	951.287.944,94	916.916.841,22	957.166.908,66	884.708.137,91
	Belanja Gaji dan Tunjangan	884.808.751,87	951.287.944,94	916.916.841,22	957.166.908,66	884.708.137,91
B.	Belanja Modal	94.555.944,03	100.554.234,95	15.472.178,57	19.334.579,10	30.912.974,63
	Belanja Program Prioritas Bupati	94.555.944,03	100.554.234,95	15.472.178,57	19.334.579,10	30.912.974,63
C	Pembiayaan	15.000.000,00	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00
	Penyertaan Modal	15.000.000,00	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00
	TOTAL A+B+C	994.364.695,90	1.061.842.179,89	961.589.019,79	986.001.487,76	926.621.112,54

Sumber : Data diolah dari LPKD 2018 – 2023 diolah

2. *Lesson Learnt* Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2018 – 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.
b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tahun 2018 persentasenya sebesar 42,86% dan tahun 2022 sebesar 46,64%.

Pada periode tahun 2024 – 2026 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
   1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.

2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya cashless dengan aplikasi dan e money sehingga meminimalisir kebocoran.

b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
c. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan meningkatkan PAD.
d. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masayarakat dan seluruh wilayah.
e. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
f. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
g. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraaan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
h. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.
i. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

A. Neraca

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2022 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,25%. Pada tahun 2018, aset yang dimiliki mencapai Rp. 3.180.866.457.230,00, meningkat menjadi sebesar Rp. 4.882.484.122.308,37 pada tahun 2021. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 77,42%. Pada tahun 2022 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp. 90.397.081.358,34, naik sebesar 16,46% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 69.520.026.740,53. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang sampai tahun 2022 tidak ada atau 0. Sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek terbesar adalah Bagian lancar utang jangka Panjang dan utang beban. Pada tahun 2022 kewajiban jangka pendek pada utang beban sebesar Rp. 55.503.320.616,99.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Karanganyar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,47%. Dilihat dari besarannya, ekuitas dana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 4.812.964.095.567,85 sama dengan tahun sebelumnya.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas. Selengkapnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Karanganyar

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Rasio Likuiditas :						
	Rasio Lancar (rasio)	23,85	7,15	6,84	4,77	4,77	9,476
	Rasio Quick (rasio)	20,33	6,16	5,87	40,28	40,28	22,58
2	**Solvabilitas:**						
2.1	Rasio Total Hutang terhadap Total asset (%)	0,4	1,12	0,93	0,01	0,01	0,50
2.2	Rasio Hutang terhadap Modal (%)	0,4	1,15	0,93	0,01	0,01	0,50

B. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar pada tahun 2022 sangat besar, hal inikarenakan Kabupaten Karanganyar tidak memiliki kewajiban jangka panjang Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Karanganyar termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio *Quick* mencapai sebesar 40,28%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik.

C. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sangat rendah hanya 0.01%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga

rendah, yaitu sebesar 0,01%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

Tabel 3.10.
Neraca Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	rata-rata pertumbuhan
ASET	2.166.875.317.645,29	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	3.066.064.901.782,83	8,22
ASET LANCAR	317.359.834.646,88	324.546.654.199,40	309.179.045.819,24	304.010.079.136,24	252.945.695.664,84	-6,16
Kas dan Setara Kas	204.443.347.505,77	229.883.946.746,88	170.885.143.205,71	159.978.997.375,22	163.759.759.877,37	-6,99
Kas di Kas Daerah	125.703.540.181,00	35.930.032.731,00	31.398.678.041,00	40.873.869.060,00	20.755.929.781,00	-84,51
Kas di Bendahara Penerimaan	61.785,00	14.299.648,00	1.245.000,00	0,00	18.192.115,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas di BLUD	62.074.880.142,86	85.982.317.052,63	87.941.770.167,46	105.668.596.284,97	140.490.859.278,12	17,90
Kas Lainnya	813.837.020,91	2.086.931.485,25	1.543.449.997,25	13.436.532.030,25	2.494.778.703,25	-81,07
Kas di Puskesmas	15.851.028.376,00	12.870.365.830,00	0,00			
Setara Kas		93.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	55.537.632.675,52	45.310.511.884,73	68.421.524.918,77	86.867.595.492,46	44.226.448.089,78	-15,99
Piutang Pajak Daerah		6.466.109.263,69	7.180.110.242,00	9.090.715.032,67	9.220.149.748,00	33,09
Piutang Pajak Daerah		20.259.194.488,00	21.327.992.218,00	24.791.585.893,00	26.039.176.816,00	30,94
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		-13.793.085.224,31	-14.147.881.976,00	-15.700.870.860,33	-16.819.027.068,00	9,76
Piutang Retribusi		278.145.185,50	488.111.105,36	240.442.048,14	118.677.232,00	-15,65
Piutang Retribusi		279.542.900,00	497.035.680,36	241.943.772,00	119.273.600,00	-16,13
Penyisihan Piutang Retribusi		-1.397.714,50	-8.924.575,00	-1.501.723,86	-596.368,00	-115,44
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		38.349.094.195,54	55.885.874.147,41	64.796.989.257,65	17.620.638.959,38	-30,65
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		40.322.511.101,09	58.764.945.398,45	68.670.096.147,15	22.276.482.913,83	-15,61

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	rata-rata pertumbuhan
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-1.973.416.905,55	-2.879.071.251,04	-3.873.106.889,50	-4.655.843.954,45	43,48
Piutang Transfer		0,00	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00	15.437.895.200,00	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi		0,00	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00	15.437.895.200,00	
Piutang Lain-lain	1.098.407.271,00	217.163.240,00	248.281.650,00	137.743.000,00	28.100.000,00	-215,93
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		576.572.500,00	720.242.500,00	738.092.500,00	737.292.500,00	30,56
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		59.983.090,00	6.900.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	-184,51
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		-419.392.350,00	-478.860.850,00	-604.849.500,00	-713.092.500,00	37,11
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				426.838.704,00	1.800.986.950,40	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				426.838.704,00	1.800.986.950,40	
Penyisihan Piutang	-13.356.219.648,32					
Beban Dibayar Dimuka	478.215.936,88	600.504.249,51	599.671.372,00	827.482.529,45	711.709.045,74	7,87
Persediaan	69.158.450.906,03	48.751.691.318,28	69.272.706.322,76	56.336.003.739,11	44.247.778.651,95	-15,63
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00			
Jumlah Aset Lancar	317.359.834.646,88	324.546.654.199,40	309.179.045.819,24	304.010.079.136,24	252.945.695.664,84	-6,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	64.895.345.175,99	70.547.539.366,17	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,39
Investasi Non Permanen	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Pinjaman Dana	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	rata-rata pertumbuhan
Bergulir						
Jumlah Investasi Non Permanen	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
Investasi Permanen	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
Jumlah Investasi Permanen	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang	64.895.345.175,99	70.547.539.366,17	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,39
ASET TETAP	1.774.353.773.692,58	2.063.342.375.474,59	2.354.154.800.039,53	2.613.128.199.566,94	2.705.387.574.153,95	9,92
Tanah	740.883.182.396,11	776.138.103.842,03	784.555.690.876,03	795.960.216.227,03	884.008.334.706,33	4,25
Peralatan dan Mesin	414.366.368.008,86	481.520.709.767,09	554.256.665.843,04	611.861.631.678,63	690.628.711.811,36	11,97
Gedung dan Bangunan	743.255.179.739,22	781.187.843.742,86	858.626.369.619,13	996.762.409.554,69	1.070.628.219.890,26	8,66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	721.011.977.142,78	917.747.705.693,69	1.160.089.266.677,00	1.312.625.664.823,68	1.460.940.763.020,85	16,02
Aset Tetap Lainnya	55.623.092.042,46	98.746.692.840,61	113.286.852.645,01	127.487.566.236,01	134.865.754.052,49	18,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.794.833.101,25	20.924.440.067,92	25.207.412.803,86	21.092.404.184,41	5.026.213.547,96	-85,17
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-925.580.858.738,10	1.012.923.120.479,61	1.141.867.458.424,53	1.252.661.693.137,51	1.540.710.422.875,30	11,86
Jumlah Aset Tetap	1.774.353.773.692,58	2.063.342.375.474,59	2.354.154.800.039,53	2.613.128.199.566,94	2.705.387.574.153,95	9,92
DANA CADANGAN						
ASET LAINNYA	10.266.364.129,84	11.229.999.375,30	26.928.910.367,65	32.198.994.181,49	33.008.103.812,10	21,42
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	156.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	-0,49
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	
Aset tidak berwujud	1.551.173.328,00	1.847.530.206,38	1.786.267.333,87	1.938.292.922,65	1.470.600.105,50	-2,84
Aset tidak berwujud	4.927.843.568,68	5.753.743.647,33	6.360.953.721,66	7.581.874.659,01	7.612.287.036,01	10,10

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	rata-rata pertumbuhan
Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	-3.376.670.240,68	-3.906.213.440,95	-4.574.686.387,79	-5.643.581.736,36	-6.141.686.930,51	13,80
Aset Lain-Lain	7.580.140.801,84	8.250.419.168,92	24.010.593.033,78	29.128.651.258,84	30.405.453.706,60	23,88
Aset Lain-Lain	20.098.353.182,45	21.174.396.512,30	56.451.267.905,11	63.750.510.174,10	61.975.088.442,28	19,04
Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	-12.518.212.380,61	-12.923.977.343,38	-32.440.674.871,33	-34.621.858.915,26	-31.569.634.735,68	14,98
Jumlah Aset Lainnya	10.266.364.129,84	11.229.999.375,30	26.928.910.367,65	32.198.994.181,49	33.008.103.812,10	21,42
JUMLAH ASET	2.166.875.317.645,29	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	3.066.064.901.782,83	8,22
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA						
KEWAJIBAN	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
Kewajiban Jangka Pendek	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	262.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Dibayar Dimuka	495.059.247,13	469.795.105,00	621.824.659,00	755.085.706,00	611.251.405,00	3,30
Utang Belanja	15.649.456.965,00	13.164.143.885,00	6.047.183.263,57	7.198.578.922,00	37.448.295.371,00	-9,95
Utang BLUD	12.732.425.011,09	10.876.764.573,62	15.725.467.446,27	20.148.624.950,18	16.303.234.805,12	3,03
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	4.914.452.430,00	0,00	0,00	
Utang Lain-lain		0,00	0,00			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	rata-rata pertumbuhan
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Kewajiban	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
EKUITAS	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
Ekuitas	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
Ekuitas	1.934.011.938.924,28	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	10,19
Ekuitas SAL	203.986.174.937,79			0,00	0,00	
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00			
Jumlah Ekuitas	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.166.875.317.645,29**	**2.469.666.568.415,46**	**2.763.481.985.690,28**	**3.020.680.906.818,08**	**3.066.064.901.782,83**	8,22

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2022

.

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 – 2022 di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 disusun dengan berbasis pada asumsi:

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2018– 2022 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
2. Dana tranfer menyesuaikan kebijakan pemerintah mendasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020 – 2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2024-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan yang moderat dengan pertumbuhan kurang lebih 8,9% dengan baseline dana transfer pada APBD tahun 2021 penetapan. Pendapatan Transfer dari dana DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2024-2026, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sember pendanaan DAK.
3. Kondisi Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan pertangahan tahun 2021 belum menunjukkan berakhir menyebabkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi melambat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 3,5% –6,5% .
4. Asumi Inflasi Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk proyeksi adalah 2% – 4%.

5. Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2024 – 2026 sebesar 1% - 3% pertahun.
6. Pada tahun 2023 dan tiga tahun ke depan kondisi keuangan negara semakin membaik sehingga transfer ke daerah berimbas meningkat, didukung dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional pemulihan pasca COVID 19.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2024 – 2026 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah memperhitungkan adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi mempengaruhi resiko fiskal atas optimalisasi PAD.

a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2024-2026, didasarkan atas baseline tahun 2022 dan 2023, semakin baik dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan 5%, karena kondisi perekonomian dan kemampuan membayar sudah meningkat. Kabupaten Karanganyar memiliki komitmen untuk meningkatkatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dengan mengimplementasi UU Nomor 1 tahun 2022. Optimalisasi peningkatan pajak akan dilakukan pada 3 tahun yang akan datang.

b) Proyeksi Retribusi daerah tahun 2024 – 2026, Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika asumsi pandemi Covid-19 sudah berakhir dalam

periode RPD tahun 2024-2026, maka penerimaan retribusi mengalami trend yang meningkat rata-rata 5% per tahun, khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. Sebagai *benchmarking* realisasi restribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp 11.91.427.282,00 dan baseline retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp 7.356.149.924,00.

c) Proyeksi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Karanganyar didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun pada periode 2024 – 2026, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan RAPBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 205.860.334.262,95

d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2018 – 2022 dengan rata-rata pertumbuhan -1,07%. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber pendapatan BLUD rata-rata diproyeksikan tumbuh 5% per tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Puskesmas, namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2024 – 2026. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan adanya resiko fiskal yang akan dihadapi

pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. Resiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat pembagian pendapatan transfer pusat dan provinsi tidak dapat di proyeksi secara tepat. Sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Karanganyar memiliki proporsi pendapatan transfer sebesar 65,40% terhadap total pendapatan daerah, yang ini dapat diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. DAU pada tahun 2024 sampai 2026 diproyeksikan sama dengan postur pendapatan DAU tahun 2023. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat DAU dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAU dan DAU tematik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penggajian P3K)

Pencermatan terhadan Dana Transfer, bersumber dari kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih terus berpotensi terjadi, baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (Fisik dan Non Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi baseline DAK Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2024-2026 diasumsikan meningkat, per tahun dengan baseline DID Tahun 2022 sebesar Rp. 22.407.052.000,00. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai stimulan bagi daerah dengan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,

menyesuaikan dengan kebijakan penggunaaan DID tahun 2024-2026, termasuk dalam hal ini kriteria DID yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2021 dan tahun 2022. Pendapatan tranfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2024 – 2026. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota akan disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah menggunakan baseline RAPBD Perubahan tahun 2022.

4) Lain-lain pendapatan yang Sah.

Proyeksi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 – 2026 didasarkan pada dana hibah dengan baseline pada tahun 2022 dan tahun 2021 .

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampaknya pada belanja daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan berkurang. Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2024-2026;
b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;

d. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.
h. Pada tahun 2024 alokasi belanja harus memperhatikan kebutuhan pelaksanaan Pemilu Serentak

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performace-based budgeting), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2022, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional. Kebutuhan belanja boleh melebihi pendapatan, selama masih memenuhi ketentuan defisit anggaran dan ada dana yang akan digunakan untuk mencukupinya.

c. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan jika kemampuan anggaran tersedia. Memperhatikan besarnya kebutuhan belanja di tahun-tahun sebelumnya, sehingga penyediaan dana cadangan, dilakukan penundaan (ditiadakan), untuk mengurangi defisit belanja yang masih sangat besar.

Tabel 3.11.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026

Keterangan	Tahun (Rp)			
	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	**2.152.452.639.000**	**2.166.492.393.660**	**2.181.132.059.470**	**2.196.399.590.456**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**382.871.676.000**	**396.911.430.660**	**411.551.096.470**	**426.818.627.456**
Pajak Daerah	188.286.600.000	197.700.930.000	207.585.976.500	217.965.275.325
Retribusi	7.289.262.000	7.653.725.100	8.036.411.355	8.438.231.923
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.168.176.000	18.026.584.800	18.927.914.040	19.874.309.742
Lain lain PAD yang sah	170.127.638.000	173.530.190.760	177.000.794.575	180.540.810.467
PENDAPATAN TRANSFER	**1.762.370.963.000**	**1.762.370.963.000**	**1.762.370.963.000**	**1.762.370.963.000**
Pendapatan Transfer Pusat	**1.604.417.769.000**	1.604.417.769.000	1.604.417.769.000	1.604.417.769.000
Pendapatan Transfer pemerintah yang sah				
Pendapatan transfer antar daerah	157.953.194.000	157.953.194.000	157.953.194.000	157.953.194.000
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.210.000.000**	**7.210.000.000**	**7.210.000.000**	**7.210.000.000**
Hibah;	7.210.000.000	7.210.000.000	7.210.000.000	7.210.000.000
Dana Darurat		-	-	-
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	-
Belanja Daerah	**2.243.052.409.000**	**2.211.492.393.660**	**2.221.132.059.470**	**2.234.399.590.457**
1. Belanja Operasi	**1.661.396.132.714**	**1.757.956.097.368**	**1.760.959.270.763**	**1.769.143.722.866**
1.1. Belanja Pegawai;	1.026.224.015.126	1.110.224.015.126	1.117.444.463.156	1.129.679.352.083
1.2. Belanja Barang dan Jasa;	544.223.991.568	478.947.263.122	554.392.418.848	550.163.737.248
1.3. Belanja Bunga;	-	-	-	-
1.4. Belanja Subsidi;		-	-	-
1.5. Belanja Hibah; dan	83.784.819.120	163.784.819.120	84.112.388.758	84.280.613.536
1.6. Belanja Bantuan Sosial.	7.163.306.900	5.000.000.000	5.010.000.000	5.020.020.000
2. Belanja Modal	**229.047.070.886**	**98.813.365.026**	**101.912.178.391**	**103.857.726.672**

Keterangan	Tahun (Rp)			
	2023	2024	2025	2026
2.1. Belanja Tanah;	1.000.000.000	-	-	-
2.2. Belanja Peralatan dan Mesin;	62.432.258.334	17.432.258.334	18.449.690.592	18.468.140.283
2.3. Belanja Bangunan dan Gedung;	77.080.318.000	22.080.318.000	23.102.398.318	23.125.500.716
2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan;	61.938.230.000	40.000.000.000	41.040.000.000	41.081.040.000
2.5. Belanja Aset Tetap lainnya.	26.421.264.552	19.300.788.692	19.320.089.481	21.183.045.673
2.6. Belanja Aset lainnya.	175.000.000	-	-	-
3. Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	**5.000.000.000**	**5.050.000.000**	**5.100.500.000**
4. Belanja Transfer	344.609.205.400	**349.722.931.266**	**353.210.610.316**	**356.297.640.918**
4.1. Belanja Bagi Hasil;	19.577.417.200	39.691.143.066	41.155.109.647	42.681.862.746
4.2. Belanja Bantuan Keuangan.	325.031.788.200	310.031.788.200	312.055.500.669	313.615.778.172
PEMBIAYAAN DAERAH	110.600.230.000			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.600.000.000	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.600.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.230.000	5.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.230.000	5.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	90.599.770.000	45.000.000.000	40.000.000.000	38.000.000.000
Defisit Belanja	-90.599.770.000	-45.000.000.000	-40.000.000.000	-38.000.000.000
Surplus (defisit)	0	0	0	0

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi BPKAD Kab. Karanganyar

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2024 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2018 - 2022. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.12.

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta fKapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Rp)

No.	Uraian	2024	2025	2026
	Kemampuan Keuangan Daerah	**2.216.492.393.660**	**2.231.132.059.470**	**2.246.399.590.456**
	Pendapatan Daerah	2.166.492.393.660	2.181.132.059.470	2.196.399.590.456
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Pengeluaran	**1.115.224.015.126**	**1.127.444.463.156**	**1.141.679.352.083**
A	***BELANJA OPERASI***	***1.110.224.015.126***	***1.117.444.463.156***	***1.129.679.352.083***
	Belanja Tunjangan dan Gaji	1.110.224.015.126	1.117.444.463.156	1.129.679.352.083
B.	***Pengeluaran Pembiayaan Daerah***	***5.000.000.000***	***10.000.000.000***	***12.000.000.000***
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
	Kapasitas Riil	**1.101.268.378.534**	**1.103.687.596.314**	**1.104.720.238.374**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023, diolah

b. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan

anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.
3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Gambaran umum Kabupaten Karanganyar yang disajikan dalam Bab II dan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023 menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam tiga tahun kedepan. Kategori perumusan masalah dan penyajian masalah mengikuti konsiderans Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Lebih lanjut dalam pasal 258 dan 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan aspek informasi pembangunan dilihat dari (i) aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) aspek pelayanan umum; (iii) aspek daya saing daerah. Ketiga aspek ini saling terkait.

Aspek kesejahteraan akan baik jika pelayanan publik terpenuhi secara baik. Pelayanan publik yang baik akan menjadi daya dukung untuk meningkatkan daya saing daerah, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah juga memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumberdaya manusia berkualitas tinggi dapat muncul jika kondisi kesejahteraan masyarakat baik. Permasalahan pembangunan sebagaimana gambar berikut.

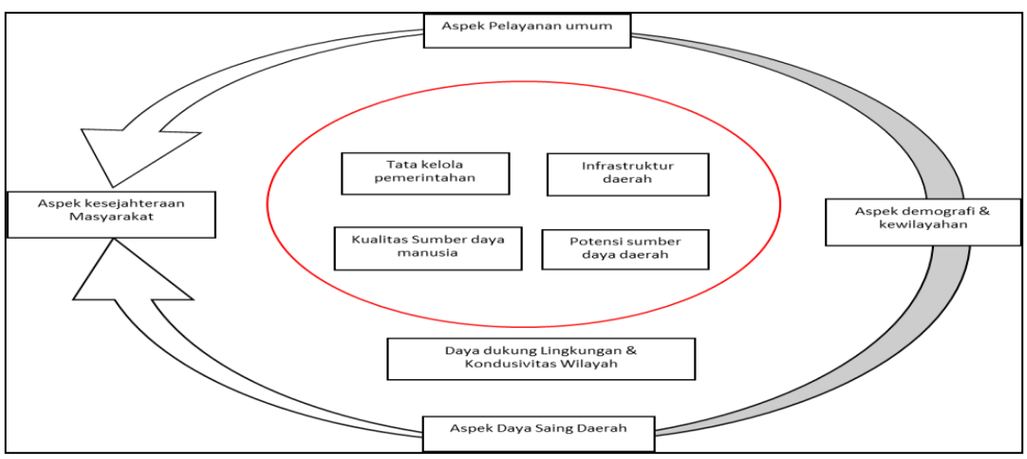

Gambar 4.1.
Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

Merujuk pada pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketiga aspek pembangunan tersebut dipengaruhi oleh komponen: (1) tata kelola pemerintahan yang baik, (2) infrastruktur daerah yang baik; (3) Sumber daya manusia yang unggul, (4) kemampuan pengelolaan sumber daya daerah yang produktif, (5) daya dukung lingkungan dan kondusivitas wilayah. Lima komponen tersebut dirinci kedalam kelompok urusan pemerintahan antara lain sebagai berikut :

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Masih belum optimalnya rata rata lama sekolah. Kabupaten Karanganyar, sampai dengan tahun 2022 sebesar 8,79 tahun.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Tahun 2022. Angka Kematian Ibu dengan target kurang dari 45 kematian ibu per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022, namun angka capaiannya sebesar 52,07 per 1.000 Kelahiran Hidup.

b. Masih ditemukannya gizi buruk dan stunting. Pada tahun 2022 persentase gizi buruk 0,02% dan persentase stunting berdasarkan SSGI sebesar 22,3%

c. Masih ditemukannya penyakit menular yaitu DBD, HIV AIDS dan TBC. Pada tahun 2022 penemuan DBD sebesar 91 per 100.000 penduduk, penemuan HIV AIDS sebesar 0,01 per 100.000 penduduk dan TBC sebesar 79% dari target sasaran yang ditentukan dari Pemerintah Pusat.

d. Belum semua fasilitas Kesehatan memenuhi akreditasi minimal utama. Pada tahun 2022 fasyankes yang terakreditasi minimal utama sebesar 24

e. Dari tiga belas jenis tenaga kesehatan hanya ada 4 (empat) jenis tenaga kesehatan yang sudah mencapai target kesediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
    a. Masih belum semua jalan di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi mantap, tahun 2022 baru sepanjang 80,24 % dalam kondisi mantap.
    b. Belum semua irigasi di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik. Pada tahun 2022 baru sepanjang 75,3% irigasi di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik.
    c. Belum semua penggunaan lahan sesuai peruntukannya. Pada tahun 2022 baru 82% persentase penggunaan lahan di Kabupaten Karanganyar yang sesuai peruntukannya.
    d. Belum semua penduduk terlayani air minum secara layak. Akses masyarakat pedesaan terhadap air minum dan sanitasi layak sampai dengan tahun 2022 sebesar 96% dan IPAL sebesar 95%.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
    a. Belum semua perumahan dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU). Pada tahun 2022 baru 44% perumahan di Kabupaten Karanganyar yang sudah dilengkapi PSU dan diserahkan kepada pemerintah
    b. Pada tahun 2022 masih ada 0,55% wilayah di Kabupaten Karanganyar yang termasuk ke dalam Kawasan Kumuh
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
    a. Pada tahun 2022, rasio linmas di Kabupaten Karanganyar baru sebesar 0,67 per 10.000 penduduk
    b. Rasio Manajemen Wilayah Kebakaran terhadap luas wilayah pada tahun 2022 sebesar 20%
    c. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 baru sebesar 0,79

d. Pada tahun 2022, di Kabupaten Karanganyar baru 10,17% desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Pada tahun 2022, baru sebesar 1,5% KK miskin di Kabupaten Karanganyar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan rujukan terpadu (SLRT) untuk penanganan penyandang PMKS dan pemberian jaminan sosial

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karanganyar di tahun 2022 sebesar 5,7 persen, yang artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya adalah pencari kerja.

b. Pada tahun 2022, baru 62,90% perusahaan di Kabupaten Karanganyar yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

c. Pada tahun 2022, baru 70,85% tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Lembaga pemerintah yang responsif gender masih sedikit. Pada tahun 2022, baru 40% lembaga pemerintah yang responsif gender.

b. Desa Layak Anak yang terbentuk di Kabupaten Karanganyar masih sangat sedikit, yaitu sebesar 2% di Tahun 2022.

c. Masih sedikitnya perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2022 baru 20% perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Karanganyar.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. Belum optimalnya capaian Pola Pangan Harapan (PPH). Tahun 2022 sebesar 89,2.

b. Belum optimalnya angka konsumsi energi tahun 2022 sebesar 1.871,2 kalori/kapita/tahun dari target 2.000 kalori /perkapita/tahun

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Pada tahun 2022, baru 1.397 (60,77%) aset tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat dari 2.299 total aset yang dimiliki.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Pada tahun 2022, baru 75% hasil Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tanah) Yang Memenuhi Baku Mutu

b. Pada tahun 2022, baru 75% Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan LH

c. Pada tahun 2022, baru 74% jumlah sampah di Kabupaten Karanganyar yang tertangani

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih ada anak di Kabupaten Karanganyar yang belum memiliki KIA, dimana tahun 2022 sebesar 39,60% anak-anak di Kabupaten Karanganyar yang belum memiliki KIA

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Berdasarkan hasil IDM Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 0,7078 diketahui bahwa desa-desa di Kabupaten Karanganyar dalam status Desa Maju. Membutuhkan upaya yang optimal untuk menaikkan status desa menjadi Desa Mandiri.

14. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
    a. Masih rendahnya capaian Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2022 baru mencapai 71,57%.
    b. Pengguna KB MKJP di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 baru sebesar 32,22%.
15. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
    a. Belum optimalnya pemenuhan LLAJ pada tahun 2022 LLAJ dalam kondisi baik baru mencapai 70%
    b. Belum semua terminal kewenangan Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik yaitu 47,29%
    c. Masih belum optimalnya rasio konektivitas, pada tahun 2022 baru mencapai 67%
16. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
    a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karanganyar di tahun 2022 sudah cukup baik meskipun belum mencapai target yaitu 3,32 dengan kategori Baik. Perlunya upaya untuk menaikkan nilai SPBE sehingga menjadi kategori Memuaskan
17. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
    a. Sedikitnya Unit Usaha Simpan Pinjam baru di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2022, hanya 13% pertumbuhan unit usaha simpan pinjam yang baru.
    b. Masih banyaknya koperasi di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi tidak sehat. Pada tahun 2022, hanya 65% Koperasi di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi sehat.
    c. Masih sedikitnya jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat, yaitu sebesar 500 orang pada tahun 2022.
    d. Masih rendahnya pertumbuhan usaha UMKM baru di tahun 2022, yaitu hanya sebesar 4,9%.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Pada tahun 2022, baru 68% jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi.

b. Belum optimalnya peningkatan investor baru yaitu pada tahun 2022 baru menjadi 13%

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih sedikitnya jumlah prestasi pemuda di tingkat regional/nasional/internasional yaitu sebesar 2 buah pada Tahun 2022

b. Masih sedikitnya lembaga kepramukaan yang aktif, yaitu sebesar 40% lembaga kepramukaan (Kwarcab, Gugus) yang aktif di Tahun 2022

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Belum optimalnya ketersediaan dan fasilitas data statistik sektoral. (Satu Data Indonesia)

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam kegiatan pemerintahan.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengembangan pemajuan kebudayaan sebagaimana amanat dalam UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

b. Belum optimalnya cagar budaya yang dilestarikan karena sampai tahun 2022 belum memiliki tim ahli cagar budaya yang tersertifikasi

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Masih sedikitnya perpustakaan yang mendapatkan pembinaan. Pada tahun 2022, baru 12,6% perpustakaan di Kabupaten Karanganyar yang mendapatkan pembinaan

b. Masih belum optimalnya budaya literasi pada tahun 2022 indek pembangunan literasi masyarakat (IPLM) sebesar 89,99

c. Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca tahun 2022 sebesar 69,09

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. Masih rendahnya indeks arsip daerah, yaitu sebesar 64,36 di Tahun 2022.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Rendahnya tingkat konsumsi ikan, tahun 2022 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 21,71 Kg, per kapita / tahun.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif, dimana pada tahun 2022 baru 42% jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan.

b. Belum optimalnya pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangnyar sampai dengan 2022 yang dipromosikan baru sebesar 30%.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Sarana pertanian sesuai kebutuhan dalam kondisi baik di tahun 2022 baru sebesar 65%.

b. Prasarana pertanian sesuai kebutuhan dalam kondisi baik di tahun 2022 baru sebesar 75%.

c. Masih ditemukannya angka kesakitan ternak pada tahun 2022 ternak besar sebesar 8,1%, ternak kecil sebesar 16,5%, unggas sebesar 15,1%.

d. Belum optimalnya produksi pertenakan, tahun 2022 populasi ayam 10.215.220 ekor. Kondisi ini tidak sesuai dengan target.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 tidak melaksanakan urusan Kehutanan karena tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan tersebut.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan kewenangan daerah, Kabupaten Karanganyar belum mengelola panas bumi yang akan menjadi sumber alternatif energi.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Pada tahun 2022, baru 50% pasar di Kabupaten Karanganyar masuk kriteria pasar sehat.
b. Masih rendahnya penggunaan informasi harga, dimana pada tahun 2022, baru 22,22% sarana perdagangan uang memiliki informasi harga.
c. Belum semua UTTP dilakukan tera/tera ulang tahun 2022 sebesar 87,85%

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang baru masih sangat rendah, yaitu baru 30% di tahun 2022.
b. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri, sampai dengan tahun 2022 belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri

32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

a. Pemberangkatan transmigrasi sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 diselenggarakan pemberangkatan transmigrasi sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Masih belum optimalnya persentase Perangkat Daerah dengan nilai PMPRB yang baik.
b. Penilaian SAKIP yang baru mencapai nilai B

2. Sekretariat DPRD

a. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatanpimpinan dan anggota DPRD. Pada tahun 2022, baru 78% kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana.
b. Pada tahun 2022, baru 78% kegiatan-kegiatan anggota DPRD disosialisasikan dan terdokumentasi.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya capaian komponen perencanaan dalam perhitungan SAKIP. Sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 23,7% dari total 30%.

2. Keuangan

a. Kapasitas fiskal Kabupaten Karanganyar belum optimal. Pada tahun 2022 ratio PAD dalam Pendapatan baru mencapai 17,79%

3. Kepegawaian

a. Belum optimalnya implementasi Sistem Merit. Pada tahun 2022 Sistem Merit baru mencapai 186.

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya hasil inovasi yang dapat diimplementasikan. Pada tahun 2022, baru 57% hasil inovasi yang dapat diimplementasikan.

b. Indeks Inovasi Daerah yang masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya se-Subosukawonosraten dan se-Provinsi Jawa Tengah, yaitu 47,31 di tahun 2022. Kabupaten Karanganyar menempati peringkat 31 dari 35 Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah dan peringkat 7 dari 7 Kabupaten dan Kota se-Subosukawonosraten

c. Belum ada SOTK terkait dengan bidang kelitbangan yang menjadi Badan Riset Inovasi Daerah (berdiri sendiri) atau terintegrasi BAPERIDA (Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah)

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Belum semua OPD menerapkan SPIP pada level terdefinisi ditahun 2022 sebanyak 80%.

b. Belum optimalnya Indeks Maturitas SPIP pada tahun 2022 baru mencapai 2,879

4.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.

b. Belum optimalnya kinerja kecamatan sebagaimana PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Masih rendahnya fasilitasi terhadap ormas, yaitu sebesar 42% di tahun 2022.

b. Belum tercapainya perempuan sebagai legislatif sebesar 30% sebagaimana amanat dalam peraturan perundangan. Karena hingga tahun 2022, baru 20% anggota legislatif, disandang oleh perempuan

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan misi dan arahan presiden, pemerintah pusat menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari masing-masing agenda pembangunan tersebut, beberapa isu strategis yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
    a. Keberlanjutan sumber daya alam

       Dalam keberlanjutan sumber daya alam, isu strategis yang dihadapi antara lain :

       1) Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa, seperti cadangan minyak dan gas.
       2) Diperlukan adanya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield*/MSY) dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
       3) Degradasi dan deplesi SDA lainnya seperti hutan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati, serta kelangkaan air baku akibat deforestasi dan dampak perubahan iklim.

    b. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi

       Dalam tata kelola sumber daya ekonomi, isu strategis yang dihadapi antara lain :

       1) Semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.
       2) Peningkatan populasi penduduk menyebabkan kebutuhan pangan jikut meningkat sementara ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan.
       3) Produktivitas yang rendah serta fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani rendah.
       4) Perlunya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

5) Belum optimalnya produktivitas perikanan, dan perlunya peningkatan harmonisasi tata ruang laut dan darat berupa penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZKSN/KSNT).
6) Pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien, kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil, pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri, kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa.
7) Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas.
8) Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan.
9) Belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.

c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Isu strategis terkait dengan transformasi struktural antara lain :

1) Sektor industri pengolahan yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal masih terkendala dengan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara akibat kualitas SDM yang rendah.
2) Kualitas investasi juga masih rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar.
3) Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud.

4) Investasi bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir.
5) Peningkatan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil.

d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Isu strategis terkait dengan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital yaitu bahwa kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat masih kurang.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Permasalahan terkait dengan agenda pembangunan ini adalah ketimpangan antar wilayah yang terjadi akibat isu-isu sebagai berikut :

a. Belum tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
b. Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundangundangan sektoral lainnya.
c. Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan.
d. Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional.
e. Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan

Sementara khusus untuk wilayah Jawa-Bali, isu yang dihadapi antara lain :

a. Tingginya eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan budidaya dan kawasan lindung seperti kawasan karst yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
b. Semakin berkurangnya ketersediaan dan pasokan air yang tidak sebanding dengan permintaan.

c. Tingginya perubahan konversi lahan pertanian pangan beririgasi teknis yang mengancam peran Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional.
d. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tingginya potensi ancaman bencana.
e. Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan

      Isu terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, antara lain :

      1) Pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk.
      2) Keserasian pendataan penduduk, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia.
      3) Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan penduduk kelompok khusus.
      4) Administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.

   b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

      Terkait dengan perlindungan sosial, isu yang dihadapi antara lain :

      1) Permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal.
      2) Perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang.
      3) Perlindungan sosial masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain

penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin.

c. Pemenuhan layanan dasar

Dalam pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat, isu strategis yang ditemui antara lain :

1) Meski derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh penduduk.
2) Kematian ibu dan bayi masih tinggi.
3) Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal.
4) Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) cara modern menurun.
5) Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) umur 15-19 tahun masih tinggi akibat rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal.
6) Pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.
7) Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk.
8) Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
9) Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik.

10) Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dengan akses terhadap air minum layak, dan sanitasi layak masih kurang.
11) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien.
12) Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.
13) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi, misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur.
14) Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di daerah perkotaan.
15) Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.
16) Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah.
17) Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.
18) Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah.
19) Kesenjangan mutu antar satuan pendidikan tinggi.

d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda

Dalam peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, isu strategis yang dihadapi antara lain :

1) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal.
2) Pengasuhan anak juga belum optimal.
3) Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif.
4) Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam
5) Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal.

e. Pengentasan kemiskinan

Dalam pengentasan kemiskinan, isu strategis yang dihadapi antara lain :

1) Laju penurunan kemiskinan cenderung melambat
2) Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan.
3) Kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

f. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Dalam hal peningkatan produktivitas dan daya saing, isu strategis yang dihadapi antara lain :

1) Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.
2) Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja.
3) Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja.

4) Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah.
5) Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri.
6) Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan
7) Capaian prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal dan belum didukung oleh budaya olahraga yang baik

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Isu strategis terkait agenda pembangunan ini terbagi kembali ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :

a. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa.

Terkait dengan ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa, isu-isu yang dihadapi antara lain :

1) Melemahnya ideologi Pancasila.
2) Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia.

Terkait dengan pemajuan kebudayaan Indonesia, isu-isu yang dihadapi antara lain :

1) Ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal.
2) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya.

c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti.

Terkait dengan pendidikan karakter dan budi pekerti, isu yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat terwujud dalam lingkungan sekolah

dan budaya belajar yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik.

2) Kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi.

d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama.

Isu yang dihadapi terkait hal ini adalah belum terwujudnya moralitas keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama. Selain itu, pelayanan terkait keagamaan, pengumpulan zakat, dan jaminan produk halal masing belum optimal.

e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan.

Isu yang dihadapi antara lain :

1) Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan.

2) Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial.

f. Belum optimalnya peran keluarga, khususnya dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga, antara lain :

1) Masih tingginya angka perkawinan anak.

2) Meningkatnya angka perceraian.

3) Masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan

g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Isu strategis yang dihadapi adalah rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat sementara tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah membutuhkan kemampuan literasi untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi

informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
   a. Infrastruktur pelayanan dasar

      Agenda pembangunan yang akan menjadi fokus dalam infrastruktur pelayanan dasar yaitu :

      1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, dengan isu yang dihadapi antara lain: keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.
      2) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan isu yang dihadapi yaitu belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman akibat masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari sistem penyediaan air minum (SPAM); belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman, dimana persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi; operasionalisasi instalasi pengolahan air limbah skala kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan; rendahnya jumlah instalasi pengolahan

lumpur tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal; masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis, fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas; belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang; serta implementasi perencanaan yang belum maksimal.

3) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, dengan isu strategis yaitu tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *too much, too little, too dirty*), serta permasalahan dalam pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.
4) Keselamatan dan keamanan transportasi, dengan isu strategis antara lain: tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh berbagai aspek, seperti kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan; kurangnya kelaikan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang meliputi sarana kereta, prasarana rel, sistem persinyalan, telekomunikasi dan listrik kereta api; belum efektifnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran, yaitu belum optimalnya kelaikan prasarana dan sarana, belum terbangun atau berjalannya sistem informasi dan tiket, serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pada otoritas dan operator layanan angkutan; serta masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan dalam aspek

pencarian dan pertolongan korban pada kejadian kecelakaan transportasi dan bencana.

5) Ketahanan kebencanaan infrastruktur, dengan isu strategis yaitu: kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana; tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana; proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air; serta penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi: kemampuan mengadopsi teknologi tahan bencana masih terbatas dan infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.
6) Waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dengan isu strategis antara lain: kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya; fungsi multiguna bendungan belum optimal; serta pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.

b. Infrastruktur ekonomi

1) Konektivitas jalan, dengan isu strategis yang dihadapi adalah ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah serta kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air; serta belum memadainya kualitas prasarana jalan dan masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk

mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan.

2) Konektivitas kereta api, dengan isu strategis antara lain: masih rendahnya peran kereta api dalam mendukung angkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota secara lebih cepat dan efisien; porsi angkutan barang yang diangkut oleh kereta api baru mencapai 2% dari jumlah barang yang diangkut oleh seluruh moda transportasi; masih terbatasnya peran kereta api dalam mendukung angkutan penumpang aglomerasi perkotaan dan koridor konurbasi kota-kota utama yang memiliki tingkat permintaan perjalanan antarkota yang tinggi; serta waktu tempuh tidak kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.
3) Konektivitas laut, dengan isu strategis yaitu: belum terwujudnya efisiensi kinerja angkutan logistik yang disebabkan oleh kinerja pelabuhan belum memenuhi standar (panjang dermaga, kedalaman kolam, dan alur pelayaran), jaringan pelayaran masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (hinterland), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan *hinterland*, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Di samping itu, armada kapal niaga dalam negeri masih didominasi oleh kapal berumur di atas 25 tahun. Isu strategis lainnya adalah kebutuhan peran angkutan laut yang lebih besar dalam menjangkau daerah kepulauan dan 3T dalam rangka mengurangi disparitas harga barang antar wilayah. Moda angkutan laut yang melayani wilayah 3T masih belum mengoptimalkan keterpaduan antarmoda transportasi termasuk moda jalan, angkutan perintis darat, dan

udara. Keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T juga disebabkan oleh belum memadainya fasilitas pelabuhan termasuk ketersediaan peralatan bongkar muat.

4) Konektivitas udara, dengan isu strategis antara lain: belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandarabandara utama; peran angkutan udara perintis belum optimal dalam mendukung pergerakan penumpang dan distribusi barang yang dapat menjangkau daerah 3T; prasarana lapangan terbang kecil (airstrip) untuk mendukung angkutan di wilayah 3T kondisinya kurang memadai, belum dikelola dengan baik, serta belum memenuhi standar keselamatan; peran angkutan udara, kualitas pelayanan bandara, serta rute angkutan udara untuk mendukung sektor pariwisata masih terbatas; serta pengembangan bandara perairan (*waterbased airport*) dalam mendukung peningkatan destinasi pariwisata perairan belum berkembang .

c. Infrastruktur perkotaan

Isu strategis terkait infrastruktur perkotaan adalah sebagai berikut :

1) Transportasi perkotaan

Isu strategis transportasi perkotaan adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum masal perkotaan di kota-kota besar sehingga pangsa angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia menjadi rendah. Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Upaya pengembangan angkutan umum masal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi dan berdaya jangkau di luar batas administrasi kota/daerah. Di samping itu, kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai

untuk membangun sistem angkutan umum masal perkotaan yang modern.

2) Energi dan ketenagalistrikan perkotaan

   Isu yang dihadapi terkait dengan energi dan ketenagalistrikan perkotaan adalah peningkatan kebutuhan listrik perkotaan masih didominasi dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan, serta belum optimalnya diversifikasi sumber penyediaan listrik.

3) Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan

   Pengembangan kota cerdas belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan TIK di berbagai kota di tanah air saat ini masih rendah akibat penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal dan pemanfaatan akses nirkabel oleh masyarakat lebih banyak dipergunakan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah atau kegiatan yang produktif.

4) Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan

   Isu yang dihadapi terkait akses air minum dan sanitasi adalah masih lemahnya penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/ sawah/sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun) sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan stunting, serta pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah skala kota dan penyediaan

layanan pengolahan lumpur tinja (Fecal Sludge Management) belum optimal.

5) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan

   Isu yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal

d. Energi dan Ketenagalistrikan

   Isu strategis terkait energi dan kelistrikan adalah sebagai berikut :

   1) Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan

      Isu yang dihadapi terkait hal ini adalah sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara, dan gas bumi) sementara ketersediaan energi fosil dari waktu ke waktu semakin terbatas. Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari target bauran EBT sesuai dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan juga masih besar akibat belum berkembangnya pengelolaan kualitas bahan bakar, penggantian mesin dan perangkat lunak untuk perangkat kontrol, serta belum berkembangnya pembangkit listrik yang menggunakan teknologi batubara yang lebih bersih.

   2) Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan

      Terkait akses, isu yang dihadapi adalah masih rendahnya keandalan akses listrik di Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya rasio gangguan tahunan, masih ada penduduk menggunakan kayu bakar karena pertimbangan harga dan keterjangkauan pelayanan, serta kebijakan subsidi energi untuk

menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil belum tepat sasaran sehingga konsumsi energi cenderung belum efisien.

3) Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan

Penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain akibat pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas. Selain itu, tata kelola industri ketenagalistrikan masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efisien dan berkembang. Juga pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi masih menjadi tantangan

e. Transformasi digital

Isu strategis dalam transformasi digital terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu :

1) Penuntasan infrastruktur TIK

Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur TIK perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) dan jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband). Tingkat kecepatan jaringan tetap dan jaringan bergerak pitalebar di Indonesia masih rendah serta jangkauannya masih terbatas. migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran, khususnya televisi.

Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (digital divident).

2) Pemanfaatan infrastruktur TIK

Dalam hal pemanfaatan, isu yang dihadapi yaitu masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyak data yang belum teringrasi sehingga membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Penerapan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan khususnya di perdesaan masih belum maksimal sehingga pemerataan kualitas pendidikan melalui TIK masih belum efektif. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan juga masih belum optimal, dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti telemedicine, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif. Pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim. Pemanfaatan TIK di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif juga masih perlu dikembangkan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

3) Fasilitas pendukung transformasi digital

Dalam hal fasilitas pendukung dan transformasi digital, hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan literasi digital masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi. Sebagai tambahan, juga perlu adanya pengembangan SDM TIK, peningkatan keamanan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi masyarakat.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Dalam aspek kualitas lingkungan hidup, isu yang dihadapi antara lain :

1) Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup, seperti berkurangnya tutupan hutan.
2) Kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan akan meningkat hingga 2030 akibat ketidakseimbangan neraca air, kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis, serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan.
3) Luas habitat ideal satwa langka terancam punah.
4) Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal.
5) Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup serta upaya penegakan hukum terhadap kasuskasus SDA dan lingkungan hidup terkendala akibat beragamnya tipologi kejahatan, skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi, besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan, serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

Isu yang dihadapi berkenaan dengan ketahanan bencana dan iklim antara lain: tingginya risiko bencana di Indonesia akibat karakteristik geologi Indonesia yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif, kurang optimalnya pemahaman masyarakat terhadap informasi bencana, jangkauan pelayanan informasi bencana belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan bencana, peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometereologi akibat perubahan iklim dan variabilitas iklim ekstrem jangka pendek, serta masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah.

c. Pembangunan rendah karbon

Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon memerlukan transisi penanganan perubahan iklim dari semula hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK menjadi penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui platform pembangunan rendah karbon. Selain itu, juga diperlukan adanya dukungan terhadap pembangunan rendah karbon, yaitu komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional, bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak dan keterlibatan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kondusivitas dan stabilitas politik nasional juga perlu menjadi perhatian. Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi. Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
   a. Konsolidasi demokrasi

      Isu yang dihadapi terkait konsolidasi demokrasi yaitu :

      1) Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
      2) Biaya politik tinggi mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
      3) Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2024 memiliki konsekuensi dalam pembiayaan dan kondisi keamanan wilayah.

4) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
5) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
1) Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah yang masih dirundingkan, baik penetapan batas laut dan penegasan batas darat, untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Selain itu, Pemerintah juga masih menghadapi ancaman transnasional, seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga IUUF.
2) Belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan–Selatan. Untuk itu, perlu penguatan kerja sama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi. Kelembagaan pelaksana pemberian bantuan dan kerja sama pembangunan internasional diperkuat, serta sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru harus dikembangkan. Partisipasi aktor non pemerintah, terutama pihak swasta juga perlu ditingkatkan, dalam upaya memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta

meningkatkan citra dan pengakuan produk nasional secara global.

3) Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya, seperti: kuliner, kebhinekaan, dan toleransi, guna meningkatkan citra positif Indonesia di pergaulan internasional. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.
4) Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total. Penataan peran dan fungsi K/L diperlukan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan luar negeri.

c. Penegakan hukum nasional

Indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan meski pembangunan hukum telah dilakukan. Hal tersebut akibat masih lemahnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (overcrowding) hingga 103 persen. Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

d. Reformasi birokrasi dan tata kelola

1) Instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik masih sangat sedikit. Hirarki eselonisasi membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien. Jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Selain itu, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Juga diperlukan perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Terakhir dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.5/2014 tentang ASN.
2) Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat dan Lembaga Non Struktural. Tumpang tindih tersebut disebabkan oleh belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Fragmentasi tugas dan fungsi mempersulit pola koordinasi antarlembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan satu data indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.
3) Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan, dimana mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Terkait pelayanan terpadu, perlu adanya pelimpahan/pendelegasian kewenangan pelayanan kepada mal pelayanan publik dan unit pelayanan publik (UPP) di desa, kelurahan, dan kecamatan.

Persoalan lain adalah belum adanya integrasi proses bisinis dan pemanfaatan data terpadu dalam penyediaan layanan. Selain itu, penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (e-service) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam.

4) Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu, perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Juga perlu adanya sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

e. Menjaga stabilitas keamanan nasional dinamika ancaman pertahanan

   Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun terdapat upaya proliferasi senjata pemusnah massal, trend pengadaaan persenjataan di regional Asia masih tinggi. Pada lingkup nasional pertahanan negara masih dihadapkan pada gangguan kedaulatan di wilayah tertentu.

f. Dukungan industri pertahanan belum optimal

   Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Untuk itu, perlu adanya penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam industri pertahanan.

g. Dinamika ancaman siber

   Penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber yang dapat meningkatkan ancaman keamanan nasional. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.

h. Indonesia menjadi negara tujuan peredaran gelap narkotika

   Pasar narkotika di Indonesia menarik sindikat internasional karena jumlah penduduk yang besar dan harga jual yang tinggi. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk penyelundupan narkotika. Penyelundupan paling rentan terjadi di laut karena terbatasnya pengawasan di wilayah perbatasan.

i. Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan

   Terbatasnya infrastruktur dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi penyebab tingginya kasus kejahatan. Di samping itu, pelanggaran di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Perairan Natuna juga menjadi salah satu ancaman nyata bagi hak berdaulat Indonesia untuk mengeksplorasi SDA. Ancaman lainnya adalah konflik di negara lain yang memaksa terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia

j. Rendahnya rasa aman di lingkungan masyarakat

   Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan perdagangan manusia masih relatif tinggi. Di samping itu, perempuan dan anak korban kekerasan juga memerlukan penanganan khusus

k. Tingginya angka kejahatan dan pelanggaran hukum di laut

   Penegakan hukum yang belum optimal berdampak pada tingginya perompakan dan penyelundupan. Selain itu, tindak pidana terkait sumber daya alam juga masih tinggi berupa IUUF dan pembuangan sampah atau limbah ke laut. Untuk merespon permasalahan di atas diperlukan penguatan regulasi, infrastruktur, dan kelembagaan yang

mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut

l. Sarana penyebaran paham radikal semakin beragam

Meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

m. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target TPB/SDGs di tahun 2030. Beberapa kendala masih dihadapi di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan 17 tujuan dalam TPB/SDGs.

4.2.2. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam tiga tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

   Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36 persen (c to c), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2021 yang sebesar 2,63 persen (c to c). Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,94 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,97 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,54 persen. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar 5,57 persen menurun 0,38 persen poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95 persen. Pengaruh lainnya adalah pada Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan November 2022 sebesar 105,26 tertinggi di Pulau Jawa namun menurun 0,38 persen dibandingkan dengan bulan Oktober 2022 yang sebesar 105,66.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana mendorong upaya menuju pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kedepan.

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing.

Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan 8 (delapan) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif

   Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, dan globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (new normal). Pembangunan SDM Jawa Tengah kedepan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

   Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

   Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari

59,12 di tahun 2020 menjadi 55,24 di tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 91,94 pada 2017 menjadi 92,48 pada 2021, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017 menjadi 8,97 pada 2021, serta angka pernikahan usia anak masih tinggi yaitu 13.595 perkawinan.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

   Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat. Namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki potensinya semakin terbatas, serta daya dukung daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2021 sebesar 67,48, masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas kerentanan ketahanan iklim. Selain tekanan lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi risiko bencana tingkat sedang hingga tinggi meskipun hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan tingkat risiko yang

terus turun dari 157,73 pada tahun 2015 menjadi 125,73 pada tahun 2021.

4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

   Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

   Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajamen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial.

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya pada ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut: (1) kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin, (2) ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga, dan (3) ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 10,28% dari sebelumnya 9,55% di tahun 2019. Pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan lagi sebesar 0,4 point sehingga menjadi 10,68%, hal tersebut sebagai efek Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 angka kemiskinan turun 0,83 point menjadi 9,85%.

Isu utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar adalah bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan adalah sebuah lingkaran yang terus berulang akibat ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya serta terbatasnya kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga terus terjebak dalam kemiskinan, maka isu terkait pengentasan kemiskinan yang akan diangkat untuk pembangunan selama tiga tahun ke depan adalah masih harus ditingkatkannya kualitas penanganan kawasan kumuh, ketersediaan infrastruktur dasar (air bersih, air

minum dan sanitasi), ketersediaan perlindungan sosial dan kualitas pembangunan desa.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

   Isu strategis berikutnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat, sehingga : masih harus ditingkatnya kualitas pendidikan dasar, perlunya transformasi pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat masyarakat, rendahnya budaya literasi, rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya prestasi pemuda dan olahraga ditingkat regional provinsi dan Nasional.

   Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2022 sebesar 76,58; usia harapan hidup sebesar 77,64 tahun; harapan lama sekolah sebear 13,70 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,79 tahun.

3. Daya Saing Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu perhatian utama lainnya setelah kemiskinan dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh luas ke banyak sektor. Sebagaimana terjadi di tahun 2020, dengan jatuh bebasnya laju pertumbuhan ekonomi daerah ke -1,87% akibat Covid-19 telah menjadikan PDRB per kapita ikut menurun, meningkatkan pengangguran terbuka, meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan lainnya.

4. Reformasi Birokrasi

   Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran

masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Komponen pembentuk isu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi" yaitu :

a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan

   Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningatan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perecanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini.

b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*)

   Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (smart city) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):

   1) *Smart Governance* (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis *real time data*);
   2) *Smart Economy* (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfatan *e-commerce*);
   3) *Smart Mobility* (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);

4) *Smart Environment* (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, *green building*);
5) *Smart Branding* (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);
6) *Smart People* (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan *skill* yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
7) *Smart Living* (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik).

c. Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/ DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel.

d. Inovasi Daerah

Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. *Spirit* SDGs menempatkan pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan sumber daya, melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penilaian indek inovasi daerah, selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Karanganyar masuk dalam kategori kabupaten kurang inovatif, dan tahun 2021 mulai masuk kategori Kabupaten inovatif.

e. Pemerintah yang Kolaboratif

   Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas – Akademisi–Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan.

f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan

   Pemerintahan yang hadir menjaga konsusivitas daerah dan memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif diperlukan dalam kondisi sekarang. Kehadiran pemerintah sangat strategis di era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial. Peran pemerintah dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (*pro poor*), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal.

g. Isu Kualitas Pelayanan Publik

   Pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi menjadi keharusan dan kebutuhan yang mendesak. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif.

h. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN

Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel yang mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, hubungan yang harmonis dan sinergis pemerintah daerah (birokrasi) dengan, dunia usaha (masyarakat ekonomi), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media diperlukan dalam reformasi birokrasi.

5. Daerah Rawan Bencana

Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan *premapping* dan revisitator ruang.

Pengembangan sistem layanan bencana yang reponsif, cepat, dan tepat menjadi isu penting. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana penanganan bencana. Hal strategis lainnya adalah jaringan kerja sama di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani resiko bencana. Pengembangan masyarakat kelurahan tangguh bencana.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, memiliki tingkat kerawanan tinggi yang rentan terjadinya bencana. Penyebab terjadinya bencana diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Potensi bencana di Kabupaten Karanganyar adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Isu strategis dalam penanganan daerah rawan bencana ini antara lain masih sedikitnya desa tangguh bencana yang terbentuk. Desa Tangguh Bencana merupakan desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Tabel 4.1.

Keterkaitan antara agenda pembangunan Nasional dengan
Isu Strategis Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar

RPJPN 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi Jawa Tengah	RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sumber daya manusia yang berakhlak mulia, bermoral, ber etika, berbudaya, dan beradab; 2. Daya saing untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Tata kelola peme rintahan, Apara tur, birokrasi, demokrasi, hukum dan keadilan, masyarakat sipil; 4. Keamanan, perdamaian, bebas ancaman; 5. Pemerataan dan keadilan pembangunan; 6. Lingkungan yang asri dan lestari; 7. Kemandirian, kemajuan dan ketahanan negara sebagai negara kepulauan; 8. Peran Indonesia di kancah internasional.	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif; 3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis;	1. Kemiskinan 2. Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Daya Saing Ekonomi 4. Reformasi Birokrasi 5. Daerah Rawan Bencana

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

BAB V.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini.

Sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetititf.

Untuk mencapai visi Pembangunan Daerah yang telah ditentukan, arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama kurun waktu dua puluh tahun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat, melalui :
    a. Pembangunan pendidikan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada peningkatan pemerataan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
    b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas untuk menunju standar nasional dan internasional.
    c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan.
    d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
    e. Pembangunan olahraga difokuskan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya olahraga bagi masyarakat dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat jasmani dan rohaninya.
    f. Terwujudnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulai dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, melalui :
    a. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan potensi lokal.
    b. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.
    c. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan tidak

diskriminatif, serta mengembangkan BUMD yang mengarah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d. Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

e. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :

a. Dalam mewujdukan kedewasaaan politik masyarakat perlu peningkatan pemahaman politik yang desentralisasi dan pendidikan politik, sehingga tidak menimbulkan euforia politik.

b. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.

c. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan daerah.

d. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas produk hukum.

e. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah.

f. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter yang baik.

g. Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah.

h. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :
   a. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *acceptabilitas* bagi kaum difabel.
   b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah.
   c. Pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum.
   d. Pembangunan listrik diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya.
   e. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
   f. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap persampahan dan drainase.
   g. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender, melalui :
   a. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk, sehingga tercipta kondisi penduduk yang terkendali dan sejahtera.
   b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan.
   c. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan dan nyata serta mudah dilakukan.

d. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan nenek moyang kita.
e. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin.
f. Peningkatan peran serta masyarakat terus kita pacu atau didorong dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.
g. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM dalam menghadapi hidup setiap harinya.

6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif, melalui :
   a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
   b. Potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan. Untuk itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah.
   c. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri.
   d. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka untuk mengembang pencapaian visi Pembangunan jangka Panjang Daerah, maka dirumuskanlah agenda Pembangunan jangka Panjang yang disusun berdasarkan pada substansi misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Setiap agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Lima Tahun Keempat (Tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat, melalui :

a. Memantapkan perluasan mutu pendidikan dan budaya lokal, yang ditandai dengan :
   1) Memantapnya relevansi daya saing
   2) Pemantapan Wajar 9 tahun
   3) Pemantapan tuntas Wajar
   4) Pemantapan sekolah bertaraf Internasional
   5) Pemantapan Kabupaten Vokasi
   6) Pemantapan sekolah standar nasional
b. Peningkatan derajad kesehatan dalam rangka memantapkan penataan kembali pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang dengan penekanan pada kualitas daya saing/kompetitif kesehatan, yang ditandai dengan menurunnya angka kematian : AKI per 100.000 KH : < 50; AKB per 1.000 KH: 6,3; AKABA per 1.000 KH : < 1 dan UHH (tahun) : >72
c. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral ditandai dengan semakin tangguhnya jatidiri moral dan kesetiakawanan berdasarkan Pancasila
d. Pelestarian bilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jatiditi dalam pergaulan nasional dan internasional
e. Pemanfaatan penguasaan IPTEK di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, melalui :
   a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat
   b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk sektor ekonomi yang strategis, berkuaitas dan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
   c. Pemantapan kelembagaan ekonomi, kualitas produk dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar gobal

d. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan Iptek dan jejaring kelembagaan di pasar global
e. Pemanfaatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultra, perkebunan, perikanan, peternakan dan perhutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor
f. Memantapkan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat ekonomi daerah
g. Pemanfaatan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
h. Pemantapan pengembangan sektor industri, jasa, UMKM serta koperasi diarahkan memperkuat basis industri yang tangguh
i. Mantapnya investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja
j. Pemantapan iklim usaha yang tangguh, prospektif, nyaman utamanya bagi koperasi dan usaha kecil

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :
   a. Pemantapan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring
   b. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip pemerintahan yang baik
   c. Pemantapan profesional, kesadaran tanggung jawab, sikap mental, berbudi luhur bagi aparatur daerah
   d. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada seluruh bidang pelayanan
   e. Pemantapan proses demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM
   f. Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pengembangan wilayah

g. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Karanganyar, dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi
h. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif
i. Pemantapan upaya-upaya perdebatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :
   a. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kepentingan umum yang ditandai dengan :
      1) pemantapan pembanguan jalan kabupaten,
      2) pemantapan pembangunan jalan desa,
      3) meningkatnya jaringan prasarana pendukung
   b. Pemantapan swadaya masyarakat dalam peningkatan kalitas lingkungan pemukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga miskin
   c. Pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar pedesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan serta pengendaian banjir dan kekeringan
   d. Mantapnya cakupan pelayanan administrasi pertanahan, melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan
   e. Pemantapan penataan tata ruang dan pranata ekonomi yang tertata dan dinamis dalam mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan perubahan daerah
   f. Pemantapan sistem sarana dan prasarana telekomunikasi yang mendukung kemajuan teknologi komunikasi untuk mendukung kemajuan daerah
   g. Pemantapan rasio elektrifikasi melalui cakupan pelayanan kelistrikan untuk memacu pertumbuhan sektor industri dan jasa,

sehingga dapat memacu kemajuan daerah dengan cepat dan tepat, adil dan sejahtera

h. Pemantapan pemanfaatan ruang wilayah didukung oleh penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender,melalui :
   a. Pemantapan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak
   b. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas
   c. Memantapkan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi penduduk miskin
   d. Pemantapan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum
   e. Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan kepastian hukum
   f. Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadlian gender
   g. Pemantapan derajat kesehatan dan kualits kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetititf
   a. Memanfaatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam dan penegakan terhadap hukum lingkungan hidup
   b. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan di kawasan lindung

c. Pemanfaatan sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati
d. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan
e. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh Kabupaten Karanganyar dan tetap waspada dan mantap menjaga mitigasi bencana alam
f. Pemantapan aplikasi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang utamanya penetapan luasan kawasan lindung sebesar 20%

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatkan Daya Saing Daerah"

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Tabel 5.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah Pada
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatkan daya saing	Pertumbuhan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
		perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Ekonomi
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023

Korelasi antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Misi 4 Mewujudkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan masyarakat Karanganyar yang berkualitas unggul
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Misi 2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan dukungan teknologi maju dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Misi 3 Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (good governance) Misi 5 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bersatu, dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Misi 6 Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal / lestari dengan tetap menjaga kelestarian eksistensi lingkungan yang harmonis dan kompetitif

Sumber **:** *BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023*

Keselarasan tujuan pembangunan dalam RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan agenda pembangunan jangka menengah nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 dengan Arah Kebijakan dalam
RPJPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2005-2025

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	**Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026**	**Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025**
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Mewujudkan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui : a. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang acceptabilitas bagi kaum difabel. b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dirahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah. c. Pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum. d. Pembangunan listrik diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. e. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. f. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap persampahan dan drainase. g. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan.
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat, melalui : a. Pembangunan pendidikan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada peningkatan

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
		pemerataan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah. b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas untuk menunju standar nasional dan internasional. c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan. d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan. e. Pembangunan olahraga difokuskan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya olahraga bagi masyarakat dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat jasmani dan rohaninya. f. Terwujudnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulai dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, melalui : a. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan potensi lokal. b. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. c. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mengembangkan BUMD yang mengarah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). d. Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
		e. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi globalisasi.
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui : a. Dalam mewujdukan kedewasaaan politik masyarakat perlu peningkatan pemahaman politik yang desentralisasi dan pendidikan politik, sehingga tidak menimbulkan euforia politik. b. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. c. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan daerah. d. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas produk hukum. e. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah. f. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter yang baik. g. Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah. h. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
		Mewujudkan kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender, melalui : a. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk, sehingga tercipta kondisi penduduk yang terkendali dan sejahtera. b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan. c. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan dan nyata serta mudah dilakukan. d. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan nenek moyang kita. e. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin. f. Peningkatan peran serta masyarakat terus kita pacu atau didorong dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. g. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM dalam menghadapi hidup setiap harinya.
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif, melalui : a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. b. Potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan. Untuk itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah. c. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, dunia

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
		usaha dan industri. d. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

Sumber **:** *BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023*

Tabel 5.4.
Keselarasan antara Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 dengan Agenda dan Tujuan Agenda Pembangunan
Dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor
	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Menyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah
	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter
	Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan	Mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan perkotaan
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Sumber **:** *BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023*

Tabel 5.5.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Tujuan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Sasaran 1 Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
		Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, berkarakter, dan adaptif
		Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Sasaran 1 Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
		Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Sasaran 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis
		Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Sasaran 3 Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sumber **:** *BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023*

Tabel 5.6.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,617	3,700	3,750	3,800	3,850	3,850
		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,58	76,80	77,20	77,40	77,68	77,68
		Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	65	67	70	70

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	91,51	90	82	81	80	80

Sumber : BAPERLITBANG, 2022

Tabel 5.7.

Cascading Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

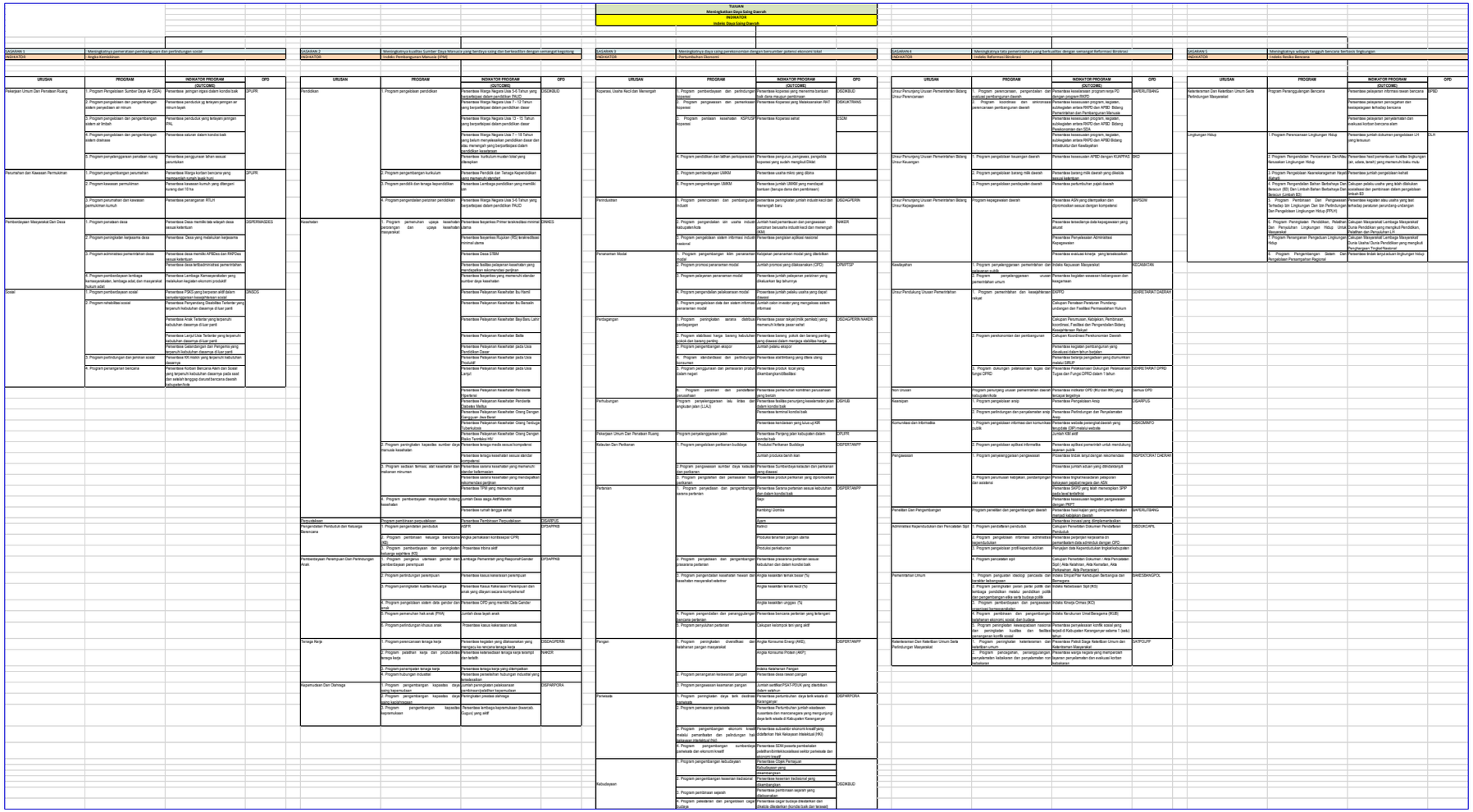

BAB VI.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, dilakukan dengan :
   a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan.
   b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial dan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan, dilakukan dengan :
   a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.
   b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak
   c. Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri.
   d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga

3. Peningkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, dilakukan dengan Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pembangunan dan perawatan jalan serta penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan,

peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah.

4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi dilakukan dengan :
   a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah.
   b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.
   c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemanan dan ketertiban umum

5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan dilakukan dengan Meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025 yaitu “Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat”. Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karnganyar tahun 2024-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut dalam pencapaiannya ditetapkan alternatif upaya strategi pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan agar fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Arah kebijakan RPD ditetapkan selama 3 (tiga)

tahun perencanaan dengan model target tahapan setiap tahunnya yang akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD). Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2024-2026. Gambaran arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.

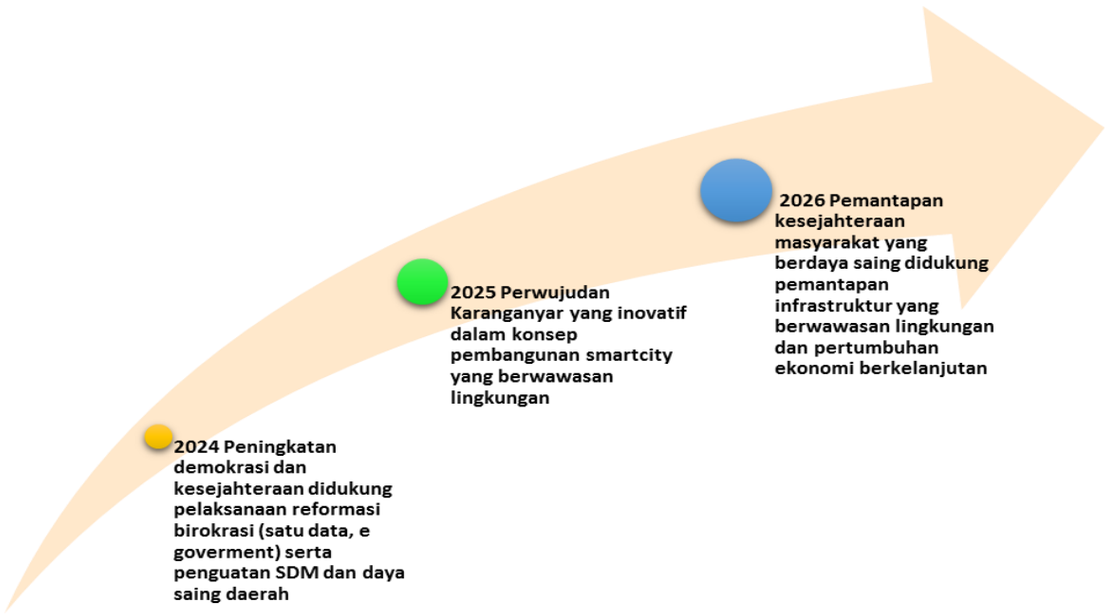

Gambar 6.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah **Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya saing daerah.** Prioritas pada tahun 2024 adalah :

1. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi,** difokuskan pada :
   a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan *Electronic Government* (*E-Gov*) dan keamanan informasi daerah;
   b. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;

c. Peningkatan pengelolaan arsip digital;
d. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
e. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
f. Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
g. Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

2. **Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
   c. Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

3. **Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   b. Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
   c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
   d. Pengembangan budaya literasi masyarakat;

e. Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
g. Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

4. **Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem** difokuskan pada :
   a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
   b. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
   c. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan *branding*;
   d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
   e. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
   f. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
   g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
   h. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja;
   i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan kualitas sarpras daya tarik wisata dan desa wisata.

5. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,** difokuskan pada :
    a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
    b. Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
    c. Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
    d. Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi.

Arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah **Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan.** Prioritas pada tahun 2025 adalah :

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan,** difokuskan pada :
    a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
    b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce;
    c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
    d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
    e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri;
i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan lembaga kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata.

2. **Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi**, difokuskan pada :
   a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
   b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
   c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
   d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.

3. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup,** difokuskan pada :
   a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
   b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
   c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST.

4. **Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing,** difokuskan pada :
   a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga;

b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;
d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

5. **Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar;
   b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
   c. Pengembangan pengelolaan arsip digital;
   d. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
   e. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
   f. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
   g. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6. **Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan**, difokuskan pada :
    a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
    b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
    c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
    d. Pengembangan kerjasama antar desa.

Arah kebijakan tahun ketiga (2026) adalah **Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing didukung pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.** Prioritas pada tahun 2026 adalah :

1. **Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya,** difokuskan pada :
    a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan indikator keluarga sehat, pengurangan stunting, dan mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    b. Pengendalian penduduk melalui penguatan calon pengantin untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
    c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi;
    d. Peningkatan budaya literasi masyarakat;
    e. Peningkatan peran pemuda disegala aspek pembangunan dibidang ekonomi sebagai wirausaha muda, bidang sosial dan budaya;
    f. Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi;
    g. Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
    h. Perwujudan Kabupaten layak anak dan responsive gender

2. **Pemantapan Infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,** difokuskan pada :

a. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas pelayanan angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
b. Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
c. Peningkatan akses sanitasi layak dan akses air minum pada masyarakat;
d. Optimalisasi pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung produktivitas tanaman pangan dan penanganan banjir.

3. **Pemantapan kualitas lingkungan hidup,** difokuskan pada :
   a. Optimalisasi Penurunan emisi gas rumah kaca;
   b. Peningkatan pengawasan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
   c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST dan pengurangan sampah dengan sistem 3 R.

4. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas yang dititikberatkan pada peningkatan produktivitas berkelanjutan dan pengembangan agro industri;
   b. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan melalui kolaborasi dengan e commerce;
   c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
   d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
   e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal

Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui sinergi dan kerjasama intervensi antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak swasta;
g. Optimalisasi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan pasar;
i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata.

5. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas dan kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan smart city (kabupaten pintar);
   b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
   c. Pemantapan pengelolaan arsip digital;
   d. Pemantapan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
   e. Pemantapan kualitas dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
   f. Pemantapan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta penguatan pendidikan politik masyarakat;
   g. Pemantapan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

6. **Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan kewilayahan,** difokuskan pada :
   a. Peningkatan desa kategori mandiri;
   b. Peningkatan Pengelolaan BUMDes
   c. Peningkatan Pengelolaan BUMDesma;

d. Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
e. Peningkatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan terintegrasi.

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program mendasari pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, diantaranya :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
2. Penanganan dan pencegahan stunting
3. Pembangunan Kabupaten Karanganyar tematik
4. Penguatan ketahanan pangan daerah
5. Peningkatan infrastruktur menyeluruh
6. Perwujudan ketangguhan bencana
7. Peningkatan daya saing SDM yang berkarakter dan adaptif
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif

Beberapa kebijakan yang membutuhkan peran semua stakeholder yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan isu yang *cross cutting* disemua perangkat daerah. Pengembangan inovasi ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian target dalam pembangunan.
2. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu yang memerlukan peran semua stakeholder.

3. Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi yang harus dilaksanakan disemua perangkat daerah untuk mengurangi kesenjangan gender.

Secara ringkas program prioritas yang akan menggambarkan strategi pembangunan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dam Program Pembangunan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal akses, dan pembangunan kawasan strategis pedesaan.	1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 5. Program penataan bangunan gedung 6. Program pengembangan jasa konstruksi 7. Program penyelenggaraan penataan ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				1. Program pengembangan perumahan 2. Program kawasan permukiman 3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 5. Program peningkatan	Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	
				1. Program penataan desa 2. Program peningkatan kerjasama desa 3. Program administrasi pemerintahan desa 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial	1. Program pemberdayaan sosial 2. Program rehabilitasi sosial 3. Program perlindungan dan jaminan sosial 4. Program penanganan bencana 5. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pencegahan stunting, budaya literasi, dan	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pengembangan kurikulum 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pengendalian perizinan pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
			mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.		
				1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program pembinaan perpustakaan	Perpustakaan
				1. Program pengendalian penduduk 2. Program pembinaan keluarga berencana (KB) 3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif gender, penanganan	1. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan 2. Program perlindungan perempuan 3. Program peningkatan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
			kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak	kualitas keluarga 4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program perlindungan khusus anak	
			Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri	1. Program perencanaan tenaga kerja 2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 3. Program penempatan tenaga kerja 4. Program hubungan industrial	Tenaga Kerja
			Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga	1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Kepemudaan dan olahraga
		Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber	Meningkatkan daya saing perekonomian melalui peningkatan akses jalan dalam	1. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam 2. Program pengawasan dan	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
		potensi ekonomi lokal	memperlancar lalulintas ekonomi, penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan realisasi investasi, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah.	pemeriksaan koperasi 3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 6. Program pemberdayaan UMKM 7. Program pengembangan UMKM	
				1. Program perencanaan dan pembangunan industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian
				1. Program pengembangan iklim penanaman modal 2. Program promosi penanaman modal 3. Program pelayanan penanaman modal 4. Program pengendalian pelaksanaan modal 5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Penanaman Modal
				1. Program perizinan dan	Perdagangan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				pendaftaran perusahaan 2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 4. Program pengembangan ekspor 5. Program standardisasi dan perlindungan konsumen 6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
				Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
				Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				1. Program pengelolaan perikanan budidaya 2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan
				1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana	Pertanian

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				pertanian 3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 5. Program penyuluhan pertanian	
				1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2. Program penanganan kerawanan pangan 3. Program pengawasan keamanan pangan	Pangan
				1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan interlektual (HKI) 4. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
				1. Program pengembangan kebudayaan	Kebudayaan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				2. Program pengembangan kesenian tradisional 3. Program pembinaan sejarah 4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
		Meningkatknya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah	1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Perencanaan
				1. Program pengelolaan keuangan daerah 2. Program pengelolaan barang milik daerah 3. Program pengelolaan pendapatan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Keuangan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				Program kepegawaian daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Kepegawaian
				1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kewilayahan
				1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 2. Program perekonomian dan pembangunan 3. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
				1. Program pengelolaan arsip 2. Program perlindungan dan	Kearsipan

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				penyelamatan arsip	
				1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Program pengelolaan aplikasi informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Inspektorat Daerah
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Program pendaftaran penduduk 2. Program pencatatan sipil 3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 4. Program pengelolaan profil kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan	1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui	Unsur Pemerintahan Umum Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
			kelembagaan politik, peningkatan kemanan dan ketertiban umum	pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
				1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan.	Program penanggulangan bencana	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2024 -2026	Strategi	Program	Urusan
				1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 9. Program pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan irigaspemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, maka disusunlah Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Susunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah tersebut terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
4. Urusan Pilihan;
5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
6. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
8. Unsur Kewilayahan;
9. Unsur Pemerintahan Umum;

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022-2023 dikelompokan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: ***Sustainable Development Goals***), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati;

kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini Program pembangunan Kabupaten Karanganyar :

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan, Program ini diarahkan pada pelaksanaan SPM bidang pendidikan pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
b. Program Pengembangan Kurikulum, Program ini diarahkan pada penyusunan muatan lokal yang akan disampaikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal diperlukan agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa saja kearifan lokal yang ada, sehingga bisa dilestarikan dan dipraktekkan.
c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan pamong budaya serta pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SD dan SMP. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang menjadi

kewenangan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Program ini difokuskan untuk pelaksanaan SPM.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program ini diarahkan pada penyebaran dan pemenuhan tenaga kesehatan yang merata disetiap fasilitas kesehatan dasar.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program ini diarahkan pada manajemen sumber daya air sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan..
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat. Program ini dalam rangka pemenuhan SPM
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program ini diarahkan pada fasilitasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Program ini dalam rangka pemenuhan SPM
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas drainase.
e. Program Pengembangan Permukiman, Program ini diarahkan pada pengembangan luasan permukiman
f. Program Penataan Bangunan Gedung, Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah.

g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam RTRW.
h. Program Penyelenggaraan Jalan, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan untuk mempermudah akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini diarahkan pada pembinaan tenaga kerja dibidang jasa konstruksi dalam meningkatkan kapasitasnya.
j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program ini diarahkan pada penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan,Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang tekena bencana dan relokasi program pemerintah daerah.
b. Program Kawasan Permukiman,Program ini diarahkan pada mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dalam penataan kawasan permukiman
c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program ini diarahkan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum,Program ini diarahkan pada pengendalian gangguan trantibum yang dilakukan oleh masyarakat. Program ini difokuskan pada pencapaian SPM
b. Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar pelayanan Minimal kebakaran

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial, Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
b. Program Rehabilitasi Sosial, Program ini diarahkan pada pelayanan terhadap PPKS yang berada diluar panti sosial. Program ini difokuskan pada penanganan SPM
c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar
d. Program Penanganan Bencana, Program ini diarahkan pada pemenuhan pemenuhan sandang dan pangan korban bencana.
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program ini diarahkan pada pemenuhan fasilitas yang harus disediakan pada makam pahlawan sesuai dengan standar.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dukumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana
b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja terampil dan terlatih melalui sertifikasi keahlian.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
d. Program Hubungan Industrial, Program ini diarahkan pada penyelesaian sengketa terkait perburuhan, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di OPD.
b. Program Perlindungan Perempuan, Program ini diarahkan pada penanganan terhadap perempun yang menjadi korban kekerasan.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dengan fokus penguatan kelembagaan PUSPA, dan jaringan lainnya dalam peningkatan kualitas keluarga.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap OPD, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender..

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak ditingkat kecamatan.
f. Program Perlindungan Khusus Anak, Program ini diarahkan pada penanganan anak yang menjadi korban kekerasan

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfataan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan pangan
c. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan difokuskan pada penyelesaian sengketa tanah
b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada pemberian ganti kerugian
c. Program Penatagunaan Tanah, difokuskan pada penatagunaan tanah dalam pelakanaan PTSL

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udata
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah

B3), difokuskan pada penaatan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada peningkatan kapasitas masayarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklim
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat
i. Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3R dan penanganan kebersihan kabupaten

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada pelayanan KK dan akte kelahiran
b. Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada pelayanan e KTP, kartu identitas anak, akta cerai
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada pengelolaan infomasi administrasi kependudukan catatan sipil
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada penyusunan profil kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Desa, difokuskan pada penataan desa
b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada fasilitasi kerja sama antar desa

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan desa/kelurahan

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk, difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), difokuskan pada pelayanan keluarga berencana
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada pelayanan informasi publik
b. Program Aplikasi Informatika, difokuskan pada peningkatan *smart city*

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, difokuskan pada pembinaan simpan pinjam
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan penilaian kesehatan koperasi

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan peningkatan kapasitas koperasi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro
g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada pengembangan Usaha mikro untuk bisa naik kelas

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal
b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada peningkatan promosi
c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada pelayanan penanman modal yang mudah
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada pengendalian penanaman modal
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, difokuskan pada penyediaan data sektoral statistik

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi, difokuskan pada penyediaan dan pengamanan informasi daerah

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada pengembangan pemajuan kebudayaan
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional
c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada peningkatan kualitas SDM sejahtera dan pelestarian sejarah
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada pelestarian cagar budaya

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Perpustakaan, difokuskan pada pengembangan budaya literasi

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Arsip, difokuskan pada peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, difokuskan pada pemusnahan, perlindungan dan penyelematan arsip

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, difokuskan pada peningkatan produksi budidaya
b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, difokuskan pada pengelolahan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan
c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, difokuskan pada pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata dan pengelolaan pokdarwis dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata dimasa pandemi COVID
b. Program Pemasaran Pariwisata, difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif
d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, difokuskan pada pengembangan kompetensi pelakuatau sumber daya manusia di bidang pariwisata.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian peternakan, penyediaan pupuk dan alsintan untuk mendukung produksi

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, difokuskan pada penyedian lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, peningkatan kualitas RPH
d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian
e. Program Penyuluhan Pertanian, difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, difokuskan pada penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten

5. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, difokuskan pada pelayanan pemenuhan komitmen perusahaan
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar
c. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang
d. Program Pengembangan Ekspor, difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor
e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen, difokuskan pada peningkatan UTTP yang ditera dan teraulang
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri

6. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri mendukung konsep percepatan pembangunan kawasan industri terpadu
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota, difokuskan pada Penerbitan Izin Usaha Indsutri (IUI), Izin Perluasan Usaha Indsutri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, difokuskan pada pengembangan SIINAS

7. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, difokuskan pada penyiapan dan pemberangkatan transmigran.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada koordinasi pelaporan dan fasilitasi implementasi SPM, serta koordinasi kesejahteraan rakyat, fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah
c. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada pelaporan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi BUMN, BLUD dan penguatan TPID

2. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin setwan dan DPRD
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Difokuskan pada fasilitasi kegiatan DPRD

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, difokuskan pada pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen kabupaten

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada pengelolaan aset daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Kepegawaian Daerah, difokuskan pada pengembangan karir ASN, disiplin dan ketertiban administrasi kepegawaian ASN

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada peningkatan kapasitas ASN

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kualitas kelibatbangan dan inovasi daerah

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, difokuskan pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah
b. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, difokuskan pada penilaian dan verifikasi kebijakan dan reformasi birokrasi

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik, difokuskan pada implementasi pelayanan publik dengan parameter kepuasan masyarakat
b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, difokuskan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (kondusifitas wilayah)
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, difokuskan pada ketertiban penyusunan dan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa/kelurahan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, difokuskan pada pembinaan desa demi menjaga wilayah desa yang tertib dengan Perda

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, difokuskan pada peningkatan karakter bangsa dalam bela negara dan cinta NKRI
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, difokuskan pada peningkatan kesadaran berpolitik dan penguatan partai politik
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, difokuskan pada fasilitasi forum dan organisasi masyarakat dan agama
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada pembinaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada pencegahan dan penanganan konflik sosial

Gambaran alokasi / penggunaan kapasitas *riil* kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel proyeksi pendapatan dan belanja untuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel 7.1. dan Tabel 7.2. sedangkan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.1.

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Pendapatan	Tahun					
		2024		2025		2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**PENDAPATAN**	**2.166.492.393.660**	**100,00**	**2.181.132.059.470**	**100,00**	**2.196.399.590.456**	**100,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**396.911.430.660**	**18,32**	**411.551.096.470**	**18,87**	**426.818.627.456**	**19,43**
1.1.1	Pajak Daerah	197.700.930.000	9,13	207.585.976.500	9,52	217.965.275.325	9,92
1.1.2	Retribusi	7.653.725.100	0,35	8.036.411.355	0,37	8.438.231.923	0,38
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.026.584.800	0,83	18.927.914.040	0,87	19.874.309.742	0,90
1.1.4	Lain lain PAD yang sah	173.530.190.760	8,01	177.000.794.575	8,12	180.540.810.467	8,22
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.762.370.963.000**	**81,35**	**1.762.370.963.000**	**80,80**	**1.762.370.963.000**	**80,24**
1.2.1	Pendapatan Transfer pemerintah yang sah	1.604.417.769.000	74,06	1.604.417.769.000	73,56	1.604.417.769.000	73,05
1.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	157.953.194.000	7,29	157.953.194.000	7,24	157.953.194.000	7,19
1.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.210.000.000**	**0,33**	**7.210.000.000**	**0,33**	**7.210.000.000**	**0,33**
1.3.1	Hibah;	7.210.000.000	0,33	7.210.000.000	0,33	7.210.000.000	0,33
1.3.2	Dana Darurat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2023 diolah

Tabel 7.2.

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Uraian	Tahun					
	2024		2025		2026	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Total Belanja	**2.211.492.393.660**	**100,00**	**2.221.132.059.470**	**100,00%**	**2.234.399.590.457**	**100,00%**
1. Belanja Operasi	**1.757.956.097.368**	**79,49**	**1.760.959.270.763**	**79,28%**	**1.769.143.722.866**	**79,18%**
1.1. Belanja Pegawai;	1.110.224.015.126	50,20	1.117.444.463.156	50,31%	1.129.679.352.083	50,56%
1.2. Belanja Barang dan Jasa;	478.947.263.122	21,66	554.392.418.848	24,96%	550.163.737.248	24,62%
1.3. Belanja Bunga;	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4. Belanja Subsidi;	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.5. Belanja Hibah; dan	163.784.819.120	7,41	84.112.388.758	3,79%	84.280.613.536	3,77%
1.6. Belanja Bantuan Sosial.	5.000.000.000	0,23	5.010.000.000	0,23%	5.020.020.000	0,22%
2. Belanja Modal	**98.813.365.026**	**4,47**	**101.912.178.391**	**4,59%**	**103.857.726.672**	**4,65%**
2.1. Belanja Tanah;	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2. Belanja Peralatan dan Mesin;	17.432.258.334	0,79	18.449.690.592	0,83%	18.468.140.283	0,83%
2.3. Belanja Bangunan dan Gedung;	22.080.318.000	1,00	23.102.398.318	1,04%	23.125.500.716	1,03%
2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;	40.000.000.000	1,81	41.040.000.000	1,85%	41.081.040.000	1,84%
2.5. Belanja Aset Tetap lainnya.	19.300.788.692	0,87	19.320.089.481	0,87%	21.183.045.673	0,95%
2.6. Belanja Aset lainnya.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000**	**0,23**	**5.050.000.000**	**0,23%**	**5.100.500.000**	**0,23%**
4. Belanja Transfer	**349.722.931.266**	**15,81**	**353.210.610.316**	**15,90%**	**356.297.640.918**	**15,95%**
4.1. Belanja Bagi Hasil;	39.691.143.066	1,79	41.155.109.647	1,85%	42.681.862.746	1,91%
4.2. Belanja Bantuan Keuangan.	310.031.788.200	14,02	312.055.500.669	14,05%	313.615.778.172	14,04%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2023 diolah

Tabel 7.3.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

		TAHUN		
		2024	2025	2026
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**12.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.3	Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah	0	0	0
2.3.4	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**45.000.000.000**	**40.000.000.000**	**38.000.000.000**
	Defisit Belanja	45.000.000.000	45.000.000.000	38.000.000.000
	Surplus (defisit)	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2022

Tabel 7.4.

Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
I	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***							***472.258.367.000***		***502.427.522.900***		***526.273.169.600***		***1.500.959.059.500***		
1.01.	***Pendidikan***							**209.265.000.000**		**215.272.250.000**		**222.085.417.500**		**646.622.667.500**		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 5-6 tahun kali 100%	%	100	100	100	209.000.000.000	100	215.000.000.000	100	221.806.455.000	100	645.806.455.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100%	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali 100	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah peserta didik pada jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun kali 100	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	Jumlah kurikulum mulok yang ada di bagi jumlah mulok yang diterapkan kali	%	100	100	100	150.000.000	100	151.500..000	100	152.175.000	100	453.675.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			100													
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat kepangkatan dibagi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada dibagi 100	%	80	80	82	100.000.000	83	105.000.000	84	110.250.000	84	315.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	jumlah lembaga pendidikan yang memiliki ijin operasional dibagi jumlah lembaga pendidikan yang ada dibagi 100%	%	100	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	47.287.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
1.02	***Kesehatan***							**143.274.000.000**		**160.574.165.000**		**163.912.750.000**		**467.760.915.000**		
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama	Jumlah fasyankes primer yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer yang terakreditasi dikali 100%	%	24	24	25	140.000.000.000	25	157.259.165.000	25	160.000.000.000	25	457.259.165.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama	Jumlah fasyankes rujukan yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer dikali 100%	%	35	40	50		50		50		50			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Desa STBM	Jumlah desa STBM dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	%	29	41	45		48		50		50			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase fasilitas	Jumlah fasilitas pelayanan	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100%.													Urusan Kesehatan
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	Jumlah fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan dibagi jumlah fasyankes yang ada dikali 100%.	%	40	40	50		55		60		60			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah bayi baru lahir di wilyah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.													
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran dikali 100%	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%													
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah pernderita hioertensi usia 15 tahu keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang terduga TBC di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			100%.													
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	Jumlah tenaga medis yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga medis yang ada dikali 100%.	%	35	40	45	2.204.000.000	47	2.160.000.000	50	2.400.000.000	50	6.764.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada dikali 100%.	%	35	40	45		47		50		50			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian dibagi sarana kesehatan yang ada dikali 100%.	%	35	40	45	500.000.000	47	525.000.000	50	651.250.000	50	1.676.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi sarana kesehatan	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			yang ada dikali 100%.													
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	Jumlah TPM yang memenuhi syarat di wilayah kerjanya dibagi jumlah seluruh TPM yang ada diwilayah kerjanya dikali 100%	%	35	40	45		47		50		50			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri	Jumlah desa siaga aktif mandiri dalam 1 tahun	Desa	25	27	29	570.000.000	31	630.000.000	33	861.500.000	33	2.061.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
		Persentase rumah tangga sehat	Jumlah Rumah Tangga yang sesuai dengan indikator PHBS Rumah Tangga dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata X 100%	%	90	90	90		91		91		91			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
1.03	***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***							***93.579.618.000***		***99.567.580.000***		***112.129.337.600***		***305.276.535.600***		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/total panjang jaringan Irigasi X 100%)	%	75	75,3	75,5	8.000.000.000	76	8.200.000.000	77	8.820.000.000	77	25.020.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	(jumlah Penduduk yang terlayani jaringan air minum layak/jumlah penduduk seluruhnya) x 100%	%	96	96,3	96,5	13.903.000.000	96,5	14.018.300.000	96,5	15.030.130.000	96,5	42.951.540.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	(jumlah penduduk yang terlayani IPAL/Jumlah penduduk seluruhnya) x 100%	%	95	96	97,5	5.950.000.000	98	6.050.000.000	98,5	6.750.000.000	98,5	18.750.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran dalam kondisi baik	(panjang saluran dalam kondisi baik/total panjang saluran) x 100%	%	71	72	72	600.000.000	73	660.000.000	74	726.000.000	74	1.986.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	(Jumlah bangunan gedung yang memenuhi peraturan/jumlah gedung seluruhnya)x 100%	%	52	55	56	3.775.000.000	57	4.152.500.000	58	4.567.750.000	58	12.495.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	(panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100%	%	51.27	52	52	60.641.658.000	53	65.705.824.000	54	75.376.406.000	54	201.723.888.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	(jumlah penyedia jasa konstruksi yang baik dan sedang / total penyedia jasa konstruksi) x 100%	%	82	83	84	95.000.000	85	104.500.000	86	114.950.000	86	314.450.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	(Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai /permohonan yg masuk)x100%	%	82	83	85	614.960.000	85	676.456.000	85	744.101.600	85	2.035.517.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.	***Perumahan dan Kawasan Permukiman***							***4.605.999.000***		***4.880.777.900***		***5.440.542.000***		***14.927.318.900***		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah KK korban bencana yang terlayani	KK	10	10	10	135.000.000	10	148.500.000	15	163.350.000	15	446.850.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha	(luas kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 Ha sd tahun (n)/ luas kawasan kumuh	%	54	39	28,16	1.831.649.000	34,13	2.014.813.900	43,08	2.216.295.000	43,08	6.062.757.900	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			dibawah 10 ha sesuai SK Kumuh 2020) x 100%													
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan RTLH	(jumlah rumah yang ditangani sd tahun-n /jumlah rumah seluruhnya) x 100%	%	4,4	4,9	5,71	952.850.000	6,22	970.904.000	6,74	1.092.267.000	6,74	3.016.021.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan sd tahun ke-n	Perumahan	306	350	376	1.586.500.000	401	1.616.560.000	426	1.818.630.000	426	5.021.690.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi sd tahun ke-n	Pengembang	31	33	35	100.000.000	37	130.000.000	40	150.000.000	40	380.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05.	***Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***							***14.278.750.000***		***14.762.500.000***		***14.997.360.000***		***44.038.610.000***		
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli dalam sehari dibagi 3 dikali 100 %	%	100	100	100	8.000.000.000	100	8.200.000.000	100	8.400.000.000	100	24.600.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah Rawan Bencana x 100%	%	100	100	100	2.778.750.000	100	3.071.250.000	100	3.224.812.500	100	9.074.812.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara di daerah rawan bencana x 100 %													dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam	Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana/Jumlah warga negara yang harus memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100%	%	100	100	100		100		100		100			Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga masyarakat terdampak yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dibagi Jumlah seluruh masyarakat kabupaten yang terdampak, kali 100%	%	100	100	100	3.500.000.000	100	3.491.250.000	100	3.372.547.500	100	10.363.797.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.06	***Sosial***							***7.255.000.000***		***7.370.250.000***		***7.707.762.500***		***22.222.012.500***		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dibagi 100	%	100	100	100	70.000.000	100	73.500.000	100	77.175.000	100	220.675.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi	Jumlah disabilitas yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan disabilitas dikali	%	100	100	100	1.530.000.000	100	1.550.000.000	100	1.596.500.000	100	4.676.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		kebutuhan dasarnya di luar panti	100													
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan anak terlantar dikali 100	%	100	100	100		100		100		100			
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Lansia yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan lansia dikali 100%	%	100	100	100		100		100		100			
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah PGOT yang terlayani dibagi Jumlah target pelayanan PGOT dikali 100	%	100	100	100		100		100		100			
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah KK miskin yang terbantu dibagi jumlah target pelayanan KK miskin dikali 100	%	100	100	100	5.420.000.000	100	5.500.000.000	100	5.775.000.000	100	16.695.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu dibagi Jumlah target SPM korban bencana alam dan sosial dikali 100	%	100	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	630.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP dibagi target pemenuhan sarana dan prasarana TMP	%	100	100	100	35.000.000	100	36.750.000	100	38.587.500	100	110.337.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			dikali 100													
II	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***							***54.960.289.200***		***57.264.577.800***		***63.187.188.850***		***175.412.055.850***		
2.07.	***Tenaga Kerja***							***1.816.510.600***		***1.978.036.400***		***2.154.819.000***		***5.949.366.000***		
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun	Dokumen	65	70	70	15.000.000	75	16.500.000	75	18.150.000	75	49.650.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
			Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang tersusun	Dokumen	NA	NA	0		0		2		2			
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	Jumlah tenaga kerja terampil dan terlatih dibagi jumlah seluruh tenaga kerja yang terdaftar dikali 100%	%	27	30	70	1.366.016.600	71	1.502.618.000	73	1.652.880.000	73	4.521.514.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar dikali 100%	%	70,9	72	50	69.744.000	55	76.718.400	55	84.390.000	55	230.852.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh perselisihan hubungan industrial dikali 100%	%	100	100	100	365.750.000	100	382.200.000	100	399.399.000	100	1.147.349.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
2.08	***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***							***490.000.000***		***514.500.000***		***590.225.000***		***1.594.725.000***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	Jumlah OPD yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada penyusunan RKA OPD serta memiliki anggaran responsif gender	Lembaga	42	42	42	100.000.000	42	105.000.000	42	110.250.000	42	315.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan : jumlah penduduk perempuan x 100%	%	0,0046	0,0044	0,0042	75.000.000	0,0041	78.750.000	0,004	82.687.500	0,004	236.437.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang dilayani secara komprehensif	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilayani dibagi jumah kasus yang dilaporkan kali 100%	%	100	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	81.687.500	100	236.437.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	Jumlah OPD yang memiliki data gender : Jumlah OPD x 100%	%	10	10	10	25.000.000	12	26.250.000	14	27.562.500	14	78.812.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah desa layak anak	Jumlah Desa Layak Anak	Desa	2	3	4	100.000.000	6	105.000.000	8	110.250.000	8	315.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase kasus kekerasan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	%	0,0079	0,0077	0,0076	115.000.000	0,0065	120.750.000	0,006	176.787.500	0,006	412.537.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	***Pangan***							***88.000.000***		***96.800.000***		***106.480.000***		***291.280.000***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi (AKE);	Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	kalori / kapita / tahun;	1871,2	1875	1940	60.500.000	1945	66.550.000	1950	73.205.000	1950	200.255.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
		Angka Konsumsi Protein (AKP);	Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	gram / kapita / tahun;	54,4	55	55,5		56		56,5		56,5		Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
		Indeks Ketahanan Pangan	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional RI setiap tahun	Indeks	87,39	87,82	88		88,5		90		90		Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan pangan	Jumlah desa rentan pangan dibagi jumlah desa se-Karanganyar dikali 100%	%	14,69	14,69	14,12	11.000.000	13,56	12.100.000	12,99	13.310.000	12,99	36.410.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	Jumlah pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat dibagi jumlah pelaku usaha PSAT-PDUK dikal 100%	%	22,64	30,19	37,74	16.500.000	45,28	18.150.000	52,83	19.965.000	52,83	54.615.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
2.10	***Pertanahan***							***400.000.000***		***440.000.000***		***484.000.000***		***1.324.000.000***		
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	(jumlah tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat / jumlah total tanah milik pemerintah yang direncanakan) x 100%	%	Na	Na	80	400.000.000	85	440.000.000	90	484.000.000	90	1.324.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanahan
2.11	***Lingkungan Hidup***							***7.001.000.000***		***7.414.000.000***		***7.961.300.000***		***22.226.300.000***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	(Jumlah dokumen yang disusun / jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yg seharusnya ada sesuai peraturan) x 100%	%	100	100	100	200.000.000	100	145.000.000	100	220.000.000	100	565.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Jumlah sampling yang memenuhi baku mutu / jumlah sampling keseluruhan	%	75	75	76	1.003.000.000	77	1.195.000.000	78	1.300.000.000	78	3.548.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	(jumlah pengelolaan kehati yang terlaksana / jumlah pengelolaan kehati yang direncanakan) x 100%	%	75	75	80	175.000.000	82	225.000.000	85	275.000.000	85	675.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan/jumlah pelaku usaha yang direncanakan dilakukan pembinaan (150pelaku usaha selama 3 tahun) x 100%	%	60	65	75	195.000.000	85	225.000.000	100	170.000.000	100	590.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	(jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100%	%	73	75	81	138.000.000	82	151.000.000	83	162.000.000	83	451.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	(jumlah sosialisasi yang dilaksanakan / jumlah total sosialisasi yang direncanakan) x 100%	%	75	75	80	110.000.000	82	120.000.000	85	134.300.000	85	364.300.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	(Jumlah yang mengikuti/ Jumlah yang ditargetkan ikut) x 100%	%	70	73	75	30.000.000	77	35.000.000	79	40.000.000	79	105.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	(jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / jumlah total aduan lingkungan hidup) x 100%	%	100	100	100	45.000.000	100	48.000.000	100	50.000.000	100	143.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang terkelola	(jumlah volume sampah terkelola / jumlah volume timbulan sampah)	%	73	75	80	5.105.000.000	82	5.270.000.000	86	5.560.000.000	86	15.935.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			x 100%													
2.12	***Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***							***978.625.000***		***1.060.550.000***		***1.109.612.500***		***3.148.787.500***		
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase rata-rata cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	%	83,5	73,12	91,30	400.000.000	91,90	450.000.000	92,50	470.000.000	92,50	1.320.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	Persentase rata-rata cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	98,25	98,5	93,85	340.000.000	95,90	360.000.000	98,95	380.000.000	98,95	1.080.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	Jumlah perjanjian kerjasama OPD dan stakeholder	Kerja sama	Na	Na	42	193.625.000	45	203.300.000	50	210.000.000	50	606.925.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Inovasi pelayanan adminduk	Jumlah inovasi pelayanan adminduk	Inovasi	NA	NA	2		2		2		6			
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil data kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan	Buku	NA	NA	1	45.000.000	1	47.250.000	1	49.612.500	3	141.862.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersusunnya buku data kependudukan	Jumlah buku data kependudukan	Buku	NA	NA	2		2		2		6			
2.13	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***							***14.380.000.000***		***14.578.000.000***		***15.415.400.000***		***44.373.400.000***		
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100%	%	100	100	100	200.000.000	100	230.000.000	100	350.000.000	100	780.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana prasarana	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarapa prasarana dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	%	Na	Na	100		100		100		100			

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	(Jumlah Desa yang melakukan kerjasama)/(Jumlah Desa) x 100%	%	95	95	95	200.000.000	96	210.000.000	97	220.500.000	97	630.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	(Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes)/(Jumlah Desa) x 100%	%	100	100	100	6.000.000.000	100	6.200.000.000	100	6.510.000.000	100	18.710.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa tertibadministrasi pemerintahan	Jumlah desa tertib administraso/jumlah desa x 100%	%	82	83	84		85		86		86			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif / jumlah lembaga kemasyarakatan x 100%	%	Na	Na	80	7.980.000.000	82	7.938.000.000	85	8.334.900.000	85	24.252.900.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga kemasayarakatan yang dibina	Jumlah Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga masayarakat Adat) yang dibina dibagi dengan jymlah Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga masayarakat Adat) kali 100%	%	Na	Na	100		100		100		100			
2.14	***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***							***7.215.980.000***		***7.328.238.000***		***7.606.698.000***		***22.150.916.000***		
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR	Jumlah kelahiran Wanita kelompok umur (15-19 th) di bagi jumlah	Indeks	Na	Na	4	515.000.000	3,7	550.000.000	3,5	570.000.000	3,5	1.635.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			penduduk Wanita umur (15-19 th) x 1000													
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR)	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100%	%	71,57	75	71,7	6.220.980.000	71,9	6.278.238.000	72	6.511.698.000	72	19.010.916.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kampung KB dibagi jumlah semua desa/kelurahan dikali 100%	%	33,90	34	38,98		41,8		44,63		44,63			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase tribina aktif	Jumlah tribina terdaftar yang aktif : jumlah tribina tedaftar x 100%	%	95,27	95,3	95,34	480.000.000	95,38	500.000.000	95,40	525.000.000	95,40	1.505.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2.15	***Perhubungan***							***4.467.154.600***		***4.570.000.000***		***4.870.000.000***		***13.907.154.600***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	jumlah fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik / jumlah total fasilitas penunjang keselamatan jalan x 100% (fasilitas penunjang yang dimaksud meliputi rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, apill, warning light/flashing light)	%	66,19	67	60	4.467.154.600	65	4.570.000.000	70	4.870.000.000	70	13.907.154.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
		Persentase terminal kondisi baik	Jumlah terminal kondisi baik dibagi jumlah terminal dikali 100%	%	47,29	48	40		50		60		60			

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	jumlah kendaraan yang lulus uji KIR / jumlah total kendaraan yang melakukan uji KIR x 100%	%	Na	Na	95		96		97		97			
2.16	***Komunikasi dan Informatika***							***4.473.359.000***		**4.920.694.900**		**7.112.764.000**		**16.506.817.000**		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	83	100	100	1.843.774.000	100	2.028.151.400	100	2.930.966.000	100	6.802.891.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
		Jumlah KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif	jumlah	83,3	100	25		28		31		31			
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik / jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan x 100%	%	63	63	39	2.629.585.000	40	2.892.543.500	41	4.181.798.000	41	9.703.926.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
2.17	***Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah***							***2.435.400.000***		***2.668.500.000***		***2.951.250.000***		***8.055.150.000***		
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru	Jumlah penambahan unit usaha simpan pinjam utk koperasi	unit	3	5	5	40.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	150.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Jumlah koperasi yang melaksanakan RATdibagi Jumlah koperasi aktif X 100 %	%	49	50	52	60.000.000	54	66.000.000	57	80.500.000	57	206.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Jumlah koperasi yang diperiksa dibagi Jumlah koperasi aktif X 100 %	%	23	24	25	10.000.000	26	11.000.000	27	12.100.000	27	33.100.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat dibagi Jumlah Pengurus, pengawas,pengg elola koperasi aktif X 100 %	%	9	10	11,2	660.400.000	11,3	720.000.000	11,4	820.000.000	11,4	2.200.400.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan	Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	%	68	76	78	600.000.000	80	650.000.000	82	700.000.000	82	1.950.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina	Jumlah usaha mikro yang dibina : Jumlah total usaha mikro yang terdaftar x 100%	%	0.005	0.005	0.005	65.000.000	0.006	71.500.000	0.007	78.650.000	0.007	215.150.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah usaha mikro dikali 100%	%	1,2	1,3	1	1.000.000.000	1.1	1.100.000.000	1.2	1.200.000.000	1.2	3.300.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	***Penanaman Modal***							***1.045.750.000***		***1.152.325.000***		***1.255.557.500***		***3.453.632.500***		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	Jumlah Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan setiap tahun	Buah	3	3	3	140.000.000	3	154.000.000	3	169.400.000	3	463.400.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Jumlah promosi yang dilaksanakan setiap tahun	Kegiatan	3	3	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	331.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah perizinan yang diajukan dikali 100%	%	219	293	100	425.750.000	100	468.325.000	100	515.157.500	100	1.409.232.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Persentase jumlah pelaku usaha yang dapat	Jumlah perusahaan yang melaporkan	%	5,5	5,5	30	300.000.000	30	330.000.000	29	350.000.000	29	980.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PENANAMAN MODAL	diawasi	LKPM dibagi jumlah perusahaan yang wajib LKPM dikali 100%													Modal
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	Realisasi pertahun	Unit	525	700	750	80.000.000	800	90.000.000	850	100.000.000	850	270.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
2.19	***Kepemudaan dan Olah Raga***							***7.364.585.000***		***7.608.043.500***		***8.363.847.850***		***23.336.476.350***		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten dikali 100%	%	3	4	5	484.585.000	5	533.043.500	5	586.347.850	5	1.603.976.350	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Jumlah cabang olahraga dikali 100%	%	100	100	100	6.380.000.000	100	6.525.000.000	100	7.177.500.000	100	20.082.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	Jumlah pramuka tingkat Kabupaten yang dibina dibagi Jumlah pramuka tingkat Kabupaten dikali 100%	%	100	100	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	1.650.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2.20	***Statistik***							***125.200.000***		***137.720.000***		***160.492.000***		***423.412.000***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	100	100	100	125.200.000	100	137.720.000	100	160.492.000	100	423.412.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Statistik
2.21	***Persandian***							***65.175.000***		***71.692.500***		***171.492.000***		***308.359.500***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	61,2	63	63	65.175.000	64	71.692.500	65	171.492.000	65	308.359.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Persandian
2.22	***Kebudayaan***							***1.788.550.000***		***1.855.477.500***		***1.948.251.000***		***5.592.278.500***		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dibagi objek pemajuan kebudayaan sesuai UU kebudayaan dikali 100%	%	81	81	81	1.450.000.000	82	1.500.000.000	82,5	1.575.000.000	82,5	4.525.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan dibagi dengan jumlah kesenian tradisonal Kab Karanganyar dikali 100%	%	100	100	100	266.550.000	100	279.877.500	100	293.871.000	100	840.298.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	Jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan dibagi jumlah sejarah di Kab Karanganyar dikali 100%	%	57	58	58	40.000.000	59	42.000.000	60	44.100.000	60	126.100.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	Jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola dibagi cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan daerah dikali	%	90	90	90	32.000.000	91	33.600.000	92	35.280.000	92	100.880.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			100%													
2.23	***Perpustakaan***							***500.000.000***		***520.000.000***		***540.000.000***		***1.560.000.000***		
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	12,6	100	12,7	500.000.000	12,9	520.000.000	13	540.000.000	13	1.560.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan
2.24	***Kearsipan***							***325.000.000***		***350.000.000***		***385.000.000***		***1.060.000.000***		
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang Dikelola	%	55,8	95	56	300.000.000	57	320.000.000	58	350.000.000	58	970.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kearsipan
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	11,62	50	12	25.000.000	13	30.000.000	14	35.000.000	14	90.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kearsipan
III	***URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***							***11.170.885.400***		***11.990.955.300***		***13.757.940.400***		***36.919.781.100***		
3.25	***Kelautan dan Perikanan***							***123.500.000***		***135.750.000***		***146.825.000***		***406.075.000***		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan	kg	1.897.814	1.925.796	1.935.425	41.000.000	1.945.102	45.000.000	1.954.828	47.000.000	1.954.828	133.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produk perikanan yang dipromosikan	Jumlah perairan umum daratan yang diawasi dibagi jumlah total perairan umum dikali 100%	%	17,14	20	25	55.000.000	30	60.500.000	35	66.550.000	35	182.050.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Program Baru)	Persentase perairan umum daratan yang diawasi	Jumlah produksi hasil perikanan yang dipromosikan pada tahun berkenaan dibagi jumlah total produksi hasil perikanan dikali 100%	%	46,4	50	60	27.500.000	65	30.250.000	75	33.275.000	75	91.025.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
3.26	***Pariwisata***							***3.181.340.000***		***3.348.251.200***		***4.299.840.000***		***10.829.431.200***		
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase peningkatan	Jumlah wisatawan tahun	%	5	5	6	1.000.000.000	6	1.100.000.000	6	1.500.000.000	6	3.600.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	TARIK DESTINASI PARIWISATA	kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar	(n) dikurangi jumlah wisatawan tahun (n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun (n-1) dikali 100%													Urusan Pariwisata
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan	Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan dibagi Jumlah destinasi wisata di Karanganyar dikali 100%	%	100	100	100	600.000.000	100	648.000.000	100	699.840.000	100	1.947.840.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah Sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan HKI dibagi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif dikali 100%	%	6	6	11	581.340.000	17	400.000.000	23	800.000.000	23	1.781.340.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n) dikurangi Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n-1) dikali 100%	%	15	15	20	1.000.000.000	25	1.200.251.200	30	1.300.000.000	30	3.500.251.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
3.27	***Pertanian***							***6.129.950.000***		***6.622.346.000***		***7.268.511400***		***20.020.807.400***		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman pangan utama (padi)	Jumlah hasil produksi tanaman pangan utama (padi) pada tahun berjalan	ton	342.002	342.050	342.090	600.000.000	342.110	650.000.000	342.130	700.000.000	342.130	1.950.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Perangkat Daerah yang menangani

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Produksi tanaman pangan utama (jagung)	Jumlah hasil produksi tanaman pangan utama (jagung) pada tahun berjalan	ton	22.441	22.452	20.885		20.920		21.080		21.080			Urusan Pertanian
		Produksi hortikultura unggulan (jahe)	Jumlah hasil produksi hortikultura unggulan (jahe) pada tahun berjalan	ton	4.363	4.364	4.365		4.390		4.409		4.409			
		Produksi hortikultura unggulan (durian)	Jumlah hasil produksi hortikultura unggulan (durian) pada tahun berjalan	ton	13.435	13.460	13.470		13.500		13.560		13.560			
		Produksi perkebunan unggulan (kopi)	Jumlah hasil produksi perkebunan (kopi) pada tahun berjalan	ton	16,30	22,00	27,00		27,50		28,10		28,10			
		Produksi perkebunan unggulan (tembakau)	Jumlah hasil produksi perkebunan (tembakau) pada tahun berjalan	ton	59,80	60,60	61,00		62,20		63,50		63,50			
		Sapi	Populasi sapi (sapi potong dan sapi perah) pada tahun berjalan	ekor	68.329	68.500	68.566		68.909		69.254		69.254			
		Kambing/Domba	Populasi kambing/domba pada tahun berjalan	ekor	151.327	151.876	153.395		154.929		156.478		156.478			
		Ayam	Populasi ayam pada tahun berjalan	ekor	10.215.220	11.238.066	11.575.208		11.690.960		12.041.689		12.041.689			
		Kelinci	Populasi kelinci pada tahun berjalan	ekor	13.791	13.860	13.929		13.999		14.069		14.069			
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	Jumlah prasarana (irigasi tersier) pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh prasarana	%	30,34	30,68	31,01	5.000.000.000	31,34	5.400.000.000	31,68	5.940.000.000	31,68	16.340.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			pertanian dikali 100%													
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka kesakitan ternak besar (%)	Jumlah ternak besar yang sakit dibagi total jumlah ternak besar dikali 100%	%	8,1	8	7,9	49.500.000	7,7	53.460.000	7,6	57.736.800	7,6	160.696.800	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
		Angka kesakitan ternak kecil (%)	Jumlah ternak kecil yang sakit dibagi total jumlah ternak besar dikali 100%	%	16,5	16,4	16,2		16,1		16		16			
		Angka kesakitan unggas (%)	Jumlah unggas yang sakit dibagi total jumlah unggas dikali 100%	%	15,1	15	14,8		14,7		14,5		14,5			
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani	Jumlah bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah seluruh bencana pertanian yang terjadi dikali 100%	%	100	100	100	44.000.000	100	47.520.000	100	52.272.000	100	143.792.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani yang aktif	Jumlah kelompok tani yang terdaftar yang aktif dibagi jumlah semua kelompok tani yang terdaftar dikali 100%	%	100	100	100	436.450.000	100	471.366.000	100	518.502.600	100	1.426.318.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
3.29	***Energi dan Sumber Daya Mineral***							***25.000.000***		***27.500.000***		***30.250.000***		***82.750.000***		
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Jumlah kawasan potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	2	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	2	82.750.000		Perangkat Daerah yang menangani Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30	***Perdagangan***							***1.052.839.400***		***1.143.026.500***		***1.241.024.000***		***3.436.889.900***		
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	Jumlah komitmen perusahaan berizin yang dipenuhi dibagi jumlah seluruh perusahaan dikali 100%	%	85,71	85,71	30	18.896.400	35	20.786.000	40	22.865.000	40	62.547.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan standarisasi SNI secara bertahap	Jumlah sarana perdagangan yang memenuhi standarisasi SNI dibagi jumlah sarana perdagangan kabupaten x 100%	%	50	55,55	55,55	754.840.000	61,11	815.227.200	61,11	880.445.000	61,11	2.450.512.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase akses informasi harga	Persentase akses informasi harga baru dibagi jumlah akses infomasi kali 100%	%	16,66	16,66	23	12.000.000	32	13.200.000	41	14.520.000	41	39.720.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk ekspor	Jumlah produk ekspor	produk	45	50	50	9.974.000	55	10.971.400	55	12.068.000	55	33.013.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	Jumlah kepatuhan produk dan UTTP dibagi jumlah alat kali 100 %	%	87,85	87,85	65	57.129.000	70	62.841.900	75	69.126.000	75	189.096.900	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	Produk	10	15	30	200.000.000	40	220.000.000	50	242.000.000	50	662.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
3.31	***Perindustrian***							***594.000.000***		***643.400.000***		***693.740.000***		***1.931.140.000***		
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	NA	NA	1	500.000.000	0	540.000.000	0	580.000.000	1	1.620.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagai jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	%	NA	NA	25		27		29		29			
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah hasil pemnatauan, pengawasan dan	Jumlah perizinan berusaha yang dipantau dan	%	NA	NA	11	44.000.000	11	48.400.000	11	53.240.000	11	145.640.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	KABUPATEN/KOTA	verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah	dianalisa dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada tahun n dikali 100%													Perindustrian
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan tekini pada SIINas	Tersedianya informasin industri 0-6 bulan, 7-12 bulan, informasi produksi, kapasitas, bahan baku dan tenaga kerja	%	18	20	75	50.000.000	75	55.000.000	75	60.500.000	75	165.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
3.32	***Transmigrasi***							***64.256.000***		***70.681.600***		***77.750.000***		***212.687.600***		
3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	2	2	2	64.256.000	2	70.681.500	2	77.750.000	2	212.687.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Transmigrasi
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							***37.358.000.000***		***37.721.690.000***		***37.234.168.000***		***112.313.858.000***		
4.01.	***Unsur Sekretariat Daerah***							***11.358.000.000***		***11.421.690.000***		***10.408.168.000***		***33.187.858.000***		
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	Hasil dari penilaian EKPPD oleh Tim Penilai di tingkat nasional	score	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	9.144.000.000	Sangat tinggi	9.174.480.000	sangat tinggi	8.284.555.000	sangat tinggi	26.603.035.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA)
		Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 %	%	100	100	100		100		100		100			
		Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan	Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 %	%	100	100	100		100		100		100			

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat														
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah	Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 %	%	100	100	100	2.214.000.000	100	2.247.210.000	100	2.123.613.000	100	6.584.823.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA)
		Persentase kegiatan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	Jumlah kegiatan pembangunan yang dievaluasi dibagi jumlah kegiatan keseluruhan x 100%	%	100	100	100		100		100		100			
		Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	Jumlah belanja pengadaan yang iumumkan melalui SIRUP dibagi jumlah belanja keseluruhan x 100%	%	100	100	100		100		100		100			
4.02	***Unsur Sekretariat DPRD***							***26.000.000.000***		***26.300.000.000***		***26.826.000.000***		***79.126.000.000***		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100	100	100	26.000.000.000	100	26.300.000.000	100	26.826.000.000	100	79.126.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETWAN)
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							***297.898.580.500***		***350.203.888.000***		***321.868.075.000***		***969.970.543.500***		
5.01	***Perencanaan***							***2.950.000.000***		***3.565.000.000***		***3.743.250.000***		***10.258.250.000***		
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	Jumlah program renja PD yang selaras dengan program RKPD dibagi jumlah	%	100	100	100	1.250.000.000	100	1.340.000.000	100	1.407.000.000	100	3.997.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Perencanaan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	DAERAH		program RKPD x 100%													
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD, kali 100%	%	85	87	90	1.700.000.000	90	2.225.000.000	90	2.336.250.000	90	6.261.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Perencanaan)
		Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD, kali 100%	%	86	88	90		90		90		90			
		Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD, kali 100%	%	87	89	90		90		90		90			
5.02	***Keuangan***							***290.039.580.500***		***341.548.888.000***		***312.733.983.000***		***944.322.451.500***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	% ketepatan APBD, jumlah LK OPD yang sesuai dan tepat waktu dibagi jumlah OPD dikali 100%, ketepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku dikali 100%	%	100	100	100	282.957.031.400	100	334.277.471.000	100	305.536.844.813	100	922.771.347.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan)
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	Jumlah rekonsiliasi BMD OPD dibagi jumlah OPD dikali 100 %	%	98	90	100	2.229.179.400	100	2.288.624.000	100	2.114.689.000	100	6.632.492.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Pajak daerah dibagi PAD dikali 100%	%	NA	NA	51	4.853.369.700	51	4.982.793.000	52	5.082.449.000	52	14.918.611.700	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan)
5.03	***Kepegawaian***							***2.500.000.000***		***2.550.000.000***		***2.600.000.000***		***7.650.000.000***		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	Jumlah formasi jabatan yang terisi dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia dikali 100%	%	100	98	98	2.500.000.000	98	2.550.000.000	98	2.600.000.000	98	7.650.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian)
		Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat	Persentase ASN yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian	%	NA	NA	75		80		85		85		Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian)
		Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Capaian jumlah administrasi yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	98	98	98		98		98		98		Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian)
		Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan	Capaian jumlah evaluasi kinerja dan penegakan Disiplin yang terselesaikan.	%	NA	NA	95		95		95		95		Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian)
5.04	***Pendidikan dan Pelatihan***							***1.450.000.000***		***1.550.000.000***		***1.600.000.000***		***4.600.000.000***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN selain guru dan tenanga kesehatan dikali100%	%	7	7	25	1.450.000.000	26	1.550.000.000	27	1.600.000.000	27	4.600.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Pendidikan dan Pelatihan)
5.05	***Penelitian dan Pengembangan***							***959.000.000***		***990.000.000***		***1.190.842.000***		***3.139.842.000***		
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	Jumlah hasil kajian yang diimplementasikan dibagi jumlah kajian yang disusun oleh Baperlitbang, kali 100%	%	45	47	52	959.000.000	54	990.000.000	56	1.190.842.000	56	3.139.842.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Penelitian dan Pengembangan)
		Persentase inovasi yang diimplementasikan	Jumlah hasil krenova yang diimplementasikan dibagi jumlah krenova dilombakan, kali 100%	%	45	47	50		51		52		52			
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							***2.000.000.000***		***2.225.000.000***		***2.301.250.000***		***5.526.250.000***		
6.01	***Pengawasan***							***2.000.000.000***		***2.225.000.000***		***2.301.250.000***		***6.526.250.000***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Menurunnya jumlah temuan yang berindikasi ketidak patuhan	%	15	10	10	1.500.000.000	9	1.700.000.000	8	1.750.000.000	8	4.950.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	Jumlah rekomendasi yg selesai di TL dibagi jumlah rekomendasi X 100%	%	95	95	95		95		95		95			

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan yg telah di TL dibagi jumlah aduan X 100%	%	100	100	100		100		100		100			
		LHR LKPD	LHR LKPD	LHR	1	1	1		1		1		1			
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah pegw. Wajib lapor yg telah melaporkan dibagi jumlah pegw. wajib lapor X 100%	%	100	100	100	500.000.000	100	525.000.000	100	551.250.000	100	1.576.250.000	Kabupaten Karanganyar	p
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dibagi Jumlah SKPD x 100%	%	76	80	100		100		100		100			
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan PKPT dibagi Jumlah Kegiatan dalam PKPT x 100%	%	100	100	100		100		100		100			
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**							***27.079.382.500***		***27.474.904.500***		***28.185.163.725***		***82.739.450.725***		
7.1	**Kec. JATIPURO**							***186.500.000***		***197.425.000***		***208.796.250***		***592.721.250***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	87,7	75	80	8.000.000	82	10.000.000	84	12.000.000	84	30.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	94.575.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi	%	99,67	100	100	36.500.000	100	38.325.000	100	40.241.250	100	115.066.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	KETERTIBAN UMUM		jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%													(Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	94	80.000.000	95	84.000.000	96	88.200.000	96	252.200.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	99,94	100	100	32.000.000	100	33.600.000	100	35.280.000	100	100.880.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.2	**Kec. JATIYOSO**							***218.589.900***		***229.520.000***		***240.994.500***		***689.104.400***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	80,026	70	81	7.101.900	81,2	7.457.000	81,5	7.830.000	81,5	22.388.900	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	97	100	100	85.000.000	100	89.250.000	100	93.712.500	100	267.962.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	97	100	100	16.500.000	100	17.325.000	100	18.191.000	100	52.016.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	100	91.973.000	100	96.572.000	100	101.400.000	100	289.945.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	100	100	18.015.000	100	18.916.000	100	19.861.000	100	56.792.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.3	**Kec. JUMANTONO**							***337.047.000***		***353.899.400***		***371.593.800***		***1.062.540.200***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	84,3	100	100	6.324.000	100	6.640.200	100	6.972.000	100	19.936.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	94.575.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	160.559.000	100	168.587.000	100	177.016.000	100	506.162.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah	%	NA	NA	100	77.044.000	100	80.896.200	100	84.941.000	100	242.881.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	63.120.000	100	66.276.000	100	69.589.800	100	198.985.800	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.4	**Kec. JUMAPOLO**							***135.390.000***		***159.659.500***		***169.142.000***		***464.191.500***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Nilai	82,025	75	82,5	1.000.000	83,5	1.050.000	84,5	1.102.500	84,5	3.152.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif di bagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan dikali 100%	%	95	100	100	17.700.000	100	18.585.000	100	19.514.250	100	55.799.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kundusif dibagi jumlah seluruh wilayah kecamatan dikali 100%	%	95	100	100	36.500.000	100	38.325.000	100	40.241.250	100	115.066.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	100	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	195.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	100	100	30.190.000	100	31.699.500	100	33.284.000	100	95.173.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.5	**Kec.MATESIH**							***355.000.000***		***372.750.000***		***391.387.500***		***1.119.137.500***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	83,475	100	90	6.000.000	95	6.300.000	100	6.615.000	100	18.915.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif di bagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	173.387.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kundusif dibagi jumlah seluruh wilayah kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	255.000.000	100	267.750.000	100	281.137.500	100	803.887.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	100	100	100	31.000.000	100	32.550.000	100	34.177.500	100	97.727.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh	%	100	100	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.820.000	100	25.220.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			desa diwilayah Kecamatan dikali 100%													
7.6	**Kec. TAWANGMANGU**							***2.860.163.600***		***2.912.874.000***		***2.982.333.500***		***8.755.371.000***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	84,925	75	83	278.444.000	83,4	292.366.200	83,5	295.290.000	83,5	866.100.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85,00	85	100	1.866.950.000	100	1.870.000.000	100	1.899.009.500	100	5.635.959.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85,00	85	100	53.616.000	100	56.296.800	100	59.112.000	100	169.024.800	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	100	201.153.600	100	211.211.000	100	221.772.000	100	634.136.600	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	NA	100	460.000.000	100	483.000.000	100	507.150.000	100	1.450.150.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.7	**Kec. NGARGOYOSO**							***360.100.000***		***378.105.000***		***397.011.000***		***1.135.216.000***		

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	84,925	75	85,1	900.000	85,3	945.000	85,51	993.000	85,51	2.838.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85	85	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	157.625.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85	85	100	127.200.000	100	133.560.000	100	140.238.000	100	400.998.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	362.537.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	NA	100	67.000.000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	211.217.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.8	**Kec. KARANGANYAR**							***20.446.000.000***		***20.593.300.000***		***21.034.965.000***		***62.074.265.000***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	85,075	75	100	400.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	1.261.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	19.500.000.000	100	19.600.000.000	100	19.992.000.000	100	59.092.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
		Presentase sarpas desa/kelurahan dalam kondisi baik	Jumlah kelurahan/desa dengan sarpras baik dibagi jumlah seluruh kecamatan / desa X 100%	%	100	100	100		100		100		100			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	29.000.000	100	30.450.000	100	31.972.500	100	91.422.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	95	517.000.000	96	542.850.000	96	569.992.500	96	1.629.842.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.9	**Kec. KARANGPANDAN**							***83.622.000***		***87.803.100***		***92.193.000***		***263.618.100***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	82,275	75	80,11	7.596.000	100	7.975.800	100	8.375.000	100	23.946.800	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali	%	97	100	100	25.976.000	100	27.274.800	100	28.638.000	100	81.888.800	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			100%													
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	97	100	100	27.590.000	100	28.969.500	100	30.418.000	100	86.977.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	100	100	6.450.000	100	6.772.500	100	7.111.000	100	20.333.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	100	100	16.010.000	100	16.810.500	100	17.651.000	100	50.471.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.10	**Kec.TASIKMADU**							***160.000.000***		***165.750.000***		***171.737.500***		***497.487.500***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	86,37	86,4	86,45	6.000.000	86,47	6.300.000	86,48	6.615.000	86,48	18.915.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85	88	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	85	90	100	40.000.000	100	41.000.000	100	42.000.000	100	123.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	100	100	100	59.000.000	100	61.950.000	100	65.047.500	100	185.997.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	94.575.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.11	**Kec.JATEN**							***470.760.000***		***494.298.000***		***519.012.900***		***1.484.070.900***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	80,975	75	81	33.760.000	81,05	35.448.000	81,1	37.220.400	81,1	106.428.400	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	88,89	85	90	40.000.000	92	42.000.000	93	44.100.000	93	126.100.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali	%	87,5	80	90	187.000.000	92	196.350.000	93	206.167.500	93	589.517.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			100%													
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	NA	NA	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	315.250.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	87,5	90	91	110.000.000	100	115.500.000	100	121.275.000	100	346.775.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.12	**Kec.COLOMADU**							***474.000.000***		***487.700.000***		***512.085.000***		***1.473.785.000***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	78,21	75	81	4.000.000	81,2	4.200.000	81,5	4.410.000	81,5	12.610.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	97	100	100	26.000.000	90	27.300.000	90	28.665.000	90	81.965.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	97	100	97	400.000.000	90	410.000.000	90	430.500.000	90	1.240.500.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase kegiatan wawasan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan	%	NA	NA	100	29.000.000	90	30.450.000	90	31.972.500	90	91.422.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PEMERINTAHAN UMUM	kebangsaan dan keagamaan	keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%													(Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	NA	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	47.287.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.13	**Kec. GONDANGREJO**							***282.600.000***		***296.730.000***		***311.566.500***		***890.896.500***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	skor	92,3	95	83,2	24.300.000	84,6	25.515.000	87,5	26.790.750	87,5	76.605.750	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	53.000.000	100	55.650.000	100	58.432.500	100	167.082.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	48.500.000	100	50.925.000	100	53.471.250	100	152.896.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan	%	NA	NA	100	113.500.000	100	119.175.000	100	125.133.750	100	357.808.750	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			keagamaan dikali 100%													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	43.300.000	100	45.465.000	100	47.738.250	100	136.503.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.14	**Kec. MOJOGEDANG**							***100.430.000***		***105.451.500***		***110.724.325***		***316.605.825***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai	80,61	86,67	84	8.140.000	84,5	8.547.000	85	8.974.350	85	25.661.350	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	98	98	16.500.000	93	17.325.000	94	18.191.250	94	52.016.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa dalam keadaan kondusif	Jumlah desa dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	98	98	37.950.000	94	39.847.500	95	41.840.000	95	119.637.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 %	%	NA	NA	100	15.950.000	90	16.747.500	90	17.585.000	90	50.282.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan	%	100	100	100	21.890.000	100	22.984.500	100	24.133.725	100	69.008.225	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PEMERINTAHAN DESA	yang sesuai ketentuan	RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%													(Kecamatan)
7.15	**Kec. KEBAKKRAMAT**							***301.480.000***		***316.554.000***		***332.381.700***		***950.415.700***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Nilai	81	84,75	85	3.000.000	86	3.150.000	87	3.307.500	87	9.457.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	90	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	63.050.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	81	90	91	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	662.025.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 %	%	NA	NA	100	52.480.000	100	55.104.000	100	57.859.200	100	165.443.200	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	NA	91	16.000.000	100	16.800.000	100	17.640.000	100	50.440.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7.16	**Kec.KERJO**							***135.000.000***		***141.750.000***		***148.837.500***		***425.587.500***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai	83,785	75	81	5.000.000	81,2	5.250.000	81,5	5.512.500	81,5	15.762.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	90	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	78.812.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa dalam keadaan kondusif	Jumlah desa dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	80	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	126.100.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 %	%	NA	NA	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	63.050.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	90	100	45.000.000	100	47.250.000	100	49.612.500	100	141.862.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
7.17	**Kec.JENAWI**							***172.700.000***		***181.335.000***		***190.401.750***		***544.436.750***		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di	Nilai	85,225	75	85,25	5.200.000	85,3	5.460.000	85,35	5.733.000	85,35	16.393.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			wilayah Kecamatan													
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	85	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	63.050.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	85	100	35.000.000	100	36.750.000	100	38.587.500	100	110.337.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 %	%	NA	NA	100	90.000.000	100	94.500.000	100	99.225.000	100	283.725.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	NA	NA	100	22.500.000	100	23.625.000	100	24.806.250	100	70.931.250	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							***85.525.000.000***		***4.068.750.000***		***4.203.337.500***		***93.797.087.500***		
8.01	***KESBANGPOL***							***85.525.000.000***		***4.068.750.000***		***4.203.337.500***		***93.797.087.500***		
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Nilai indeks	Indeks	NA	NA	70	1.500.000.000	72	1.520.000.000	74	1.550.400.000	74	4.570.400.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	KEBANGSAAN															
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	Nilai indeks	Indeks	NA	NA	70	82.000.000.000	72	415.000.000	74	450.000.000	74	82.865.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Nilai indeks	Indeks	NA	NA	50	175.000.000	53	183.750.000	56	192.937.500	56	551.687.500	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai indeks	Indeks	NA	NA	60	650.000.000	62	700.000.000	64	735.000.000	64	2.085.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan dibagi total jumlah konflik sosial yang terjadi selama 1 (satu) tahun	%	NA	NA	80	1.200.000.000	82	1.250.000.000	84	1.275.000.000	84	3.725.000.000	Kabupaten Karanganyar	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
IX	***NON URUSAN PEMERINTAHAN***															
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**1.223.241.889.060**		**1.227.754.770.970**		**1.237.389.297.382**		**3.688.385.957.412**		
1.01		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK)	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD	%	80	80,15	80	596.000.000.000	80,15	596.500.000.000	80,3	597.000.000.000	80,3	.789.500.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISDIKBUD

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		yang tercapai targetnya	yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%													
1.02		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	90	90	90	286.000.000.000	90	286.500.000.000	90	289.365.000.000	90	861.865.000.000	Kabupaten Karanganyar	DINKES
1.03		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	85	18.354.347.200	86	18.480.881.920	87	18.508.970.112	87	55.344.199.232	Kabupaten Karanganyar	DPUPR
1.05		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	100	8.000.000.000	100	8.100.000.000	100	8.181.000.000	100	24.281.000.000	Kabupaten Karanganyar	SATPOL PP
1.05		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	85	3.479.500.000	86	3.503.800.000	87	3.633.800.000	87	10.617.100.000	Kabupaten Karanganyar	BPBD
1.06		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	80	83	100	4.550.000.000	100	4.677.500.000	100	4.771.050.000	100	13.998.550.000	Kabupaten Karanganyar	DINSOS
2.08		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah	%	80	80	80	4.500.000.000	83	4.575.000.000	85	4.666.500.000	85	13.741.500.000	Kabupaten Karanganyar	DP3APPKB

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			indikator sasaran dan program di OPD kali 100%													
2.11		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	NA	NA	85	16.309.980.000	86	16.256.011.500	87	17.265.843.800	87	49.831.835.300	Kabupaten Karanganyar	DLH
2.12		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	85	8.000.000.000	86	8.100.000.000	87	8.262.000.000	87	24.362.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISDUK CAPIL
2.13		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	100	4.000.000.000	100	4.100.000.000	100	4.182.000.000	100	12.282.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISPERMASDES
2.15		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	70,74	72	90	10.142.000.000	91	10.150.000.000	92	10.250.000.000	92	30.542.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISHUB
2.16		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	80	80	65	4.351.704.700	67	4.386.875.650	70	4.518.483.513	70	13.257.063.863	Kabupaten Karanganyar	DISKOMINFO
2.18		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di	%	100	100	86	5.000.000.000	87	5.107.101.900	88	5.260.314.957	88	15.367.416.857	Kabupaten Karanganyar	DPMPTSP

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			OPD kali 100%													
2.23		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	80	80	85	4.000.000.000	86	4.100.000.000	87	4.182.000.000	87	12.282.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISARPUS
3.26		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	83,97	84	86	4.000.000.000	87	4.140.000.000	88	4.645.000.000	88	12.785.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISPARPOR
3.27		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	85	85	85	17.520.000.000	86	17.600.000.000	87	16.357.000.000	87	51.477.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISPERTAN
3.30		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	NA (OPD Baru 2023)	70	70	12.281.000.000	75	12.304.100.000	75	12.492.500.000	75	37.077.600.000	Kabupaten Karanganyar	DISDAGPERINNAKER
3.31		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	98,36	100	85	3.700.000.000	86	3.760.000.000	87	3.900.000.000	87	11.360.000.000	Kabupaten Karanganyar	DISKUKTRANSESDM
4.01		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	100	20.700.000.000	100	20.735.000.000	100	20.942.350.000	100	62.377.350.000	Kabupaten Karanganyar	SETDA

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
4.02		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	100	37.141.000.000	100	38.100.000.000	100	38.481.000.000	100	113.722.000.000	Kabupaten Karanganyar	SETWAN
5.01		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	99	100	85	6.000.000.000	86	6.050.000.000	87	6.110.500.000	87	18.160.500.000	Kabupaten Karanganyar	BAPERLITBANG
5.02		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	100	100	100	70.320.000.000	100	70.286.000.000	100	70.988.860.000	100	211.594.860.000	Kabupaten Karanganyar	BKD
5.03		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	90	90	90	6.642.357.160	90	6.700.000.000	90	6.834.000.000	90	20.176.357.160	Kabupaten Karanganyar	BKPSDM
6.01		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	73,45	70	90	9.000.000.000	90	9.050.000.000	90	9.140.500.000	90	27.190.500.000	Kabupaten Karanganyar	INSPEKTORAT
7.1		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	93	3.000.000.000	95	3.100.000.000	97	3.255.000.000	97	9.355.000.000	Kabupaten Karanganyar	JATIPURO

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7.2		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.200.000.000	100	2.250.000.000	100	2.275.000.000	100	6.725.000.000	Kabupaten Karanganyar	JATIYOSO
7.3		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	73	74	100	2.500.000.000	100	2.600.000.000	100	2.730.000.000	100	7.830.000.000	Kabupaten Karanganyar	JUMANTONO
7.4		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	73	2.700.000.000	74	2.735.000.000	75	2.789.700.000	75	8.224.700.000	Kabupaten Karanganyar	JUMAPOLO
7.5		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.300.000.000	100	2.315.000.000	100	2.361.300.000	100	6.976.300.000	Kabupaten Karanganyar	MATESIH
7.6		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	6.000.000.000	100	6.100.000.000	100	6.405.000.000	100	18.505.000.000	Kabupaten Karanganyar	TAWANG MANGU

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7.7		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	96	96	96	2.200.000.000	97	2.300.000.000	98	2.415.000.000	98	6.915.000.000	Kabupaten Karanganyar	NGARGO YOSO
7.8		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.400.000.000	100	2.500.000.000	100	2.625.000.000	100	7.525.000.000	Kabupaten Karanganyar	KARANG PANDAN
7.9		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	99	99,5	100	17.000.000.000	100	17.150.000.000	100	18.007.500.000	100	52.157.500.000	Kabupaten Karanganyar	KARANG ANYAR
7.10		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.800.000.000	100	2.840.000.000	100	2.982.000.000	100	8.622.000.000	Kabupaten Karanganyar	TASIKMADU
7.11		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.255.000.000	100	9.355.000.000	Kabupaten Karanganyar	JATEN

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7.12		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	72,8	70	100	850.000.000	100	862.500.000	100	905.625.000	100	2.618.125.000	Kabupaten Karanganyar	COLOMADU
7.13		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.800.000.000	100	2.840.000.000	100	2.982.000.000	100	8.622.000.000	Kabupaten Karanganyar	GONDANG REJO
7.14		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.400.000.000	100	2.420.000.000	100	2.541.000.000	100	7.361.000.000	Kabupaten Karanganyar	MOJO GEDANG
7.15		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.000.000.000	100	2.050.000.000	100	2.125.000.000	100	6.175.000.000	Kabupaten Karanganyar	KEBAK KRAMAT
7.16		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%	100	100	100	2.600.000.000	100	2.630.000.000	100	2.761.500.000	100	7.991.500.000	Kabupaten Karanganyar	KERJO

No	Urusan/Program	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		2024		2025		2026		Target Akhir RPD		Lokasi	Penanggung jawab
					Capaian 2022	Target 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7.17		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di kecamatan kali 100%	%			95	2.500.000.000	96	2.650.000.000	97	2.782.500.000	97	7.932.500.000	Kabupaten Karanganyar	JENAWI
8.01		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	%	92	92	90	4.000.000.000	91	4.050.000.000	92	4.252.500.000	92	12.302.500.000	Kabupaten Karanganyar	BAKES BANGPOL
	JUMLAH							***2.211.492.393.660***		***2.221.132.059.470***		***2.234.399.590.457***		***6.667.024.043.586***		

Sumber : Baperlitbang 2023, diolah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah tetapi perlu didukung dengan kontribusi para pihak lain. Para pihak yang dapat dilibatkan dalam pencapaian TPB adalah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial keagamaan, kelompok masyarakat, filantropi (pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan), pelaku usaha, dan akademisi, fokus pada peningkatan peran kelompok perempuan, kelompok rentan dan kaum disabilitas, kelompok pemuda, dan kelompok pemerhati anak.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dengan pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 3 tahun.

Pembagian indikator kunci yang menjadi indikator kinerja dalam mensukseskan keberhasilan visi - misi tertuang pada Tabel 8.1. berikut.

Tabel 8.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah

Indikator Kineja Utama Pemkab	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ***Indeks Daya Saing Daerah***		***Hasil Penilaian dari BRIN***	**Indeks**	***3,617***	***3,700***	***3,750***	***3,800***	***3,850***	***3,850***
	1) Angka Kemiskinan	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
	2) Indeks Pembangunan Manusia	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,80	77,20	77,40	77,68	77,68
	3) Pertumbuhan Ekonomi	Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
	4) Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
	5) Indeks Resiko Bencana	Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Indeks	91,51	90	82	81	81	80

Sumber : OPD dan BAPERLITBANG, 2023

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel 8.2, sedangkan Indikator Kunci Perangkat Daerah terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) terdapat pada Tabel 8.3.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**									
a	***Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan***									
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Harapan Lama Sekolah	HLS=i=7∑kPiEi. Dimana hls adalah harapan lama sekolah pada umur a di tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, eite_i^teit jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t, pitp_i^tpit adalah penduduk usia iii pada thun ttt dan iii adalah usia (a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., n).(a,a+1,...,n).	Tahun	Na	13,98	13,5	13,6	13,7	13,7
		Rata-rata Lama Sekolah	RLS=n1i=1∑nxi dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	Na	8,71	8,45	8,5	8,55	8,55
b	***Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan***									

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK, Proses Seleksi Indikator, Indikator Hasil Seleksi, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot Tiap Dimensi, dan Penghitungan IPK. IPK disusun atas 7 (tujuh) dimensi dengan rincian antara lain Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender	Indeks	70	80	72	73	74	74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	80,00	78,00	78,00	78,20	78,50
2.	**Dinas Kesehatan**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
	Indeks Pembangunan Manusia		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Usia Harapan Hidup	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Tahun	77,64	77,84	77,67	77,70	77,73	77,73
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	52,07	75,00	74,00	72,00	70,00	70,00

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000							
		Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000	Per 1.000 kelahiran hidup	7,20	9,70	9,50	9,30	9,10	9,10
		Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk dibagi Total Balita X 100%	%	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	81,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
	Angka Kemiskinan		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
		Cakupan layanan air minum	Jumlah penduduk yang telayani jaringan air minum dibagi jumlah penduduk total dikali 100%	%	94,00	95,00	96,00	96,50	97,00	97,00
		Cakupan layanan air bersih	Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air bersih dibagi jumlah penduduk total dikali 100%	%	Na	Na	96,00	96,50	97,00	97,00
		Cakupan layanan sanitasi	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah penduduk total dikali 100%	%	96,00	97,00	97,50	98,00	98,50	98,50
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			dikali 100%							
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi total panjang jalan kabupaten x 100%	%	80,00	88,00	82,00	83,00	84,00	84,00
	Indeks Resiko Bencana		Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Indeks	91,51	90	82	81	81	80
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), dioperasi dan pelihara (Ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	%	71,33	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
	Angka Kemiskinan		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
		Persentase Kawasan Kumuh	(luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100%	%	18,09	39,00	28,16	34,13	43,08	43,08
		Persentase Penanaganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100%	%	4,71	4,78	5,71	6,22	6,74	6,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat	Nilai	72,00	73,00	73,30	73,60	74,00	74,00

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			Daerah							
4.	**Satuan Polisi Pamong Praja**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	Na	80,00	65,00	67,00	70,00	70,00
		Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	Na	37	37,30	38,00	38,50	38,50
		Respontime Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap *(Respontime Rate)* daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	%	52,60	48,80	48,80	48,90	48,90	48,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	87,63	88,00	89,00	90,00	90,00
5.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**									
	Indeks Resiko Bencana		Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Indeks	91,51	90	82	81	81	80
		% Desa/ Kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	%	10,17	9,04	11,86	13,56	15,82	15,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	71,00	67,00	72,25	72,50	73,00	73,00

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
6.	**Dinas Sosial**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
	Angka Kemiskinan		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang ditangani di tahun n dibagi jumlah seluruh PPKS tahun n dikali 100%	%	2,17	2,50	70,00	71,00	72,00	72,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	74,44	79,44	81,00	82,00	83,00	83,00
7.	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Indeks Pembangunan Gender	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	97,3	97,35	97,4	97,45	97,5	97,5
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
		TFR	Jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	2,22	2,50	2,16	2,13	2,10	2,10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72	79,35	73	73,25	73,5	73,5
8.	**Dinas Lingkungan Hidup**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Indeks Resiko Bencana		Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Indeks	91,51	90	82	81	81	80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indek	63,22	58,24	58,70	59,13	59,53	59,53
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70	62,25	74,65	74,75	74,80	74,80
9.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5	%	Na	82,31	94,70	96,80	99,90	99,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	82	83,23	75,00	75,50	76,00	76,00
10.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
	Angka Kemiskinan		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
		Indeks Desa Membangun	Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Indeks	0,7078	0,6858	0,7088	0,7098	0,7108	0,7108
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	76,00	79,00	73,00	74,00	75,00	75,00
11.	**Dinas Perhubungan**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio di jalan Kabupaten	Rasio	60,00	60,00	0,76	0,70	0,66	0,66
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70,00	65,75	71,00	72,00	73,00	73,00
12.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Indeks SPBE	Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,32	3,50	3,55	3,60	3,70	3,70
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
		Tingkat keamanan Informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	62,00	63,00	63,00	64,00	65,00	65,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
		Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			jumlah OPD dikali 100%							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	71,00	72,00	72,50	73,00	73,50	73,50
13.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Realisasi Investasi	Jumlah investasi yang dicapai setiap tahunnya	Rp (Triliyun)	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70,00	77,06	78,00	80,00	83,00	83,00
14.	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
	Indeks Pembangunan Manusia		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	UPLM: Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur pembangunan Literasi Masyarakat AM: Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan $\text{Rumus} = \sum \frac{\text{UPLM}}{\text{AM}} 100$	Indeks	78,97	NA	79	79,5	80	80

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Indeks Arsip	LAKE n-3 + MTLHP n-2 + MTLHP n-1 STD LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar	Indeks	64,36	85,00	65,00	66,00	67,00	67,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	73,00	82,67	74,00	75,00	76,00	76,00
15.	**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
	Indeks Pembangunan Manusia		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah total prestasi pemuda dan prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional	Medali	Na	Na	20	25	30	30
			Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Na	Na	2,00	2,00	2,00	2,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Total PAD Sektor Pariwisata	Rp (Milyar)	Na	Na	1,50	2,00	2,50	2,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	78,07	75,00	78,00	80,00	80,00
16.	**Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Skor Pola Pangan Harapan	Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Score	89,2	84,30	90,00	90,50	91,00	91,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
		Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Produksi padi/luas panen	ton/Ha	6,22	6,22	6,22	6,23	6,24	6,24
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
		Produktivitas Perikanan	jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan/luas lahan panen	Kg/m2	6,6	6,7	6,8	7,00	8,00	8,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	76,48	76,73	76,98	77,23	77,23
17.	**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	Indeks Pembangunan Manusia		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	76,58	76,30	77,20	77,40	77,68	77,68
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	70,7	74,99	71,1	71,3	71,6	71,6
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Berdasarkan hasil perhitungan	%	5,7	5,80	5,60	5,55	5,5	5,5

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka							
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Unit	NA	4	5	7	7	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
		Jumlah sentra industri mikro yang dibentuk	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	Sentra	Na	5	8	11	14	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	71	71,25	71,50	71,75	71,75
18.	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
	Pertumbuhan Ekonomi		Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
		Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	%	23	24	25	26	27	27
		Persentase Usaha Mikro yang dibina	Jumlah usaha mikro yg dibina dibagi jumlah usaha mikro yg terdaftar dikali 100 %	%	Na	1,3	1,32	1,33	1,34	1,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	70	70	70	70	70

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
19.	**Sekretariat Daerah**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69,00	80,00	75,00	77,00	80,00	80,00
		Pertumbuhan pendapatan BUMD dan BLUD	Laporan keuangan dari Akuntan Publik	persen	100	100	100	100	100	100
		Indeks Tatalaksana pengadaan barang dan jasa	Hasil Penilaian oleh LKPP	Nilai	33,9	50	60	70	80	80
		Realisasi APBD	Jumlah penyerapan anggaran dibagi jumlah anggaran x 100 %	persen	87,85	100	100	100	100	100
		Realisasi SPM	Hasil Penilaian oleh Kemendagri	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Raperda yang diusulkan ke Propemperda	Jumlah yang dilaksanakan dibagi jumlah yang diusulkan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Koordinasi bidang Kesra	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase terpenuhinya fasiitas prokompinda	Jumlah yang dilaksanakan dibagi jumlah yang diusulkan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100
20.	**Sekretariat DPRD**									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	82,65	100,00	82,75	82,81	82,91	82,91
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70,87	80,00	80,75	81,25	81,75	81,75
21.	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**									
	Urusan Perencanaan									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat	Indeks	63	64	65	67	70	70

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			Daerah							
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Penilaian oleh Kemendagri	Indeks	Perlu Perbaikan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	87,39	74,00	75,00	76,00	76,00
	Urusan Penelitian dan Pengembangan									
		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian oleh Kemendagri	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
22.	**Badan Keuangan Daerah**									
	Urusan Keuangan									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian dari BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Na	70,00	73,00	75,00	77,00	77,00
23.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**									
	Urusan Urusan Kepegawaian									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Merit Sistem	Hasil penilaian oleh KASN	Indeks	186	200	250	260	275	275
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	68,00	75,00	76,00	78,00	80,00	80,00
24.	**Inspektorat Daerah**									
	Urusan Pengawasan									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Maturitas SPIP	Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Level	Na	3	3	3	3	3

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	78,00	78,00	79,00	80,00	80,00	80,00
	Unsur Kewilayahan									
25.	**Kecamatan Jatipuro**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	73,45	70,00	73,50	73,75	74,00	74,00
26.	**Kecamatan Jatiyoso**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,50	70,00	73,00	73,20	73,50	73,50
27.	**Kecamatan Jumantono**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	73,50	70,00	75,30	75,60	75,80	75,80
28.	**Kecamatan Jumapolo**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat	Nilai	70,55	100,00	72,00	73,00	74,00	74,00

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			Daerah							
29.	**Kecamatan Matesih**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69,00	70,00	72,00	72,50	73,00	73,00
30.	**Kecamatan Tawangmangu**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,80	70,00	73,00	73,30	73,50	73,50
31.	**Kecamatan Ngargoyoso**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69,54	85,00	71,11	71,88	72,66	72,66
32.	**Kecamatan Karangpandan**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70,11	70,00	71,15	71,90	72,65	72,70
33.	**Kecamatan Karanganyar**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69	70,00	72,00	72,50	72,75	72,75
34.	**Kecamatan Tasikmadu**									

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	73,40	70,00	74,50	74,70	75,00	75,00
35.	**Kecamatan Jaten**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	75,30	70,00	75,33	75,35	75,37	75,37
36.	**Kecamatan Colomadu**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,78	70,00	72,90	73,00	73,10	73,10
37.	**Kecamatan Gondangrejo**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,51	70,00	74,00	75,00	75,00	75,00
38.	**Kecamatan Mojogedang**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,00	70,00	72,00	74,00	74,00	74,00
39.	**Kecamatan Kebakkramat**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69,00	70,00	72,00	73,00	74,00	74,00
40.	**Kecamatan Kerjo**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,76	70,00	72,00	73,00	74,00	74,00
41.	**Kecamatan Jenawi**									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,00	70,00	72,00	72,25	72,50	72,50
42.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**									
	Unsur Pemerintahan Umum Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	Jumlah kasus konflik SARA yang berhasil dikendalikan dibagi jumlah kasus konflik SARA yang terjadi dikali 100%	%	0	0	0	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	72,50	88,16	74,00	74,50	75,00	75,00

Sumber : OPD 2023
Keterangan :
Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan).

Tabel 8.3.

Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar (Permendagri 18 tahun 2020)

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							Pendidikan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sekolah PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 kali 100%	%	100	100	100	100	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sekolah dasar (SD) dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100%	%	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang sekolah SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali 100%	%	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang sekolah kesetaraan dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum sekolah kali 100%	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Kesehatan
1.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
2.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
3.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
4.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
5.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	100	100	100	100	
7.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayahkerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
8.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
9.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita DM yang mendapatkan	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas	%	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pelayanan kesehatan sesuai standar	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun						
11.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
12.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
13.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	%	70	71	72	72	
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota dikali 100%	%	88	89	90	90	
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Layak dibagi rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota dikali 100%	%	95	96	97	97	
4.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang berbanding dengan Total Panjang Jalan Kabupaten	%	86	87	88	88	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%	%	100	100	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100%	%	28,16	34,13	43,08	43,08	
4.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik dibagi seluruh perumahan yangada dikali 100%	%	40	43	45	45	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penyelesaian gangguan trantibum yang ditemukan	%	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	75	80	80	80	
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100	100	100	100	
4.	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100	100	100	100	
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga masyarakat terdampak yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dibagi Jumlah seluruh masyarakat kabupaten yang terdampak, kali 100%	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							Sosial
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti , dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis X 100 %	%	100	100	100	100	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kcbutuhan dasamya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							Tenaga Kerja
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD, dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	%	50	55	55	55	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, dibagi	%	25	27	30	30	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%						
3.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, dibagi Jumlah Perusahaan x 100%	%	64	65	65,9	65,9	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan, dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	%	50	55	55	55	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							PPPA
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD, dibagi Jumlah seluruh belanja langsung APBD x100%	%	6,5	7,0	7,5	7,5	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi, dibagi Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100%	%	100	100	100	100	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, dibagi Jumlah penduduk perempuan X 100.000	%	0,0044	0,0042	0,0041	0,0040	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							Pangan
1	Skor PPH	Perhitungan ola pangan masyarakat dibanding pola pangan ideal	nilai	90	90,5	91	91	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							Lingkungan Hidup
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	58,70	59,13	59,53	59,53	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulangan sampah.	%	75	80	82	86	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	75	81	82	83	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.	Perekaman KTP elektronik	Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia17 tahun keatas.	%	98	98,5	99,37	99,37	
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Perbandingan anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17	%	22,5	22,75	23	23	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Perbandingan jumlah anak 0- 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0 -18	%	98,00	98,33	98,05	98,05	
4.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan terhadap jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten Karanganyar dikali 100%	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun / jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100%	%	0,86%	0,86%	0,86%	2,58%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							Pengendalian Penduduk dan KB
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	$\text{TFR} = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $\text{ASFRi} = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	Indeks	2,16	2,13	2,1	2,1	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modem, dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	71,7	71,9	72	72	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani, dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	12	11,7	11,4	11,4	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							Perhubungan
1.	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: a. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	Rasio	67	67	67	67	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							Komunikasi dan Informatika
1.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten dibagi jumlah penduduk x 100%	%	100	100	100	100	
2.	Jumlah KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif	%	25	28	31	31	
3.	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik dibagi jumlah aplikasi pemeritah keseluruhan x 100%	%	39	40	41	41	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							Koperasi UKM
1.	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	%	25	26	27	27	
2.	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	Jumlah usaha mikro baru dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	5	5	5	5	
3.	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan volume usaha dan aset dibagi Jumlah koperasi aktif 100 %	%	52	54	57	57	
4.	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	10	13	17	17	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							Penanaman Modal
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	*(Nilai investasi tahun n - tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun n-1)x 100%*	%	0,25	0,25	0,25	0,25	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							Pemuda & olahraga
1.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional, nasional dan internasional	medali	20	25	30	30	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							Statistik
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							Persandian
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi, dibagi Jumlah area	%	63	64	65	65	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penilaian x 100%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Kebudayaan
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase benda dan tak benda cagar budaya yang dilestarikan	%	90	91	92	92	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							Perikanan
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	1000 ton	2,46	2,47	2,48	2,48	
2.	Angka Konsumsi Ikan	Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun	Kg/ kap/ thn	23	23,5	24	24	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							Pariwisata
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$= \frac{\text{Jumlah wisatawan mancanegara}}{\text{Jumlah target wisatawan mancanegara}} \times 100\%$	%	1	1	1	1	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							Pertanian
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Kw/ha	62,2	62,3	62,4	62,4	
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Upaya pengendalian penyakihewan yang menular	%	10	9	8	8	
3.	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	Jumlah akumulasi produksi daging sapi potong + daging ayam pedaging + daging ayam petelur + daging ayam buras + produksi telur ayam petelur + produksi telur ayam buras	kg	21.934.778	23.031.517	24.183.092	24.183.092	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							Perdagangan
1.	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan berizin	Jumlah komitmen perusahaan berizin yang dipenuhi dibagi jumlah jumlah seluruh perusahaan dikali 100%	%	30	35	40	40	
2.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	65	70	75	75	
3.	Persentase pemenuhan standarisasi SNI secara bertahap	Jumlah sarana perdagangan yang memenuhi standarisasi SNI dibagi jumlah sarana perdagangan Kabupaten dikali 100%	%	55,55	61,11	61,11	61,11	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							Perindustrian
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	30	32	33	33	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)							Sekretariat Daerah
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif) / (Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x 100%	%	100	100	100	100	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)							Keuangan
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100%	%	10	10	10	10	
2.	Rasio PAD	Realisasi PAD dibagi pendapatan daerah dikali 100%	%	23	23	23	23	
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan (Seluruh Belanja Daerah diluar Belanja Modal) dikurangi transfer expenditure (Hibah, Bansos, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Bankeu dan BTT) dibagi Jumlah Belanja APBD dikalikan 100%	%	69	69	69	69	
4.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	%	93	93	93	93	
5.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	%	100	100	100	100	
6.	Manajemen Aset	Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	%	100	100	100	100	
7.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8	8	8	8	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)							Kepegawaian
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas, dibagi Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah x 100%	%	127,83	130	135	135	
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan), dibagi Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	15,55	25	35	35	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru & tenaga kesehatan), dibagi Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	87,18	100	100	100	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)							Pengawasan
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan	Level	3	3	3	3	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Level	3	3	3	3	

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk mengisi kekosongan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar yang telah selesai masa berlakunya sampai dengan dipilihnya Kepala Daerah yang baru. Penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2018-2022 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dala penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 hinga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, DPRD, instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Tabel 5.7

Cascading Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

TUJUAN
Meningkatkan Daya Saing Daerah

INDIKATOR
Indeks Daya Saing Daerah

SASARAN 1	: Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
INDIKATOR	: Angka Kemiskinan

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	OPD
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	DPUPR
	2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	
	3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	
	4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase saluran dalam kondisi baik	
	5. Program penataan bangunan gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	
	6. Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	
	7. Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Program pengembangan perumahan	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DPUPR
	2. Program kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha	
	3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan RTLH	
	4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	
	5. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Program penataan desa	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	DISPERMASDES
		Persentase desa yang dibasiliasi dalam pembangunan sarana prasarana	
	2. Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	
	3. Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	
		Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	
	4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	
Sosial	1. Program pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	DINSOS
	2. Program rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
		Persentase Lansia Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
	3. Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
	4. Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan sekitar tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	
		Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	

SASARAN 2	: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan
INDIKATOR	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	OPD
Pendidikan	1. Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	DISDIKBUD
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
		Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
		Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang penyelenggaranya dalam pendidikan kesetaraan	
	2. Program pengembangan kurikulum	Persentase kurikulum yang dilaksikan	
	3. Program pendidik dan tenaga kependidikan	Presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart	
	4. Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	
Kesehatan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama	DINKES
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditasi minimal utama	
		Persentase Desa STBM	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellus	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	
	3. Program pemenuhan sarana kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan	
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan	
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	
	4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Desa siaga Aktif/Mandiri	
		Persentase rumah tangga sehat	
Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	DISARPUS
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program pengendalian penduduk	ASFR	DP3APPKB
	2. Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi CPR)	
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB	
	3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase tribina aktif	
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Lembaga Pemerintah yang ResponsifGender	DP3APPKB
	2. Program perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan	
	3. Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	
	4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	
	5. Program pemenuhan hak anak (PHA)	Jumlah desa layak anak	
	6. Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan anak	
Tenaga Kerja	1. Program perencanaan tenaga kerja	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	DISDAGPERIN NAKER
	2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase keltersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	
	3. Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	
	4. Program hubungan industrial	Persentase penselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	
Kepemudaan Dan Olahraga	1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	DISPARPORA
	2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang dibina	
	3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	

SASARAN 3	: Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
INDIKATOR	: Pertumbuhan Ekonomi

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	OPD
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru	DISKUKTRANS ISOM
	2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	
	3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat	
	4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat	
	5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan	
	6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina	
	7. Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)	
Perindustrian	1. Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	DISDAGPERIN NAKER
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	
	2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Jumlah hasil penrvisbuan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah	
	3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan teknis pada SINas	
Penanaman Modal	1. Program pengembangan iklim penanaman modal	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	DPMPTSP
	2. Program promosi penanaman modal	Jumlah promosi yang dilaksanakan	
	3. Program pelayanan penanaman modal	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang diselesaikan tepi tehunnya	
	4. Program pengendalian pelaksanaan modal	Persentase jumlah pelaku usaha yang dapat dawasi	
	5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	
Perdagangan	1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	DISDAGPERIN NAKER
	2. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan standarisasi SNI secara bertahap	
	3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase akses informasi harga	
	4. Program Pengembangan Ekspor	Jumlah produk ekspor	
	5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	
	6. Program Penguyuan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	
Perhubungan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	DISHUB
		Persentase terminal kondisi baik	
		Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	DPUPR
Kelautan Dan Perikanan	1. Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	DISPERTANPP
	2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang dipromosikan	
	2.Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase perairan umum daratan yang dawasi	
Pertanian	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi tanaman pangan utama (padi)	DISPERTANPP
		Produksi tanaman pangan utama (jagung)	
		Produksi hortikultura unggulan (cabai)	
		Produksi hortikultura unggulan (durian)	
		Produksi perkebunan unggulan (kopi)	
		Produksi perkebunan unggulan (tembakau)	
		Sapi	
		Kambing/Domba	
		Ayam	
		Kelinci	
	2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	
	3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Angka kesakitan ternak besar (%)	
		Angka kesakitan ternak kecil (%)	
		Angka kesakitan unggas (%)	
	4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	
	5. Program penyuluhan pertanian	Cakupan kelompok tani yang aktif	
Pangan	1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Konsumsi Energi (AKE);	DISPERTANPP
		Angka Konsumsi Protein (AKP);	
		Indeks Ketahanan Pangan	
	2. Program penanganan kerawanan pangan	Persentase desa rentan pangan	
	3. Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	
Pariwisata	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar	DISPARPORA
	2. Program pemasaran pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan	
	3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
	4. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan	
Kebudayaan	1. Program pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	DISDIKBUD
	2. Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	
	3. Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	
	4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	

SASARAN 4	: Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
INDIKATOR	: Indeks Reformasi Birokrasi

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	OPD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Perencanaan	1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	BAPERLITBANG
	2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	
		Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Keuangan	1. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase kelepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase kelepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku	BKD
	2. Program pengelolaan barang milik daerah	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	
	3. Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Kepegawaian	Program kepegawaian daerah	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	BKPSDM
		Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat	
		Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	
		Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan	
Kewilayahan	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	KECAMATAN
	2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	
	3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	
	4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan kesagamaan.	
	5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	SEKRETARIAT DAERAH
		Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	
		Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	
	2. Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah	
		Persentase kegiatan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	
		Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	
	3. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	SEKRETARIAT DPRD
Non Urusan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Semua OPD
Kearsipan	1. Program pengelolaan arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	DISARPUS
	2. Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Komunikasi dan Informatika	1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DP) melalui website	DISKOMINFO
		Jumlah KIM aktif	
	2. Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	
Pengawasan	1. Program penyelenggaraan pengawasan	Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	
		Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	
		LHR LKPD	
	2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	
Penelitian Dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	BAPERLITBANG
		Persentase inovasi yang diimplementasikan	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Program pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
	2. Program pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	
	3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	
		Inovasi pelayanan adminduk	
	3. Program pengelolaan profil kependudukan	Temsusmnya buku profil data kependudukan	
		Tersusunnya buku data kependudukan	
Pemerintahan Umum	1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	BAKESBANGPOL
	2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	
	3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	
	4. Program pembinaan dan pengembangan kebangsaan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	
	5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	
Ketentreman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Program peningkatan ketentreman dan ketertiban umum	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOLPP
	2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

SASARAN 5	: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
INDIKATOR	: Indeks Resiko Bencana

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	OPD
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase pelayanan informasi rawan bencana	BPBD
		2. Persentase pelayanan pencegahan dan kesiagasiagaan terhadap bencana	
		3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam	
Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DLH yang tersusun
	2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, lahan) yang memenuhi baku mutu	
	3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	
	4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3	
	5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan atau usaha yang telat terhadap peraturan perundang-undangan	
	6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan LH	
	7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Cakupan Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang menjukti Penghargaan Tingkat Nasional	
	8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase bnda lanjut aduan lingkungan hidup	
	9. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkelola	